

Salah satu akar kemiskinan nelayan adalah keterjeratan hidup mereka dalam pranata sosial yang dibangun atas dasar kesepakatan alamiah, yakni bagaimana nelayan mempelajari dan mendefinisikan kehidupannya.

Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keyakinan dirinya. Pengetahuan dan keyakinan tersebut merupakan kebudayaan yang berisi konsep, nilai, sistem, katagorisasi, metode bahkan teori-teori yang digunakan secara kolektif oleh mereka. Perwujudan kebudayaan tersebut Diperantarai atau dapat dilihat dari pranata-pranata sosial yang ada.

Dua pranata yang dianggap penting untuk memahami kehidupan nelayan adalah penangkapan dan pemasaran ikan. Namun pranata sosial tersebut dapat tertutupi Oleh kehadiran perempuan nelayan yang berfungsi sebagai "katup pengaman" atas keterjeratan nelayan dari sistem yang mereka yakini.

Kehadiran perempuan di sektor publik sekaligus mengurangi dominasi (untuk tidak mengatakan "menggeser") terhadap peran patriarki laki-laki yang selama ini terbentuk oleh Sistem budaya dan sosial masyarakat.

RUANG SOSIAL PEREMPUAN PESISIR

Abdul Cholik
Nurul Yakin

BP2M
RUANG SOSIAL PEREMPUAN PESISIR

Abdul Cholik & Nurul Yakin



BP2M



RUANG SOSIAL PEREMPUAN PESISIR

Abdul Chalik

Nurul Yakin

Tata letak :Mu'thi Abidah Cho

Tata sampul : Interpena Adv

Tata bahasa : Ali Syamsuri, H. Rahmat

Penyelaras akhir : Zainul Fuad

Pra cetak : Wardatul Karomah

ISBN :979-1740-50-X

Penerbit : Interpena

**Jl. Anggrek 74 Kradenan RT. 10/RW 09 Mangunharjo Depok Sleman
Yogyakarta**

Email : interpena@yahoo.com

BAB I

POTRET DESA PESISIR PANTURA

A. Mengenal masyarakat Kranji.

Desa Kranji adalah salah satu desa pesisir di pantai utara dengan nuansa religius yang sangat ketat. Jarak desa ini dengan ibu kota Kabupaten 38 km, dengan jarak tempuh 1 jam. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tunggul, sebelah timur berbatasan dengan desa Banjaranyar, sebelah selatan adalah hutan dan *tegalan* yang tidak produktif sementara di bagian utara adalah laut Jawa. Di desa ini terdapat 3 dusun, yakni dusun Sidodadi, dusun Tepanas dan dusun Kranji. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di dusun Kranji, karena dusun ini berada di tepi jalan raya dan tepat di bibir pantai. Sementara dusun terjauh adalah Tepanas yang berada di sisi selatan, atau sekitar 1 km dari jalan raya. Konsentrasi riset dan pemberdayaan difokuskan pada masyarakat Kranji yang secara sosiologis sudah mewakili masyarakat yang berada di dua dusun lainnya.

Jumlah penduduk Kranji 6.239 jiwa, atau sekitar 1543 KK. Dari jumlah tersebut, yang masuk usia produktif (15-55 tahun) mencapai 3.797 jiwa, dengan rincian; yang masih sekolah, 1.048 jiwa, ibu rumah tangga 628 jiwa, bekerja penuh 1993 jiwa dan pekerja sambilan 128 jiwa.¹ Jenis pekerjaan masyarakat sangat beragam. Dari jumlah usia produktif, 2500 jiwa bekerja sebagai nelayan, atau sekitar 64 %. Sementara sisanya berprofesi sebagai petani, buruh, guru, *mracang* (jualan), dan lainnya. Dari sisi latar belakang pendidikan, masyarakat Kranji tergolong sudah maju. Di desa ini terdapat 125 orang yang sudah berpendidikan sarjana, dan bahkan diantaranya ada yang berpendidikan S2 dan S3. Demikian pula tingkat melek huruf (buta huruf) berada di kisaran 0,5 persen, merupakan angka yang luar biasa dibandingkan dengan penduduk Indonesia secara umum. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya dua lembaga pendidikan besar yakni pesantren Tarbiyatuth Tholabah (Tabah) dan perguruan Muhammadiyah. Dua lembaga pendidikan ini memiliki peran penting terhadap kesinambungan gerak masyarakat Kranji. Kedua lembaga pendidikan tersebut sekaligus menjadi ukuran tingkat hubungan dan dinamisitas antar masyarakat dengan haluan ideologi yang berbeda. Satu sisi, memiliki dasar ideologi perjuangan berbeda, tetapi satu sisi terus memacu menjaga hubungan dalam rangka *fastabiqul khairat*. Di samping dua lembaga tersebut, pesatnya perkembangan pendidikan tidak dilepaskan dari sejarah munculnya SR (Sekolah Rakyat) pada masa Belanda. Kranji merupakan salah satu *venues* SR di kawasan Pantura, selain Paciran dan Brondong. Lembaga tersebut mempercepat perkembangan pendidikan di kawasan ini.

¹ *Sumber Pendataan Profil Desa 2005* (terbaru) dan hasil wawancara dengan Sekdes Kranji.

Penduduk Kranji yang 100 % muslim dikenal dengan masyarakat taat beragama. Apabila maghrib tiba, dan/atau ketika panggilan shalat berjamaah berkumandang, nuansa religius tersebut sangat tampak . Masyarakat berbondong-bondong mendekati Masjid atau Musholla dalam rangka memenuhi panggilan shalat berjamaah. Begitu pula ketika ada acara keagamaan, nuansa *guyub* dan kebersamaan sangat tampak sekali. Corong dan icon utama desa adalah pesantren Tabah yang sudah berdiri sejak satu abad lebih. Demikian pula Masjid/Musholla yang berafiliasi pada perserikatan Muhammadiyah.

Sejarah desa Kranji tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan awal yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Drajat. Menurut sumber cerita rakyat, nama Kranji diberikan oleh Sunan Kalijogo. Awalnya, Sunan melihat dua orang yang bermunajat kepada Allah tanpa mau diganggu oleh siapa pun, termasuk Sunan Kalijogo dan Sunan Drajat yang berusaha mendekatinya. Kemudian Sunan Kalijogo berujar kepada Sunan Drajat, “anak gembala di sini kok nakal banget dan keranjingan, ya?”. Sunan Drajat tidak berkomentar atas gumam Sunan Kalijogo. Kemudian dia meneruskan lagi, “kalau demikian besok pada masa ramainya zaman sebut saja desa ini dengan Desa Kranji”. Sunan Drajat mengangguk saja setuju dan menyampaikan kepada gembala agar menjadi saksi sejarah dan memberitahukan kepada orang tuanya sepulangnya dari tempat peristiwa tersebut.²

Peristiwa pertemuan dan dialog Sunan Kalijogo dan Sunan Drajat kemudian menjadi titik penentu penamaan Desa Kranji. Oleh masyarakat sekarang, nama desa sangat dekat dengan unsur-unsur mistik dan religius.

1. Laut sebagai sumber kehidupan utama.

Desa Kranji dan sekitarnya merupakan kawasan yang memiliki arti penting dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Sebelah timur desa, atau sekitar 1 km dari pasar Kranji terdapat makam Sunan Drajat, salah satu sunan penyiar agama Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo (wali sembilan). Tidak jauh dari makam Sunan Drajat terdapat makam Maulana Ishaq, salah satu waliyullah yang juga dikeramatkan oleh warga sekitar karena kegigihan dalam memperjuangkan Islam di tanah Jawa khususnya di kawasan pantai utara. Demikian pula, di sekitar makam banyak situs-situs kuno yang merupakan peninggalan Sunan drajat dan keluarganya, maupun situs-situs yang memuat tentang kehebatan tokoh-tokoh waktu itu dalam bentuk bangunan, artefaks, maupun karya-karya intelektual yang kondisinya masih utuh.

Yang hendak disampaikan disini bukan bagaimana kehebatan Sunan Drajat dalam mengislamkan warga sekitar atau situs-situs peninggalannya, melainkan pergulatannya dengan memanfaatkan laut sebagai sumber perjuangan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa para era tersebut laut memiliki peran yang sangat vital dalam segala mobilitas khususnya dalam percepatan penyebaran agama Islam. Laut bukan sekedar lahan sumber ekonomi dengan hasil tangkapan

² *Sejarah Desa Kranji dan Pemerintahannya* (Kranji:Pemerintah Desa,2006), 27.

ikan yang melimpah, tapi juga sebagai jalan utama transportasi yang menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain. Sebagian besar Wali Songo berada di daerah pesisir, demikian pula Sunan Drajat, karena pentingnya laut sebagai sumber utama ekonomi dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antar kawasan.

Tampaknya, apa yang pernah dilakukan oleh Sunan Drajat juga diteruskan oleh generasi berikutnya. Bahkan ada mitos, kemakmuran masyarakat sekitar pantai merupakan berkah dan doa dari Sunan Drajat yang *mbabat alas* mengembangkan masyarakat pesisir pantura khususnya kawasan Kranji. Salah satu hal yang berbeda yang dipertontonkan oleh masyarakat Pantura sekitar Kranji adalah lambang “kemakmuran nelayan”. Di berbagai tempat di Indonesia, nelayan (seolah) identik dengan kemiskinan, rumah jorok dan kumuh, kebodohan, kelatarbelakangan dan segala atribut sosial yang bernada negatif. Tetapi yang dipertontonkan masyarakat sekitar Kranji justru sebaliknya. Mulai paling timur desa Weru dan paling barat desa Brondong, yang memanjang kurang lebih 10 km, lambang kemakmuran masyarakat pesisir dengan rumah yang (cukup) mewah, kendaraan yang memadai, nuansa peradaban moderen yang cukup terasa dan hingga pendidikan yang sangat merata. Sekedar contoh, selain STAIDRA, di kecamatan kecil yang bernama “Paciran” terdapat 3 Perguruan Tinggi lain yang juga *survive* dan kompetibel, belum lagi lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah baik yang berada di dalam atau luar naungan pesantren. Nuansa Islami juga sangat kental di masyarakat pesisir ini. Bila di tempat lain dengan mudah mencari sekolah negeri/pemerintah, untuk di daerah ini justru sebaliknya. Lamongan khususnya Paciran merupakan daerah dengan jumlah madrasah terbesar di Jawa Timur, jumlah partisipasi pendidikan tertinggi dan sekaligus kualitasnya masih bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Percepatan perkembangan Islam di kawasan Pantura memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa di sekitar Pantura sejak abad 15 sudah berdiri pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan saudagar-saudagar muslim dari berbagai negara, utamanya India, Campa, Gujarat, dan Arab. Tuban, Gresik dan Surabaya pada masa itu sudah dikenal sebagai kota bandar, tempat hulu lalang kapal-kapal yang melakukan transaksi perdagangan. Sementara kawasan Pantura Lamongan merupakan wilayah lintasan, yang secara ekonomis akan merasakan dampak terhadap kehadiran saudagar-saudagar tersebut.³

Pemanfaatan laut sebagai sumber kehidupan sudah dilakukan sejak lama. Laut sebagai sumber utama masyarakat merupakan berkah yang tidak terkira. Meskipun belakangan usaha nelayan tidak sepenuhnya bergairah lagi gara-gara krisis moneter yang menghantam Indonesia pada akhir 90-an dan melambungnya harga BBM yang mulai tidak terjangkau, namun usaha ke arah tersebut terus dilakukan dengan segala keterbatasan dan terobosan baru agar bisa bertahan di saat kondisi ekonomi negara yang belum stabil. Dibangunnya SPBU untuk nelayan Kranji tak sepenuhnya mampu mengatasi krisis nelayan, apalagi harga solar di SPBU sama mahalannya dengan harga solar di SPBU lain. Terobosan yang dilakukan oleh nelayan untuk (sedikit) keluar dari krisis adalah dengan mengganti bahan bakar solar dengan minyak tanah.

³ Muhammad Habib Mustopo, *Kebudayaan Islam Jawa Timur* (Yogyakarta:Penerbit Jendela, 2001), 145.

Meskipun minyak tanah sangat berisiko pada mesin kapal yang dapat merontokkan mesin utama, bagi nelayan hal tersebut sebuah pilihan (pahit) yang harus diambil. Menurutnya, merawat mesin jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli solar yang harganya terus melangit, apalagi jika ada kerusakan-kerusakan kecil yang masih bisa diatasi sendiri.

Untuk kondisi saat ini, pilihan menjadi nelayan tidak mudah. Demikian yang dirasakan oleh nelayan dan pemilik kapal Kranji. Seandainya kapal (perahu) tersebut dijual ke pihak lain, harganya jauh saat pembelian atau sebelum harga solar naik. Sekedar contoh, sebagaimana dikatakan Pak Romli, salah satu *jragan* Kranji, bila harga 1 Kursin ukuran besar Rp. 200 juta pada tahun 2002, kalau dijual sekarang belum pasti laku Rp. 75 juta, itupun mencari pembelinya tidak mudah. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh pemilik galangan kapal KH. Muhammad Baqir (alm). Membandingkan sebelum dan sesudah krisis moneter dan apalagi setelah harga BBM naik, jumlah pesanan kapal jauh menurun, bahkan relatif tidak ada yang memesan kapal baru karena investasi di bidang ini dianggap merugikan.

2. Nelayan, guru, mracang dan usaha krupuk.

Secara umum masyarakat Kranji dibagi ke dalam empat profesi, yakni nelayan, guru, pedagang, buruh pabrik dan petani. Selain empat profesi tersebut, juga ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pekerja buruh kasar dan pekerjaan sampingan yang penghasilannya tidak tetap.

Nelayan. Posisi Desa Kranji yang berada di bibir pantai utara memungkinkan masyarakat untuk menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Letak desa yang berada di jalur utama jalan raya Surabaya-Tuban melalui pantai utara merupakan keuntungan utama, khususnya bagi nelayan dalam mengakses penjualan hasil tangkapan ikan. Demikian pula para pedagang, tengkulak yang berasal dari luar desa atau kota Lamongan dengan mudah menjangkau lokasi tempat pelelangan yang berada di tengah desa yang bersebelahan dengan pelabuhan nelayan.

Karena posisi desa yang berada di bibir pantai Pantura inilah, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dari laut. Penduduk Kranji yang berjumlah 6.239 jiwa, 64% dari usia produktif (15-55 tahun) bermata pencaharian sebagai nelayan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan urusan nelayan. Pekerjaan tersebut berupa para pedagang yang ada di pasar yang berada satu kompleks dengan pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penjual makanan, tukang becak, ojek, penjual peralatan nelayan di sekitar jalan Kranji hingga para buruh kasar. Sementara di kapal-kapal penangkap ikan yang bersandar di pelabuhan ini sekitar 70 jenis Kursin (*Porsesaine*), 90 jenis Puket Ireng, dan 41 Perahu Jeringan, atau sekitar 200 kapal dengan segala ukuran. Jenis Kursin dengan ukuran 15 X 5 M dengan memuat ABK

(Anak Buah Kapal) 20-35 orang, sementara daya tampung ikan bisa mencapai 15 ton. Ada pula jenis kapal Puket Ireng dengan ukuran 7 X 3 M dengan ABK 6 orang dan daya muat ikan 3 ton.

Sebagian besar kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan ini adalah kapal jenis Kursin yang sebagian besar pemilik kapal adalah penduduk asli Kranji sendiri, baik berdomisili di desa ini atau yang berada di sekitar desa. Setiap hari, khususnya hari-hari *along*, jumlah Kursin yang miyang mencapai 60, sementara perahu jenis Puket Ireng yang miyang bisa mencapai 70. Dalam ukuran rasio, jika setiap hari ada 60 kapal jenis Kursin yang melaut dengan jumlah ABK 30 orang, berarti ada 1800 orang pekerja yang tertampung dengan jumlah kapal tersebut. Jika terdapat 70 Puket Ireng yang melaut dengan ABK 6, maka ada 420 pekerja yang tertampung dalam perahu tersebut. Namun demikian, tidak semua buruh kapal berasal dari dalam desa Kranji, tapi juga ada dari desa sekitar, seperti Tunggul, Banjaranyar, desa tetangga dan lain-lain.

Tabel

Jenis Kapal/Perahu yang Bersandar di Pelabuhan Kranji

NO	Jenis Kapal/ Perahu	Jumlah Kapal/Perahu dan ABK	Jumlah Muatan	Ukuran Kapal/Perahu	Daerah Jelajah
1	Kursin (Porsesasaine)	70/ 20-35 ABK	15 ton	5 x 15 M	Laut Jawa, Makasar, sampai China Selatan
2	Puket Ireng	90/ 4 – 6 ABK	3 ton	3 x 7 M	Laut Jawa (Lamongan/Tuban), selat Madura
3	Perahu Jaringan	41/2 ABK	500 kg	1 x 5 M	Perairan Lamongan

Harga kapal jenis seperti ini pada umumnya hasil produksi galangan kapal milik KH. Muhammad Baqir (alm), pengasuh Pesantren Tarbiyatuth Tholabah, dimana tempat galangan kapalnya tidak jauh dari pelabuhan. Kyai Baqir disamping sebagai kyai, guru dan tokoh masyarakat, sejak tahun 1980-an juga memproduksi kapal-kapal penangkap ikan dengan segala jenis. Namun belakangan usahanya mulai menurun seiring dengan krisis moneter tahun 1997-an dan melambungnya harga minyak (BBM), karena bahan baku utama melaut adalah solar yang mulai kurang terjangkau pemilik kapal. Harga –harga kapal ini sangat beragam. Jenis Kursin dengan ukuran 15 X 5 M bisa mencapai 200 juta komplit, sementara jenis kapal kecil berkisar antara 50-100 juta komplit dengan segala perlengkapan, seperti 3 mesin diesel, 30 lampu petromaks, timah, jangkar dan peralatan pendukung kapal lainnya.

Dampak dari krisis moneter dan melambungnya harga BBM sangat dirasakan oleh para nelayan. Meskipun sudah ada subsidi khusus bagi nelayan, namun masih belum mampu

dijangkau karena harga solar dan biaya operasional yang terlalu tinggi. Demikian pula kondisi laut yang tidak lagi ramah karena banyaknya pencemaran dan perusakan terumbu karang tempat bersarang dan bermain ikan-ikan kecil. Sejak munculnya alat-alat mederen untuk menangkap ikan, seperti bom dan potas, praktis dalam sepuluh tahun terakhir hasil tangkapan nelayan Kranji turun drastis. Belum lagi sulitnya mencari ikan di sekitar pantai, atau dalam radius dekat dengan darat mulai terasa sulit. Hal tersebut karena ikan mulai enggan menepi karena pantai direklamasi untuk keperluan pelabuhan yang berada di sisi kanan TPI (timur) dan di sisi Barat. Di sisi kanan yang berjarak 1,5 KM pelabuhan Kranji akan/sedang dibangun pelabuhan untuk mengakses transportasi melalui jalan laut, karena *shorbase (Lamongan Integrated Shorbase)* tersebut akan dijadikan kompleks industri. Sementara pada sisi barat, sedang dibangun pelabuhan untuk muatan kapal barang dan penumpang sebagai penunjang sarana transportasi untuk wilayah Paciran dan sekitarnya, sebagai Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dampak dari pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat terasa sekali pada rusaknya ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang banyak bertebaran di perairan laut Jawa. Reklamasi pantai yang mencapai 20 ha untuk pembangunan secara ekologis memiliki dampak pada kondisi lingkungan sekitar pantai. Keluhan seperti ini sangat dirasakan oleh pemilik perahu kecil/jaringan yang terbiasa manjaring ikan atau memancing dengan peralatan seadanya yang biasa beroperasi di sekitar bibir pantai.

Dalam setahun, kapal penangkap ikan tidak *full* beroperasi. Di masyarakat nelayan Kranji dikenal dengan tiga musim, yakni Musim Timur, Musim Kapatan dan Baratan. Musim baratan adalah musim peceklik karena kapal-kapal besar sejenis Kursin tidak berani melaut, kecuali kapal-kapal kecil karena memang biaya operasionalnya juga kecil. Musim baratan terjadi ketika bulan mulai sempurna, atau sekitar tanggal 10-20 dalam hitungan bulan Jawa, atau ketika angin kencang yang datang dari arah barat. Musim baratan juga terjadi pada saat musim hujan mencapai puncaknya. Pada musim ini, biasanya nelayan enggan melaut karena takut terpaan angin dan badai yang sewaktu-waktu datang secara tiba-tiba. Musim Kapatan terjadi antara bulan Desember s/d Pebruari. Sementara *musim ikan* (Kapatan) terjadi antara bulan Oktober hingga Desember. Pada musim ini, hasil tangkapan nelayan melimpah, namun sayangnya harga jualnya juga menurun. Seolah sudah menjadi hukum alam, tiap kali hasil tangkapan melimpah, harga ikan pun juga jatuh. Sementara Musim Timur adalah musim yang tidak menentu, terkadang memperoleh ikan dan kalanya tidak memperoleh sama sekali.

Lama melaut (*miyang*) tergantung pada musim dan kondisi alam. Untuk kapal sejenis Kursin, lama melaut kadang mencapai satu minggu, hingga benar-benar mendapatkan ikan yang diinginkan. Hal ini menjadi persoalan ketika sudah terlalu lama berada di tengah laut sementara belum mendapatkan ikan memadai, *kadung* mengeluarkan banyak biaya solar dan operasional. Sementara untuk jenis kapal (perahu) ukuran kecil, lama melaut kadang 1 hari, dan/atau maksimal 2 hari. Ukuran lama waktu berlayar, tergantung pada musim dan kondisi alam. Untuk kapal-kapal besar jika musim *along*, dua hari saja sudah mendapatkan ikan yang cukup melimpah, sehingga para nelayan dengan cepat juga merasakan hasilnya. Jauh-dekatnya kapal mencari ikan juga tergantung pada musim dan kondisi alam. Apabila musim baratan tiba, tidak

jarang kapal-kapal tersebut mencari ikan hingga ke selat Madura, Pasuruan, Probolinggo dan Banyuwangi. Sementara bila musim ikan, cukup di sekitar laut Jawa, atau paling jauh ke perairan selatan Pulau Bawean/Pulau Masalembu. Tetapi apabila angin timur kencang, pelayaran bisa ke kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan Lampung. Kawasan Jateng, misalnya masuk perairan Batang dan Pekalongan, sementara kawasan Jawa Barat sampai ke Kalibaru dan Serang.

Dalam tradisi masyarakat nelayan Kranji, mengenal struktur yang secara hierarkhis dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat aktifitas penangkapan ikan. Struktur dalam penangkapan ikan sebagai berikut :

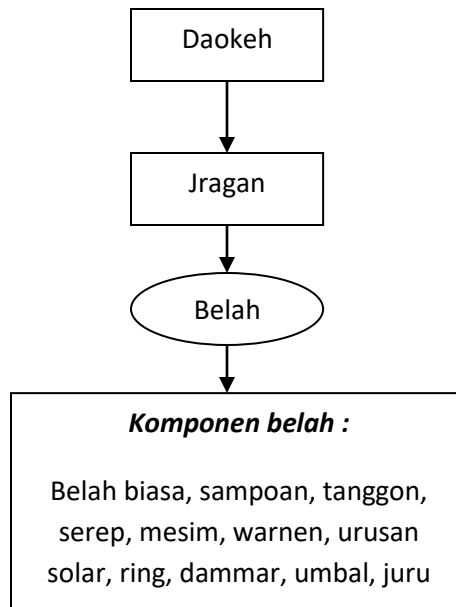
1. **Daokeh**, adalah sebutan untuk pemilik perahu. Dia sama sekali tidak tahu-menahu tentang urusan operasional perahu. Daokeh hanya menerima saat along (saat musim ikan), sementara pada waktu baratan tidak menerima uang.
2. **Jragan**, adalah sebutan untuk orang yang bertanggung jawab terhadap operasional perahu, atau dikenal dengan sebutan Kepala ABK. Keputusan untuk *miyang* (melaut) dan tidak, sepenuhnya berada di tangan Jragan. Ada juga jragan yang juga sekaligus sebagai pemilik kapal. Orang seperti ini tidak disebut daokeh, melainkan tetap jragan saja. Di saat along, sang jragan akan mendapatkan bagian paling banyak. Selain bagian umum (1 bagian), dia akan mendapatkan bagian tambahan yakni 6 bagian. Jadinya jumlah bagiannya 7.
3. **Belah**, adalah sebutan untuk orang-orang yang ikut terlibat dalam pengoperasian kapal secara keseluruhan. Ada juga istilah *Belah Simbatan* : ialah orang yang ikut *miyang* pada perahu lain selain perahu yang biasa ia ikuti. Biasanya “nyimbat” itu dilakukan oleh seseorang di saat *Jragan*-nya memutuskan untuk tidak *miyang*. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya, dia kemudian “nyimbat,” pergi *miyang* tapi ikut perahu lain, jragan lain.

Belah dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing mempunyai tugas-tugas tertentu dan akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan tugas-tugas itu. Selengkapannya berikut ini :

- a. **Belah (Belah Tompo)**. Adalah orang yang hanya ikut *miyang* tanpa mempunyai peran tambahan apapun. Dia hanya ikut dan melaksanakan tugas-tugas umum seperti menarik jaring, ikut membongkar ikan dll.
- b. **Campohan/Nyampoi**, adalah orang yang bertugas untuk membersihkan, merawat, dan mempersiapkan perahu agar siap berlayar (*ngombang*). Biasanya tugas ini dikerjakan oleh 4 orang.
- c. **Tukang Tanggon**, orang yang bertugas menjadi penunjuk arah kemanapun perahu akan pergi berlayar. Tukang tanggon juga bertugas mengawasi ikan yang sedang muncul baik di waktu malam maupun siang. Kemanapun perahu diarahkan, semua tergantung pada *tanggon*. Bahkan termasuk keputusan untuk melepas jaring pun *tanggon* yang berkuasa. Biasanya *tanggon* adalah sekaligus *jragan*, tapi ada juga *tanggon* yang bukan *jragan*. Semakin canggih seorang *tanggon*, maka semakin beruntung perahu tersebut.
- d. **Serep (juru mudi)**. *Serep* adalah orang yang memegang kemudi perahu. Kalau pada mobil, serep adalah sopir. Dalam bekerja, *serep* akan selalu memperhatikan gerak-gerik *tanggon* yang berada di atas. Kemudian dia akan mengarahkan kemudi ke arah yang sesuai dengan isyarat *tanggon*.

- e. *Mesim*, adalah orang yang bertanggung jawab pada urusan mesin kapal. Mulai dari perawatan, sampai pada pengoperasiannya. Dia juga bekerja sesuai dengan aba-aba *tanggon* sebagai patner *serep*. Biasanya, tugas ini dilakukan oleh dua orang.
- f. *Warnen*. *Warnen* adalah petugas yang menghubungi seluruh anggota (belah) di saat ada keputusan *miyang* dari *jragan*. *Warnen* juga bertugas membagikan uang bagian kepada belah. Mirip seperti kurir, atau humas. Istilah lain disebut *tukang wong*.
- g. *Ring*, orang yang bertugas untuk melempar timah puket sekaligus juga menariknya kembali. Bila *belah* biasa hanya menarik jaring, maka *tukang Ring* disamping melempar timah yang berat, juga sekaligus menarik timah tersebut.
- h. *Urusan Solar*, adalah orang yang bertugas untuk mengangkut solar ke kapal. sekaligus memasukkan solar tersebut ke dalam mesin kapal. Tugas ini, biasanya dilakukan oleh 2 orang.
- i. *Damar*, adalah orang yang bertugas sepenuhnya terhadap urusan lampu perahu. Biasanya tugas ini dilakukan oleh 2 orang. Meskipun tidak *miyang*, bagian *ndamar* tetap akan mendapatkan bagian tambahan
- j. *Umbal*, adalah orang yang bertugas untuk melemparkan *umbal* di saat ada ikan atas aba-aba dari *tanggon*. *Umbal* adalah ujung jaring dengan pelampung besar yang berbentuk seperti bola, berukuran sebesar bola volley yang fungsinya sebagai pemberat, agar jaring /puket segera cepat turun ke dasar laut. Letak *umbal* di ujung jaring. Saat akan menangkap ikan, *umbal* dilemparkan paling awal.
- k. *Juru arus*, adalah perenang yang membawa lampu menjauh dari perahu pada saat tawuran serta bertugas sebagai penghalau ikan agar tidak keluar dari lingkaran jaring. Dia akan melompat ke laut di saat proses penangkapan ikan, persis setelah *umbal* dilemparkan.
- l. *Penimbang iwak*, adalah orang yang bertugas untuk menimbang hasil tangkapan dan menjualnya ke agen/tengkulak ikan. Dia juga sekaligus mengurus masalah keuangan pada perahu.

Hubungan Hierarki Nelayan Kranji



Dalam hierarki nelayan Kranji (pola hierarki seperti juga diberlakukan di kawasan lain sekitar Kranji), Daokeh menunjuk dan memerintahkan kepada Jragan untuk mengoperasikan perahu. Selanjutnya Jragan akan menentukan anggota Belah, yang jumlahnya bisa mencapai 30 orang. Ikatan antara Jragan dan Belah melalui ikatan hutang-piutang. Belah akan kredit dulu, dan akan dilunasi pada saat menerima bayaran. Belah menjadi tanggung jawab Jragan.

Sebagaimana desa nelayan yang lain, masyarakat Kranji sangat dekat dunia samudera yang keras dan ganas. Kondisi ekologis menciptakan masyarakat hidup berbeda dibandingkan dengan komunitas petani yang cenderung memimpikan harmoni. Orientasi kehidupan nelayan yang keras diungkapkan oleh Boelaars, bahwa dunia nelayan sangat dekat dengan etos kerja tinggi, keras dan gampang tersinggung.⁴ Namun demikian, masyarakat pesisir, utamanya di pantai utara Jawa dikenal sebagai masyarakat yang "kosmopolit" dan melek terhadap dunia. Dalam penelitian Nur Syam di pesisir Palang, indikasi ke arah kosmopolitan sangat kuat sekali dibandingkan dengan budaya agraris.⁵

Kondisi "kosmpolit" dan melek dunia juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat nelayan pantai utara Lamongan, utamanya Kranji. Untuk menggambarkan ke"melek"an masyarakat setempat yang peling sederhana dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan tinggi yang berada di Kecamatan Paciran. Setidaknya terdapat 4 perguruan tinggi yang berada di kawasan tersebut, suatu hal yang jarang terjadi di tempat lain untuk ukuran kecataman pesisir. Demikian pula sarana dan prasarana penunjang yang menunjukkan kemospolitan masyarakat pesisir Pantura.

Guru. Selain nelayan, sebagian masyarakat Kranji juga berprofesi sebagai guru. Sebutan guru sangat umum sekali, masuk dalam katagori guru adalah juga kyai, dosen,

⁴ Sebagaimana dikutip Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan* (Yogyakarta:LKiS, 2007), 103.

⁵ Lihat Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta:LKiS, 2005), 95.

ustad/ustadzah, baik yang mengajar di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan pesantren, *ngaji* kitab dan diniyah. Di Kranji terdapat dua lembaga pendidikan besar, yakni pesantren Tarbiyatuth Tholabah (Tabah) dan Perguruan Muhammadiyah, disamping Sekolah Dasar Negeri (SDN). Di pesantren Tabah berdiri lembaga pendidikan mulai RA, MI, Mts, MA/MAK dan STAIDRA, disamping pengajian kitab, pendidikan diniyah, dan kursus-kursus. Sementara Perguruan Muhammadiyah yang letaknya bersebelahan dengan pesantren Tabah terdapat lembaga pendidikan BA, MI, MTs dan SMK. Jumlah guru di Tabah sebanyak 183 guru dengan perincian guru RA = 11 orang, MI = 25, Mts = 42, MA/MAK = 53, STAIDRA = 20 dosen, dan diniyah 32 ustadz/ustadzah. Jumlah murid/mahasiswa di Tabah 2836 siswa/santri/mahasiswa, dengan perincian; TK = 180 anak, MI = 400 siswa, Mts = 691, MA = 650, Diniyah = 735, dan STAIDRA 180 mahasiswa.⁶

Sementara di Muhammadiyah sebanyak 271 siswa dan 64 guru, yang meliputi lembaga pendidikan MI, Mts, dan SMK. Sebagian besar guru-guru tersebut tinggal atau berasal dari desa Kranji. Atau para alumni yang berkeluarga di Kranji dan sekitarnya, dan kemudian memilih menjadi tenaga pengajar di tempat ini. Hal sama juga terjadi di perguruan Muhammadiyah. Sementara itu di desa ini juga berdiri SDN dan TK yang dikelola oleh SDN yang tersebar di 3 dusun; Kranji, Sidodadi dan Tepanas. Jumlah murid mencapai 280 siswa dan jumlah guru 36 orang. Namun tingkat perkembangan SDN dan TK tersebut tidak sepopuler pesantren Tabah, karena kecenderungan masyarakat Kranji yang agamis lebih memilih lembaga pendidikan yang bernuansa agama daripada pendidikan umum. Jumlah keseluruhan guru yang mengajar di desa Kranji sebanyak 283 orang, yang merupakan angka spektakuler untuk ukuran desa.

Disamping bermanfaat dalam pengembangan karier keguruan, jumlah lembaga pendidikan dan murid yang besar secara ekonomis juga menguntungkan masyarakat sekitar. Seperti di pesantren Tabah, dengan berprofesi sebagai guru sudah mencukupi untuk menghidupi keluarga untuk ukuran Kranji. Karena hanya sedikit para guru yang memiliki profesi, dan/atau pekerjaan lain selain mengajar, kalau pun ada pekerjaan tersebut masih berhubungan dengan pekerjaan mengajar di tempat lain. Karena vitalnya posisi pesantren Tabah sebagai pusat pendidikan dan sumber ekonomi, maka ketersohoran pesantren ini bagi masyarakat sekitar pesantren sudah dikenal sejak lama, sebelum pemangku yang sekarang.

Pedagang mracang. Secara ekonomis masyarakat Kranji diuntungkan oleh keberadaan dua lembaga pendidikan besar, khususnya pesantren Tabah. Pesantren ini dihuni tidak kurang dari 2836 siswa, dan 700 santri yang menetap tinggal di dalam pesantren. Sementara jumlah tenaga guru sebanyak 183 orang. Belum lagi berbicara lembaga pendidikan Muhammadiyah yang jumlah siswanya juga banyak. Dari jumlah siswa/santri dan guru yang berkeliaran di sekitar Kranji secara ekonomis menguntungkan kepada penduduk sekitar untuk membuka layanan jasa warung nasi, njajan, usaha mracang, foto copi, wartel hingga kebutuhan anak sekolah lainnya. Jika setiap anak membelanjakan Rp. 5.000/hari, maka terdapat Rp. 20 juta uang yang beredar di sekitar pesantren tiap hari. Belum lagi Kranji yang berada di jalan raya utama Surabaya-Jakarta melalui Pantura, serta pasar dan TPI yang tidak pernah sepi dari kerumunan manusia, dari pagi hari hingga menjelang pagi, karena arus keluar-masuk barang atau ikan tidak

⁶ Data Yayasan Tabah tahun 2006.

mengenal waktu. Jika di sekitar pasar, pelabuhan, TPI terdapat 3000 pengunjung tiap hari (menurut penuturan staf pasar pengunjung pasar berkisar antara jumlah tersebut tiap hari), dan membelanjakan uangnya minimal Rp. 25.000/hari hanya untuk keperluan makan, minum dan beli rokok, maka uang yang berputar di sekitar pelabuhan berkisar Rp. 75 juta.

Usaha mracang dengan omzet kecil banyak bertebaran di sepanjang jalan raya, atau jalan masuk menuju gang-gang kecil desa. Sementara pedagang yang beromzet besar berada di sekitar jalan raya atau berdekatan dengan pasar Kranji. Di desa ini terdapat usaha mracang kecil dan toko besar, belum lagi penduduk Kranji yang mracang di pertokoan Makam Sunan Drajat, Goa Maharani maupun WBL. Sumber ekonomi ini cukup bergairah meskipun jarak antar warung berdekatan karena banyaknya manusia yang hulu-lalang di sepanjang jalan desa, khususnya siswa/santri yang menuntut ilmu di pesantren.

Usaha krupuk. Selain profesi nelayan, guru dan mracang, di kawasan ini juga terdapat *home industry* krupuk Kranji. Terdapat 20 keluarga yang menekuni usaha ini. Sebenarnya usaha krupuk sudah lama, rintisan awalnya sekitar tahun 1950 ketika Indonesia baru saja merdeka. mBah Karmi salah satu pengusaha tersebut hingga kini masih eksis di usia yang ke 80. Bagitu pula yang dilakukan oleh ibu-ibu yang juga berprofesi sama.

Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara usaha krupuk ini dengan nelayan. Bahan baku utama krupuk selain tepung dan gula, juga ikan yang berasal dari tangkapan nelayan Kranji. Begitu pula, para suami mereka sebagian bekerja sebagai nelayan, baik jragan maupun belah. Karena itu keberlangsungan usaha ini tidak bisa dilepaskan dengan hasil tangkapan ikan yaang dilakukan oleh nelayan Kranji.

Pengusaha krupuk Kranji umumnya dikelola oleh ibu-ibu sebagai usaha sampingan. Lama-kelamaan ketika usaha mereka mulai mendapat tempat di hati masyarakat menjadi pilihan profesi, sehingga suami, putera-puterinya juga ikut mendukung dalam pengembangan usaha mereka. Apalagi sebagian mereka adalah para janda, nenek-nenek yang sudah ditinggal suami, sehingga menggantungkan ekonomi keluarganya dari usaha memproduksi krupuk.

Belakangan, usaha krupuk Kranji mengalami penyurutan karena banyaknya saingan baru yang masuk ke daerah ini. Krupuk yang menjadi pesaing adalah krupuk buatan pabrik yang dikemas dengan lebih menarik, ada merek dan rasanya juga lebih gurih. Apalagi harga krupuk pendatang baru ini lebih murah dibandingkan dengan krupuk buatan Kranji. Hal inilah yang juga mendorong tim BP2M untuk mendampingi mereka dalam mengembangkan, mengorganisir dan mengelola usaha mereka sehingga bisa bertahan di tengah masuknya pesaing baru. Pada sisi lain, krupuk Kranji memiliki sejarah yang panjang, yang seandainya didampingi secara berkelanjutan berpeluang untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Proses dampingan awal ini dengan melibatkan pesantren, karena posisinya sangat strategis untuk membangun *trust* di masyarakat.

2. Islam Kranji; Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.

Potret kehidupan keagamaan masyarakat pesisir Kranji adalah potret persemiaan ideologis dua Ormas besar, NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah. Ibarat

kendaraan bermotor, dua organ ini yang memberikan peran besar terhadap segala perilaku keagamaan dan sosial terhadap komunitas pesisir.

Islam Kranji tidak bisa dilepaskan dari konteks Islam di Jawa Timur secara keseluruhan, yakni Islam yang berafiliasi pada pesantren dan NU. Tidak ada survey yang pasti berapa jumlah jamaah NU di Jawa Timur, sebab meskipun secara formal bukan anggota NU yang ditandai dengan kepemilikan kartu NU, masyarakat yang mengikuti aturan syariah selain Muhammadiyah disebut juga jamaah NU. Atau ada klaim, masyarakat yang ikut tahlilan, qunut dan yasin, pastilah jamaah NU. Organisasi NU tersebar di semua pelosok Jatim, khususnya pedesaan. Sementara pesantren selalu identik dengan NU, karena 96 % pesantren di Jatim berafiliasi secara struktural maupun kultural dengan NU.⁷ Maka, ketika menyebut pesantren sudah tergambar jamaah NU dengan segala atribut keagamaannya; sarung, peci, surban dan kitab kuning.

Pesantren Tabah yang berada di Kranji ini meskipun secara struktural tidak berada di bawah NU, karena memang demikian model lembaga pendidikan di NU, akan tetapi secara kultural dan emosional memiliki ikatan yang sangat kuat dengan jam'iyah tersebut. Hampir semua tokoh-tokoh kunci di pesantren ini pernah menjadi pengurus NU, baik tingkat ranting, MWC hingga cabang, baik duduk sebagai dewan tanfidz maupun syariah. Begitu pula, Aswaja, salah satu doktrin keagamaan di NU diajarkan mulai tingkat Ibtida'iyah hingga Aliyah. Karenanya, pesantren Tabah bisa diidentikkan dengan pesantren NU.

Sementara, Muhammadiyah yang juga eksis di desa ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Kecamatan Paciran atau Kabupaten Lamongan yang memiliki jumlah anggota Muhammadiyah terbesar di Jatim. Kecamatan Paciran merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya Muhammadiyah, sementara Kranji yang merupakan bagian Kecamatan Paciran juga memiliki anggota Muhammadiyah cukup besar. Tak heran jika tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memiliki nama besar untuk skala nasional dan regional banyak lahir di daerah ini. Karena memang secara kultural masyarakat Paciran jumlah warga Muhammadiyahnya terbesar di Jatim.

Ketika jumlah jamaah NU-Muhammadiyah yang hampir sama besarnya berada dalam satu desa, bayangan kita tertuju pada munculnya perbedaan yang mengarah pada persepsi pertentangan/percekcokan. Apalagi kedua organisasi ini memiliki sejarah yang kurang mengesankan. Bahkan ketika Gus Dur jatuh dari kursi presiden tahun 2001 yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ulah Amien Rais, tokoh Muhammadiyah, yang waktu menjadi ketua MPR, di tingkat akar rumput terjadi *clash* luar biasa di Jatim, yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas utama Muhammadiyah. Kondisi seperti ini (meskipun tidak terlalu parah) terus berlanjut ketika Pemilu berikutnya meskipun dalam skala kecil. Anggapan adanya *clash* antar kedua jamaah tersebut akan hilang ketika datang ke Kranji. Nuansa persaudaraan hubungan antar jamaah Ormas terbesar ini sangat nampak sekali. Masjid Jamik Baiturrahman Kranji yang berkapasitas 5000 jamaah salah satu bukti "kontes" persaudaraan yang kokoh antar dua jamaah tersebut. Masjid ini dibangun oleh semangat gotong royong antara organisasi yang berbeda. Karena dibangun bersama, maka semua aktifitas dan simbol-simbol organisasi sangat melekat di Masjid tersebut. Di Masjid megah tersebut terdapat beduk, lambang yang identik dengan Masjid NU. Sementara mimbar khotib dibuat layaknya mimbar Masjid-Masjid Muhammadiyah. Demikian pula ornamen-ornamen Masjid terisi oleh simbol kedua organisasi tersebut.

⁷ Lihat hasil survey *Profil Pesantren Jawa Timur* (Malang:LPAM, 1997).

Sementara, model syariahnya tergantung pada siapa yang menjadi imam pada saat tersebut, baik shalat lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, idul fitri dan aktifitas keagamaan lainnya. Apabila yang menjadi imam tarawih dari NU yang biasa dengan 23 rakaat, jamaah Muhammadiyah berhenti pada rakaat ke delapan, demikian pula sebaliknya, tanpa saling menyalahkan, membenarkan, dan/atau merasa paling benar dinatara mereka. Pengurus Masjid Jamik terdiri dari dua organisasi tersebut, juga tanpa saling menyalahkan, membenarkan dan merasa paling benar diantara yang lain.

Hubungan kemesraan NU dan Muhammadiyah terjadi dimana saja dan kapan saja. Baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama kuat meyakini ajaran agamanya, tanpa merasa terbawa oleh ajaran lain. Kedua jamaah ini sama-sama fanatik, tapi tahu menempatkan kapan kefanatikan itu harus diterapkan. Hal-hal yang sulit bertemu (kompromi) ketika menyangkut jodoh. Baik jamaah NU maupun Muhammadiyah sangat kuat memegang teguh prinsip keyakinannya, dan sulit ditemui orang NU yang menikah dengan Muhammadiyah, demikian pula sebaliknya. Sementara, kedekatan warga Kranji satu sama lain di berbagai tempat, di Masjid, pasar, pelabuhan, atau saat menangkap ikan, saat berkumpul untuk membahas pengembangan usaha krupuk, sama sekali tidak tercermin perbedaan ideologi diantara mereka. Yang mereka rasakan adalah kebersamaan, persaudaraan, ikatan darah karena berasal dari keturunan yang sama.

Sejarah kemesraan NU-Muhammadiyah dimulai tahun 1960 ketika di desa ini terdiri dua kelompok keagamaan sama-sama besar, sama-fanatik dan sama-sama memiliki pengaruh. Pada saat itu muncul ketegangan antara kedua Ormas tersebut menyangkut khilafiyah, seperti tahlil, qunut, tarawih, dll. Ketegangan itu mengarah pada persePTLPihan dan petengkaran hebat. Maka atas dasar itu, para tokoh, diantaranya NU (Kyai Adlan, pimpinan pesantren Tabah waktu itu) dan Modin Abbas, Pak Halimi (Muhammadiyah) berkumpul dan membicarakan masa depan hubungan masyarakat desa yang beda ideologi keagamaan. Atas pertimbangan *ukhuwwah*, maka disepakati untuk tidak membangun Masjid baru, sementara Masjid yang ada dipergunakan untuk kedua Ormas tersebut. Sementara proses pelaksanaan ibadah, shalat rawatib dan pengelolaan Masjid disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara jamaah NU-Muhammadiyah. Pertimbangan lain adalah, bahwa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah berasal dari satu nasab (satu keturunan) dengan NU, apalagi diantara tokoh-tokoh Muhammadiyah juga alumni pesantren Tabah, santri Kyai Mustafa pendiri pesantren dan tokoh agama yang sangat dikagumi oleh semua komponen masyarakat sekitarnya. Kesepakatan tersebut terus dipegang teguh oleh tokoh kedua Ormas tersebut, khususnya KH. Muhammad Baqir (NU) dan H. Anshori dan H. Yasa' (Muhammadiyah), sehingga kecondusifan hubungan antara jamaah terus terjaga.

Pada awalnya, penggunaan Masjid sebagai tempat ibadah kedua jamaah NU-Muhammadiyah mengalami ketegangan, akan tetapi suasana *ukhuwwah* tersebut selalu mengedepan. Apalagi suasana keakraban bukan sekedar di dalam Masjid, di luar Masjid pun juga terus terjaga. Suasana tersebut lebih mencair ketika hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha mula tiba, sebab pelaksanaan shalat Ied dilaksanakan di pesantren Tabah. Sejarah pelaksanaan sahalat Ied di dalam pesantren karena waktu itu ada keinginan dari jamaah Muhammadiyah untuk menjalankan sahalat Ied di lapangan, sementara NU melaksanakan shalat di Masjid. Pimpinan kedua Ormas kemudian mencari jalan tengah dengan menunjuk pesantren Tabah sebagai tempat shalat Ied dengan catatan agar ditempatkan di lapangan pondok. Penunjukan pesantren Tabah bukan tanpa sebab. Seandainya tetap

dilaksanakan di Masjid maka tidak mungkin termuat semuanya, sementara bila di lapangan, juga tidak mungkin karena Kranji tidak memiliki lahan yang luas yang bisa menampung 10.000 jamaah. Dipilihnya pesantren Tabah diantaranya karena memiliki areal parkir dan halaman yang bisa memenuhi jumlah tersebut. Hingga sekarang proses seperti ini terus berjalan, dan satu sama lain saling menghormati dengan tidak saling menyalahkan. Demikian pula pelaksanaan penyembelihan hewan qurban yang dipusatkan di pesantren Tabah.

Islam Kranji dikenal dengan Islam santri. Yang dimaksud santri dalam masyarakat Jawa adalah masyarakat yang secara konsisten dan teratur melaksanakan pokok-pokok peribadatan yang telah di atur dalam agama Islam, misalnya melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan romadlan atau puasa lain yang dianjurkan dalam Islam, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji serta melaksanakan perintah-perintah lain dalam Islam. Berbeda dengan kaum abangan yang menekankan pada elemen Jawa, atau priyayi yang menekankan pada aspek Hindu-Budha. Sementara menurut Koentjaraningrat yang disebut santri adalah golongan masyarakat Jawa Islam yang patuh, taat menjalankan ajaran agama Islam dan sebaliknya meninggalkan perbuatan tidak ada dasarnya atau yang dilarang dalam agama Islam. Selain taat beragama, yang ditandai dengan kepatuhan menjalankan rukun Islam, juga digolongkan dengan masyarakat "kosmopolit", terbuka dan berwatak keras. Dalam penelitian Nur Syam terhadap masyarakat pesisir Palang Tuban, bahwa karakter kosmopolit lebih tampak dibandingkan dengan masyarakat petani yang dianggap cenderung statis.⁸ Dalam keseharian, masyarakat pesisir dihadapkan dengan tantangan ombak dan badai ketika sedang melaut, karenanya perlu sikap terbuka dalam menyelesaikan setiap persoalan.

B. Industrialisasi dan Modernisasi Desa.

1. Juragan kota masuk desa

Kondisi Lamongan khususnya di Pantura yang identik dengan santri dan wali ini memiliki sejarah yang panjang. Meskipun sama-sama santri, kawasan pantai utara Lamongan secara sosiologis dan antropologis berbeda dengan Madura atau kawasan tapal kuda lainnya yang membentang dari Banyuwangi hingga Surabaya. Perbedaan tersebut bukan karena bahasa, melainkan cara menyikapi persoalan baru yang memiliki efek sosial-ekonomis terhadap masyarakat sekitar. Kasus industrialisasi yang menjadi wacana cukup lama di kalangan santri dapat dijadikan sebagai sumber referensi ukuran. Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), pada awalnya memperoleh penolakan luar biasa dari kalangan ulama dan santri Madura. Pembangunan jembatan yang merupakan titik tolak industrialisasi Madura sudah bergulir awal tahun 90-an, ketika Moh. Noer sesepuh Madura merencanakan keinginan tersebut. Respon negatif, dan bahkan perlawanan warga Madura luar biasa. Membutuhkan waktu 10 tahun untuk meyakinkan masyarakat tersebut agar pembangunan jembatan terus dilaksanakan. Hal tersebut berbeda dengan santri/ulama' kawasan Pantura, khususnya Paciran. Bupati Lamongan cukup

⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 95.

datang ke pesantren dan berdialog dengan kyai/santri/tokoh masyarakat tentang manfaat ekonomis industrialisasi, dan tentu saja dampak negatif yang (pasti) akan ditimbulkan, pesantren dan masyarakat bisa menerima kehadiran industri tersebut. Tapi bukan berarti masyarakat setuju semua, proses penerimaan masyarakat lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan Madura yang sama-sama memiliki kultur santri yang ketat.

Berawal dari cek (tidak tertulis) tokoh-tokoh dan ulama setempat, mulai digulirlah industrialisasi di kawasan Pantura. Masfuk selain sebagai Bupati juga sebagai pengusaha yang sukses. Jiwa *entrepreneur* diterapkan dalam membangun kawasan Pantura . Masfuk yang asli Lamongan, kemudian datang dengan membawa sebungkus proposal soal perubahan masa depan daerahnya. Bupati tidak sendirian, di belakangnya berjejer orang-orang berduit untuk investasi di daerah ini. Awal 2000-an dimulailah pekerjaan itu. Yang dilakukan pertama kali adalah memperlebar, memperhalus dan membersihkan jalan-jalan menuju ke pantai utara, tentu saja dengan biaya APBD yang mepet itu, dengan harapan dapat meyakinkan para investor bahwa masyarakat sudah siap menyambut kedatangan mereka. Mereka pun datang dan disambut dengan ramah (atau sengaja ramah) oleh masyarakat dan tokoh sekitar. Mereka dibawa ke kyai-kyai berpengaruh, sekedar untuk meyakinkan mereka agar suatu saat tidak terjadi gejolak sebagaimana kasus Madura. Rencana akan gagal jika tidak ada komunikasi yang intensif dengan tokoh-tokoh sentral terlebih dahulu.

Setelah usaha pertama selesai, maka dimulailah pembangun tersebut. Menyadari potensi wisata yang bernilai jual tinggi, maka investor diajak untuk memodernisasi kawasan tersebut. WBL, Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani disulap menjadi kawasan wisata moderen yang menarik dan bernilai jual. Sebelumnya, Pantai Tanjung Kodok yang dijadikan *venue* WBL adalah kawasan wisata pantai kumuh, jorok dan tempat transaksi seks murahan kelas *ndeso*. Dengan 2000 rupiah, semua orang bisa menghabiskan waktu sore melihat pemandangan pantai sambil makan tahu campur atau soto Lamongan yang sedap dan khas. Kini, setelah direnovasi dengan uang miliaran rupiah, pantai Tanjung Kodok menjadi kawasan wisata elit, dan harga tiket masuk pun naik tujuh belas kali lipat, atau sekitar 35-ribuan. Begitu pula wisata Goa Maharani yang berada di depan WBL. Sementara makam Sunan Drajat yang letaknya 3 km dari WBL juga disulap menjadi kawasan wisata religi yang dipadukan dengan aspek bisnis. Selain direnovasi, juga dibangun pertokoan aksesoris dan makanan sepanjang jalan masuk kompleks tersebut, yang diharapkan semakin meningkatnya peziarah untuk datang ke tempat tersebut.

Sementara untuk menunjang aktifitas industri kelak, para investor diajak membangun sarana vital sebagai pendukung utama industri, yakni pelabuhan ASDP dan pelabuhan industri, hotel dan sarana penunjang lainnya. Suplai bahan mentah dan aktifitas ekspor-impor diharapkan masuk melalui *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS), yang merupakan kompleks pelabuhan sekaligus industri yang luas (sementara) 80 ha. Sementara untuk sarana transportasi antar pulau untuk mengangkut manusia dan barang, dibangunlah pelabuhan ASDP. Sementara Tanjung Kodok Resort yang bersebelahan dengan WBL adalah tempat penginapan sekelas Hotel

Bintang Lima dengan harga termurah Rp. 675.000/nett, yang hanya dijangkau oleh investor dan kalangan berduit lainnya.

Bersamaan dengan itu, di sekitar desa Kranji juga sudah berdiri beberapa industri manufaktur baik skala besar maupun kecil, juga berdiri industri pupuk, makanan ternak, pengalengan ikat, batu granit dan beberapa jenis industri lainnya. Munculnya kompleks Industri Sunan Drajat milik KH. Muhammad Ghafur, pimpinan pesantren Sunan Drajat adalah salah satu keseriusan pesantren untuk terlibat dalam proses tersebut. Kompleks industri yang dimiliki kyai Ghafur mengindikasikan adanya sinergi yang kuat antara Bupati, investor dan kyai (pesantren) dalam pengembangan usaha, meskipun pemaknaan sinergi oleh masyarakat sekitar pesantren ditafsiri bermacam-macam.

Kedatangan juragan kota ke kawasan desa Kranji dan sekitarnya bukan sekedar membawa uang seransel untuk menyulap kawasan ini menjadi kawasan yang hingar-bingar dengan suara mesin pabrik atau hulu lalang manusia, melainkan juga mendatangkan berkah bagi para makelar tanah, makelar proyek, agitator dan (mungkin) provokator. Karena tidak semua masyarakat dengan mudah menjual tanah yang sangat luas untuk kepentingan industri, meskipun tanah tersebut tidak produktif lagi. Karenanya, muncul mafia tanah, baik melibatkan masyarakat sipil biasa, aparat desa/kecamatan, tokoh masyarakat, dan bahkan kyai. Cerita orang kaya baru menjadi menu rasan-rasan warga sekitar, demikian pula banyaknya rumah baru dan mewah, mobil dan kendaraan baru, dan (mungkin) istri-istri baru adalah menu keseharian yang tak pernah lepas dari rasanan warga. Sementara, pada satu sisi juga ada warga yang mengeluh karena tanahnya dibeli Cuma seharga Rp. 1.500/meter oleh makelar, kemudian dijual ke investor Rp. 15.000/meter, padahal tanahnya mencapai 30 ha. Begitu pula cerita soal penggusuran tanah dan rumah untuk keperluan pelabuhan, serta cerita sedih warga karena tidak menjangkau harga sewa stan WBL yang melangit, sementara sebelumnya berjualan di sekitar itu sebelum disulap menjadi kawasan wisata moderen.

Tahun 2004 yang lalu muncul protes (demonstrasi) yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus soal LIS yang dianggap banyak merugikan masyarakat, dan sebaliknya menguntungkan investor dan makelar tanah. Protes tersebut tanpa menghasilkan apa-apa, dan justru teror terus dialami oleh mahasiswa. Salah satu teror tersebut adalah pengambilalihan kantor oleh tokoh setempat karena kantor tersebut hanya dipinjamkan kepada mahasiswa. Dengan teror seperti itu, mahasiswa (yang mewakili aspirasi warga tertindas) tidak berkutik, apalagi ada ancaman dikeluarkan dari tempat dimana dia menuntut ilmu. Hal tersebut menunjukkan, pengaruh investor melalui tangan aparat setempat sudah masuk pada lingkaran elit lokal dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat (kemudian) seolah berhadapan dengan elit lokal.

Hubungan antara investor/aparat dengan tokoh setempat ibarat hubungan *patron-client*, suatu hubungan saling menggantungkan satu sama lain. Elit lokal (kadang) tidak berdaya meghadapi *pressing* investor/aparat karena sebelumnya menerima imbalan, dan imbalan

tersebut harus dibalas dengan imbalan proteksi kultural atas nama “pemberdayaan ekonomi umat”.

Perang “otoritas” mulai bermunculan seiring dengan usaha pencarian identitas kelompok-kelompok masyarakat dalam merebut ruang industri. Hal ini dapat dimaklumi karena masing-masing berusaha berebut ruang dan ingin mencapai apa yang disebut oleh Dahrendolf sebagai “kepentingan”. Dalam masyarakat industri seperti kawasan Pantura Lamongan ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam dua posisi; yaitu, mereka yang memegang otoritas dan kelompok subordinat yang memiliki kepentingan tertentu. Keduanya berusaha untuk mengejar peluang, dan semakin besar peluang yang mereka dapatkan maka semakin besar pula kemungkinan konfliknya.⁹

2. Antara Makan Sunan Drajat, WBL dan Pelabuhan.

Dalam dua tahun terakhir ada suasana kontras dalam kehidupan masyarakat Kranji dan sekitarnya. Jika pada tahun 1990-an ada *pelesetan*, ketika banyak menghubungkan antara “Masjid dan Plaza”, maka *pelesetan* tersebut kini berpindah ke sebuah desa yang disebut Kranji, yakni hubungan “makam Sunan Drajat dan WBL” (Wisata Bahari Lamongan). Pertanyaan yang muncul, apa hubungan orang berdo’a di Sunan Drajat dengan WBL yang sarat dengan persoalan glamour, hedonitas, dan (mungkin) “kemaksiatan”!

Di sebelah timur desa Kranji (kurang lebih 1 km) terdapat makam Sunan Drajat,¹⁰ salah satu Wali Songo. Tiap hari dengan tidak mengenal jam ziarah, ribuan jamaah dari seantero nusantara berjubel untuk berdo’a di tempat tersebut, baik berdo’a untuk dirinya, keluarganya, untuk urusan dunia maupun akhirat. Ada yang rombongan bis, mobil pribadi, naik kendaraan umum hingga sepeda motor. Tempat tersebut bagi peziarah adalah tempat suci, keramat dan *njaluk* berkah. Tapi bagi yang tidak mempercayainya dengan berdo’a disitu, makam Sunan Drajat tetap dikunjungi dalam rangka menghormati para wali yang menyebarkan kalimat tauhid di bumi nusantara pada masa-masa awal. Karenanya, umat Islam sangat menghormati tempat tersebut dan menganggapnya sebagai tempat suci dan kramat.

Pada sisi barat (1 km ke arah barat Kranji) terdapat Wisata Bahari Lamongan (WBL), salah satu pusat pariwisata moderen di Jawa Timur dan dianggap sebagai Jatim Park II setelah Jatim Park I di Batu Malang. WBL yang baru dibuka 2 tahun lalu menjanjikan tontonan dan pemandangan menarik. WBL merupakan modifikasi pantai Tanjung Kodok salah satu pusat wisata rakyat. Dulu dengan Rp. 2500 bisa bermain di pantai, sekarang biaya masuknya Rp.

⁹ George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Moderen*, ter. Alimandan (Jakarta:Prenada Media, 2005), 155.

¹⁰ Sunan Drajat dikenal dengan sebutan Raden Qosim yang merupakan putera dari Sunan Ampel. Selama kurang lebih 36 tahun, dia berdakwah dan tinggal di Desa Drajat (dulu dikenal dengan sebutan Kadrajat), yang sekarang makamnya banyak dikunjungi para peziarah. Lihat Tim Pemda, *Lamongan Mamayu Raharjaning Praja* (Lamongan:PEMDA, 2004), 25.

35.000,-. Satu kompleks dengan WBL adalah wisata Goa Maharani, salah satu keajaiban alam di daerah ini, harga tiket masuk Rp. 3000,-. Sementara berhimpitan dengan WBL terdapat Tanjung Kodok Resort salah satu penginapan/peristirahatan sekelas hotel bintang lima. Untuk tarif termurah pada hari-hari biaya sebesar Rp. 675.000/nett dan hingga 2.750.000/nett. Resort ini dikelola satu atap dengan WBL.

Pada hari-hari biasa/libur, di pelataran parkir berjejer mobil mewah yang berasal dari luar kota. Demikian pula resort yang berada di sebelahnya. Sementara, warga penduduk asli hanya bisa *melongo* melihat pemandangan keseharian itu. Dan tengoklah komentar penduduk sekitarnya, yang menurutnya, *kalo* dulu tiap minggu bisa membawa anak dan keluarganya jalan-jalan di Tanjung Kodok, tapi sekarang hanya kalangan berduit yang bisa masuk kesana. Kata mereka, *kalo* dulu sangat sulit melihat perempuan pakai jins dan baju ketat, sekarang bisa ditemui dimana saja di sekitar Kranji yang berasal anak kos yang bekerja di WBL dan sekitarnya. WBL adalah sebuah lambang hedonitas, glamour dan (mungkin) “kemaksiatan”.

Sementara tidak jauh dari WBL, atau 1 km ke arah barat Kranji terdapat pembangunan pelabuhan ASDP. Rencananya pelabuhan ini sebagai pintu masuk transportasi melalui laut menuju Pantura dan sekitarnya, sekaligus sebagai infrastruktur untuk mendukung industrialisasi di kawasan tersebut. Sementara di bagian timur, 1,5 km ke arah timur Kranji terdapat *shorbase* dan pembangunan pelabuhan yang diperuntukkan untuk industri. Pelabuhan ini sekaligus sebagai instrumen pendukung kegiatan ekspor-impor kabupaten Lamongan.

3. Munculnya Orang Kaya Baru;Elit Lokal dan Makelar Tanah

Dampak dari rencana industrialisasasi adalah adanya penyediaan lahan yang cukup luas untuk kepentingan tersebut. Salah satu lahan yang cukup luas yang diperuntukkan untuk kawasan *Shorbase*. Penyediaan lahan yang cukup luas pada satu sisi ada pihak yang dirugikan, di pihak lain juga ada yang diuntungkan. Bukan sekedar itu, penyediaan dan pembebasan tanah menyeret beberapa elit lokal dan aparat untuk mengambil manfaat di balik persoalan tersebut.

Pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan Pelabuhan Terpadu Lepas Pantai di Lamongan merupakan salah cerita bagaimana kontes hubungan antara aparat, elit lokal dan makelar tanah saat industrialisasasi itu pertama kali muncul. Pembangunan PTLP yang merupakan sentra kawasan industri membutuhkan lahan awal sebesar 80 ha. Lahan yang diinginkan adalah kawasan Desa Tetangga, karena lokasi tersebut dianggap strategis, yakni berada di bibir pantar dengan berbentuk “L”. Dipilihnya kawasan tersebut karena masih tersedia lahan yang sangat luas dalam bentuk pegunungan batu sisa galian kapur dan granit yang sudah tidak subur tanah sekitarnya. Dalam bayangan, tanah tersebut akan terbeli dengan harga murah, dan dengan mudah masyarakat akan menjualnya karena sudah tidak produktif lagi.

Sebagian tanah di sekitar pantai Desa Tetangga adalah milik Pardi, yang ia beli tahun 1997 pada awal krismon seharga Rp. 1.500/ha. Rencananya tanah tersebut akan dijual ke salah seorang investor yang diperuntukkan industri kimia. Karena alasan krisis moneter, rencana pembangunan industri kimia gagal. Hingga akhirnya pada tahun 2003,

(Pete Nasional), salah satu perusahaan yang dibiayai orang Singapore akan membangun kawasan industri yang diberi nama PTLP tersebut. Lahan awal yang dibutuhkan 80 ha, sementara tanah yang sudah dikuasai Pardi 60 ha. Dengan segala alasan, Pardi tidak mau melepaskan tanahnya ke PTLP, meskipun harga yang dijanjikan cukup menggiurkan. Pardi mau melepas seluas 20 ha saja, tapi dengan catatan harus ditukar guling di tempat lain, dan Pemda mencari di daerah Sidokelar, meskipun harganya cukup mahal.

Tanah yang sudah diperoleh Pemda 20 ha dari Pardi hasil tukar guling, sementara sisanya 60 ha diperoleh dari reklamasi pantai 10 ha, dan tanah Pemda yang berada di tempat itu 10 ha, sementara 40 ha harus diperoleh dari tanah masyarakat dengan cara membeli. Yang mBaurekso, atas nama pemerintah berusaha mencari jalan keluar dengan cara membujuk masyarakat agar menjual tanahnya ke investor. Melalui aparat desa, petugas kecamatan, tokoh masyarakat, kyai, dan Pardi, Pemda berusaha meyakinkan masyarakat bahwa tanah yang dimilikinya sangat dibutuhkan negara dalam rangka memberikan kesempatan kepada swasta (Pete Nasional) untuk membangun industri yang akhirnya akan memberi manfaat banyak dan kesejahteraan bagi warga sekitar Shorbase tersebut. Tawaran awal Pemda sebesar Rp. 3.500/m dengan asumsi harga tanah sebelumnya Cuma Rp. 1.500/m, karena memang tanah tersebut sudah tidak produktif lagi. Dengan harga tersebut, masyarakat tidak bergeming. Maka Pemda menaikkan tawaran menjadi Rp. 5000/m. Ketika harga yang ditawarkan segitu, mBaurekso mulai menggunakan tangan Elit Lokal. Elit Lokal melalui berbagai kesempatan, pengajian, tahlil, haul dan pengajian rutin di radio, mulai meminta secara terang-terangan kepada masyarakat agar menjual tanahnya dengan harga tersebut karena sangat dibutuhkan untuk kepentingan *Shorbase*. Sesekali dalam cerahnya, elit paling berpengaruh di kawasan tersebut mengumbar ancaman, misalnya ia mengatakan apabila PTLP batal dibangun akan berdampak pada masa depan ekonomi masyarakat, generasi muda akan banyak kehilangan kesempatan kerja, dan masyarakat Desa Tetangga bisa jadi miskin, apalagi tanah tersebut tanah tandus yang tidak memiliki manfaat ekonomi sama sekali, katanya.

Dengan harga Rp. 5000/m masyarakat juga tiga mau melepas tanahnya. Elit Lokal mende~~ad~~line, jika dalam waktu dekat dengan harga segitu tidak mau, proyek tersebut akan dipindah ke Tuban. Menurutnya (disampaikan berkali-kali), kemampuan Pemda hanya seperti itu.

Ternyata deadline itu hanya gertak sambal, dan masyarakat menyadari hal itu. Sementara di masyarakat terjadi pro-kontra yang luar biasa dan muncul "preman dadakan" yang mengintimidasi masyarakat. Mereka adalah para tangan kanan mBaurekso, investor dan bahkan suruhan elit lokal. Demikian pula pro-kontra untuk melepaskan tanah terjadi di Badan Perwakilan Desa (BPD), sebuah lembaga yang secara aktif memediasi kepentingan rakyat dan negara. Karena harga Rp. 5000/m tidak sukses, maka dinaikkan menjadi Rp. 7.500/m. Dengan harga tersebut di masyarakat terjadi tarik ulur, meskipun akhirnya sepakat untuk tidak menjual. Kemudian Pemda menaikkan lagi menjadi Rp. 15.000/m dan penduduk setempat juga tidak mau. Akhirnya tercapailah harga Rp. 20.000/m.

Ketiga tawaran Pemda mencapai Rp. 20.000/m., tebaran ancaman fisik dan intimidasi terus membayangi warga. Pemain lapangan mBaurekso dan investor menggunakan segala cara untuk mempengaruhi warga. Ketika tangan Elit Lokal sudah tidak mempan lagi, maka aparat dan

“makelar tanah” menggunakan tangan Kyai Na’im untuk membujuk warga. Beberapa warga dipertemukan dengan kyai di kediamannya, dalam rangka membujuk, karena harga tersebut dianggap sudah pantas, bahkan sangat pantas. Sekali lagi, warga tidak mau menjual dengan harga tersebut.

Karena gagal menggunakan cara tersebut, pemilik tanah diundang ke kecamatan untuk merembuk dan membujuk mereka. Teknik mengantarkan undangan dilakukan dengan model intimidasi dengan harapan merusak mental warga, yakni dengan memberikan undangan jam 11 s/d 12 malam ketika warga terlelap tidur. Cara mengantarkan undangan seperti ini mengundang protes dan ketidaksimpatikan warga, karena dianggap model komunis.

Pertemuan di kecamatan mentok, dan warga tidak mau menjual tanah kalau harga tidak mencapai Rp. 50.000/m. Suasana Desa Tetangga diliputi rasa mencekam, karena banyaknya preman dan mafia tanah terus bergerilya. *mBaurekso* merasa tidak mampu lagi membeli jika harga itu yang diminta warga. Dari harga Rp. 20.000/m kemudian dinaikkan menjadi Rp. 25.000/m. Masyarakat juga tidak mau melepaskan tanahnya. Harga terakhir yang ditetapkan oleh *mBaurekso* sebesar Rp. 30.000/m, dan warga masyarakat juga tidak mau. Dengan harga segitu *mBaurekso* merasa mentok, dan merasa tidak mampu lagi membebaskan tanah warga. Proses transaksi mentok selama beberapa bulan karena sulitnya mempertemukan tawaran kedua belah pihak, sementara *mBaurekso* sendiri menganggap “final”. Karena beku selama beberapa bulan, maka muncul *good will* (yang katanya dari investor) untuk membantu *mBaurekso* sebesar Rp. 15.000/m. sehingga harganya menjadi Rp. 45.000/m. Dengan harga tersebut akhirnya warga mau melepaskan tanahnya. Sementara pada sisi selatan untuk akses jalan dibeli dengan harga Rp. 105.000/m.

Jalan panjang pembebasan tanah dari tawaran Rp. 3.500 s/d Rp. 45.000 tidak akan terjadi seandainya *mBaurekso* konsisten dengan harga yang ditetapkan semula. Menurut warga, seandainya harga Rp. 5.000/m secara konsisten dipegang oleh *mBaurekso* dengan tidak melibatkan unsur-unsur lain, maka warga akhirnya akan melepaskannya. Ketika harga dinaikkan menjadi Rp. 7.500/m, warga mulai curiga kalau ada permainan, sebab ketika harga masih Rp. 5.000/m, *mBaurekso* menyatakan bahwa uang yang dimiliki pemerintah cuma segitu, tetapi ketika masyarakat masih berfikir, kemudian *mBaurekso* menaikkannya. Dari sinilah warga mulai curiga dan juga ikut bermain dibalik permainan tersebut.

Cerita soal pembebasan tanah tidak selesai sampai di sini. Di salah satu tanah warga (lahan milik Pardi, tangan kanan *mBaurekso*) terdapat kuburan yang dikeramatkan, yakni sebuah kuburan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pemakaman ari-ari Sunan Giri. Ketika transaksi berlangsung, terjadi kesepahaman antara warga dan investor untuk tidak membongkar kuburan tersebut. Tetapi ketika proses pemerataan tanah dimulai, ternyata kuburan tersebut dipindah atas saran Elit Lokal. Menurut Elit lokal, investor akan mengganti lahan tersebut dengan Masjid. Ibarat membuang puntung rokok di jerami, api kemarahan warga tidak bisa dibendung.

Bersamaan dengan itu, kemarahan warga juga ditumpahkan kepada investor karena kompensasi jalan masuk hanya dihargai Rp. 10.000/m. BPD bersama masyarakat kemudian

protes ke kecamatan. Massa dalam jumlah besar bergerak menuju ke kecamatan. Singkat cerita, sampai di pertigaan Banjarnegara, tanpa dikomando, massa menyerbu padepokan tempat elit lokal berada. Mereka berorasi dan menuntut supaya kuburan kramat tersebut dikembalikan pada tempat semula. Selesai berdemo, massa bergerak menuju kantor Kecamatan. Mereka mengancam tindakan aparat yang lebih banyak membela investor dari pada warga, dan meminta agar tanah jalan desa dibeli sesuai dengan harga pasaran. Sepulang dari demonstrasi di kecamatan, dengan jumlah yang cukup besar warga kembali memblokir kendaraannya menuju kediaman Elit. Pada demo kedua ini, amarah massa tidak tertahan lagi, dengan menyebut elit lokal antek *mBaurekso*, makelar proyek dan segala letupan emosional lainnya. Warga juga meminta agar kuburan segera dikembalikan ke tempat asalnya.

Munculnya pembebasan tanah sebagai akibat dari industrialisasi di kawasan Pantai Utara Lamongan bukan sekedar berakibat pada munculnya ketegangan antara masyarakat, aparat dan kyai, melainkan muncul juga aroma isu-isu krusial seperti tuduhan kyai sebagai makelar, kyai jadi antek penguasa dan investor, dan segala stereotipe lainnya. Apakah tuduhan itu benar atau tidak, fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi ke arah itu. Pada Pilbup Lamongan yang lalu, elit lokal menjadi garda terdepan dalam pemenangan *mBaurekso* yang kemudian melahirkan pro-kontra luar biasa di kalangan *grass-root*. Demikian pula, pasca pembebasan tanah yang menghebohkan itu, muncul orang kaya baru, khususnya mereka yang berada di balik pembebasan tanah (mekelar). Maka tidak heran jika para nelayan kecil memiliki mobil *innova*, *panther hi-grade* dan begitu pula rumah yang mewah. Sementara pada sisi lain, keterbelahan masyarakat akibat pembebasan tanah belum mereda dan terkesan meruncing.

Pak Sukarjo adalah salah satu orang yang paling beruntung dengan kehadiran industri di kawasan tersebut. Meskipun ia tidak sendiri, karena masih banyak Sukarjo-Sukarjo lain yang juga menjadi pemain dibalik industrialisasi di desanya, lelaki tampan ini adalah salah potret masyarakat desa yang sukses di tengah derasnya persaingan suasana industrialisasi di kawasan Paciran.

Sukarjo sebenarnya bukan penduduk asli Kranji, melainkan tetangga sebelah, Desa Tetangga—yang hanya beberapa ratus meter dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Meski bukan penduduk asli Kranji, aktifitas keseharian banyak dihabiskan di desa Kranji. Sejak kecil selalulu bermain di sekitar pelabuhan dan pasar, hingga sekolah di MI Tarbiyatuth Tholabah, meskipun *mrotol* (alias tidak tamat) di kelas enam. Demikian pula ketika remaja, menginjak dewasa dan saat kawin.

Sukarjo sekarang bukan lagi Sukarjo tiga tahun lalu, yang hidupnya pas-pasan dengan hanya mengelola sebuah bengkel diesel yang digelutinya selama 12 tahun. Waktu itu, hari-harinya bergelut dengan mesin dan oli, atau kadang juga sekali miyang (melaut) bersama Puket Harimau kebanggaannya. Tapi sekarang berbeda. Jika bertanya di ujung timur atau barat jalan sepanjang Derajat tentang nama Sukarjo, mereka pasti mengetahuinya—dan serentak menunjukkan dimana dia berada dan tinggal. Ketika lewat pertama kali di depan rumahnya, penulis tidak tahu kalau rumah tersebut milik Pak Sukarjo. Cuma dalam bayangan saya, betapa

bagusnya rumah tersebut dan menonjol sekali dibandingkan dengan rumah sekitarnya. Bayangkan aja, rumah seluas 150 m² tersebut dibuat dengan tiga susun (lantai) yang menyerupai tipe regency di kota-kota besar. Berarti rumah tersebut besarnya 450 m². Sementara di sisi kiri berjejer dua mobil, yakni kijang kapsul dan panther *high grade*.

Awal kesuksesan Sukarjo dimulai tahun 1997 awal sebelum krisis moneter menghantam Indonesia, ketika itu membebaskan sebuah tegalan yang rencananya diperuntukkan untuk industri kimia. Bersamaan dengan itu, ide cerdas muncul, tanah yang tidak produktif itu dia beli Rp. 1.500/meter dengan jumlah tanah seluas 60 ha. Rencana pembangunan industri kimia ternyata gagal, dan akhirnya pada tahun 2003 yang mBaurekso Lamongan bersama Pete Nasional bermaksud untuk membangun PTLP dan mengincar lokasi yang dimilikinya tersebut. mBaurekso dan investor mendatangi Sukarjo dengan harapan dapat membeli tanah yang dikuasainya. Rencana tersebut gagal, karena dia gak mau, harganya dianggap terlalu murah. Pembangunan PTLP sendiri membutuhkan tanah seluas 80 ha. Akhirnya, atas pertimbangan yang alot Sukarjo mau melepas tanahnya seluas 20 ha dengan model tukar guling tanah dengan luas yang sama di sekitar Desa Tetangga dan Sidokelar, nampaknya investor mau dan mBaurekso sendiri berusaha membujuknya. Sementara sisa yang dibutuhkan investor 60 ha sudah didapat dari hasil membeli ke warga 40 ha dengan harga Rp. 5000/m², 10 ha tanah negara dan 10 ha lagi didapat dari reklamasi pantai. Dengan tukar guling 20 ha tersebut, berarti tanah yang terisisa milik Sukarjo di sekitar PTLP masih 40 ha.

Secara ekonomi, Sukarjo sangat diuntungkan dengan tukar guling ini, sebab harga jual tanah hasil tukar gulingnya mencapai Rp. 20.000/meter dari harga sebelumnya yang hanya Rp. 1500/m². Belum lagi sisa tanah 40 ha di sekitar PTLP yang menurutnya harga sekarang sudah mencapai Rp. 45.000/m². Sisa tanah tersebut sengaja tidak dilepas sebab sekitar PTLP akan dipagar, dan akan dijadikan kompleks industri yang melibatkan industri besar dan kecil, sementara pelabuhan berada dalam kawasan tersebut yang nantinya bermanfaat untuk mempermudah jalur lalu lintas pengiriman barang. Baginya suatu hari PTLP akan diperluas dan tanahnya yang bersebelahan dengannya pasti dibutuhkan. Dalam kondisi sangat butuh, harga bisa dipermainkan, katanya.

Sukarjo bukan sekedar penguasa tanah di kawasan tersebut, akan tetapi bisnis pemerataan tanah yang luasnya 80 ha sebagian jatuh ke tangannya. Karena pertimbangan lahan yang tersisa masih di bawah kendalinya, (dan mungkin juga bagian dari strategi), Pete Nasional menerima proposal Sukarjo untuk ikut terlibat dalam pemerataan tanah dan pembangunan proyek tersebut. Sejak itu penyediaan alat-alat berat, penyediaan dump truck, bahan bakar solar, kantin bagi 200 lebih pekerja dan suplai air bersih jatuh ke tangannya.

Menurutnya, selama setahun dia menyediakan 30 alat berat/hari dengan volume kerja 9 jam/hari. Dalam satu jam dia mendapatkan komisi Rp. 10.000/alat berat, atau sekitar Rp. 90.000/alat berat. Pengasilannya dari alat berat bisa mencapai Rp. 2.700.000/hari. Sementara untuk dump truck masa kerjanya rata-rata 10 jam/hari dengan keuntungan Rp. 5000/jam atau sekitar Rp. 50.000/hari. Keuntungan yang didapat dari 20 truck yang di bawah kontrolnya

sebesar Rp. 1.000.000/hari. Sementara untuk solar, dia memasok antara 3000-12.000 liter/hari dengan keuntungan perliternya Rp. 100. Kalau diambil rata-rata 10.000 liter/hari, uang yang masuk kantongnya mencapai Rp. 1.000.000/hari. Sementara untuk kantin dan suplai air bersih diambil rata-rata keuntungannya Rp. 200.000/hari. Dari hasil pekerjaan tersebut, Sukarjo mengantongi keuntungan bersih sebesar Rp. 4.700.000/hari, yang ia rasakan keuntungan tersebut berlangsung 1 tahun. Jika dijumlahkan keuntungan Sukarjo dalam setahun sebesar Rp. 1.692.000.000,-

Sukarjo yang dikaruni 2 orang anak, yang satu kuliah di Surabaya yang satunya masih duduk di kelas 6 MI hasil pernikahannya pada tahun 1984, masih memiliki bisnis lain baik yang diproses sebelum kerjasama dengan PTLP maupun saat proses kerjanya masih berlangsung. Disamping kantin dan suplai airnya masih berlangsung di PTLP, juga memiliki usaha penggalian batu, sewa pentas 2 unit, ala-alat musik, sewa sound system, tenda, kursi dan beberapa bisnis lain hasil dari kerjaan selama menjadi mitra PTLP. Selain itu, properti yang dimiliki berupa truck engkel, 2 pick up, dan tentu saja panther *high grade* dan kijang kapsul.

Banyak sisi menarik bisnis tanah ketika bermitra dengan PTLP. Menurut Sukarjo, apa yang dihasilkan tidak semudah dan seindah yang dibayangkan banyak pihak. Hubungan dia dengan mBaurekso, aparat, Pete Nasional, tokoh-tokoh masyarakat dan pesaing bisnisnya tidak seindah yang dibayangkan. Tarik menarik untuk memperoleh keuntungan antar mereka dengannya kadang di luar batas-batas kemanusiaan. Dalam bisnis, (kadang) sudah tidak mengenal siapa dirinya, status sosial yang disandangnya, atau takut kepada Allah, yang penting untung dan untung. Demikian yang dirasakan menjadi tuan tanah, atau bahkan "makelar" tanah yang sukses.

BAB II

NELAYAN KRANJI DAN USAHA PENCARIAN IDENTITAS

A. Nelayan tradisional di tengah budaya populer.

Perahu kapal *porsesaine* atau Kursin merupakan jenis alat tangkap baru yang diperkenalkan oleh Kuna'in tahun 1977 ketika ia merantau ke Pekalongan. Lewat Kuna'in yang memperkenalkan mesin tempel dengan menggunakan solar atau bensin, secara beramai-ramai masyarakat Kranji mulai melirik jenis alat tangkap baru itu. Dari sisi hasil, jumlah tangkapan jenis Kursin jauh lebih besar dibandingkan dengan Puket Ireng, demikian pula daya jelajah yang hanya sekitar Laut Jawa kemudian meluas ke kawasan Pulau Madura, Pasuruan bahkan Probolinggo.

Jauh sebelum munculnya Kursin, nelayan Kranji pada awalnya mengenal alat tangkap yang bernama *Jolo Eder*, dan perahunya bernama *Jaten*. *Jolo Eder* adalah semacam jala biasa dengan bentuk yang diperbesar karena akan digunakan di tengah laut. Sementara *Jaten* adalah

jenis perahu yang tebjuta dari pon kayu jati utuh (tidak disambung) dengan usuran 3,5 s/d 4,5 M dengan tinggi 1 M. Untuk perjalanan memakai layar berbentuk persegi empat, dan apabila sedang tidak ada angin yang berhembus si nelayan harus mengayuh *welah*, yaitu sejenis dayung dengan ukuran lebih pendek dan ujungnya berbentuk seperti daun waru.¹¹ Selain Jaten, masyarakat Kranji juga menggunakan alat tangkap lain yang disebut *Payang*.

Menurut cerita masyarakat setempat, penggunaan perahu Puket Ireng tidak bisa dilepaskan dari keinginan masyarakat untuk terus berimprovisasi dalam penangkapan ikan, dengan tidak terpaku pada pola penangkapan tradisional. Penggunaan Puket Ireng secara menyeluruh dilakukan setelah proklamasi. Namun secara pasti tidak dapat ditemukan bukti-bukti yang mendukung terhadap perubahan itu. Perubahan dari *Jolo Eder* ke Puket Ireng baru semarak ketika masa kemerdekaan. Puncak kejayaan Puket sekitar tahun 1960-1977, ketika itu terdapat 120-an Puket Ireng di Kranji, sementara di kawasan sekitar seperti Tunggul, Banjaranyar dan Kemantren belum ada satu pun yang memakai Puket.

Dari sisi arsitektur, perahu yang berasal dari Kranji dan kawasan Pantura Lamongan memiliki kekayaan dan arsitektur yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lain, meskipun sulit dibuktikan apakah arsitektur tersebut *genuine* atau meniru dari tempat lain. Tetapi setidaknya, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas perahu Kranji dibandingkan kawasan lain. Misalnya, keunikan tersebut terletak pada *Linggi*, yaitu sebatang kayu yang terletak di bagian *haluan* dan *buritan*. *Linggi* perahu tradisional di kawasan ini dari sisi jenis tergolong paling banyak. Misalnya, perahu desa Weru disebut Perahu *Pincu'an*, perahu desa Kranji disebut perahu *ijon-ijon*, perahu asal Paciran disebut Perahu *Jaten*, perahu dari desa Blimbing/Brondong disebut *Cimenting*. Selain bentuk arsitektur yang berbeda, layar sebagai alat sarana perjalanan juga berbeda. Layar ada yang berbentuk segi empat ada pula yang segi tiga. Kekayaan arsitektur ini sekaligus yang membedakan dengan kawasan lain, misalnya Gresik yang hanya mengenal sebutan *Canga'an*, Pulau Madura dikenal dengan sebutan *Kole'an* dan Pasuruan mengenal istilah *Lekok'an*.¹²

Meskipun Kursin hasil *up date* dari Puket dan jenis perahu tradisional sebelumnya, masih muncul sekian pertanyaan; apakah perahu model seperti ini masih bisa bersaing dengan perubahan lingkungan sekitar yang ditandai dengan modernisasi di berbagai bidang, atau masuknya budaya “populer” di tengah masyarakat nelayan Kranji? Pertanyaan seperti itu pantas dikemukakan, karena di tengah melimpahnya potensi laut justru nelayan-nelayan tradisional semakin terpinggirkan oleh modernisasi alat tangkap dan perahu yang tidak sekedar mampu bertahan dengan musim, tetapi juga dapat menjangkau ke berbagai wilayah. Pertanyaan seperti itu juga pantas dikemukakan, karena perubahan masyarakat nelayan yang ditandai dengan *suguhan* industrialisasi akan menjadi pemandangan keseharian masyarakat—yang ini akan mempersulit daya tawar nelayan, karena profesi nelayan akan menjadi pilihan terakhir setelah mereka tidak tertampung lagi di pabrik-pabrik. Dalam konteks ini, perubahan alat tangkap dan

¹¹ Wawancara dengan tokoh nelayan Kranji, Monalin dan Ach. Kasbu. Lihat pula *Sejarah Desa Kranji dan Pemerintahannya* (Kranji:Pemerintah Desa, 2006), 13.

¹² *Ibid.*

perahu menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan melalui peningkatan hasil tangkapan. Sebab jika hanya menerima terhadap keadaan, maka profesi nelayan akan menjadi “kenangan masa lalu”, yang tidak menjadi pilihan utama bagi generasi sekarang.

B. Problem permodalan.

Sebelum melaut (dalam bahasa lokal dikenal dengan sebutan “miyang”), para nelayan biasanya mempersiapkan sedemikian rupa agar proses melaut bisa berjalan dengan yang diharapkan. *Pertama*, yang dilakukan adalah perawatan kapal. Sebelum turun ke laut apalagi untuk pelayaran yang memakan waktu cukup panjang harus dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak terjadi kendala di tengah laut. Bagian-bagian penting yang mendapat prioritas perawatan adalah; kondisi kapal bila ada kebocoran, perawatan mesin secara berkala apalagi mesin jenis Kursin yang jumlahnya sampai empat buah. Kondisi lampu petromaks yang jumlahnya mencapai 30-an harus dalam kondisi sempurna, demikian pula untuk perahu kecil yang hanya membutuhkan 4 lampu petromaks. Demikian pula kondisi jaring/jala yang biasanya mengalami kerusakan ketika tersangkut karang atau dirobek ikan besar. Semua perawatan tersebut memerlukan biaya yang sangat besar, yang ditanggung oleh *Daokeh* setelah memperoleh bagi hasil tangkapan.

Kedua, mempersiapkan solar, minyak tanah dan es batu. Untuk jenis Kursin, sekali berangkat kadang membutuhkan 400 liter solar, 50 liter minyak tanah untuk lampu dan 3 ton es batu. Sementara untuk perahu kecil bisa sepertiganya, atau seperempat dari jumlah tersebut. Selain harganya mahal, pada waktu tertentu minyak jenis solar sering *raib* (menghilang) di pasaran, kalau pun ada harga yang ditawarkan sangat mahal. Harga bahan bakar yang demikian tinggi sering membuat pemilik kapal tidak berdaya, apalagi di saat musim baratan. Belakangan muncul ide, minyak tanah dicampur minyak *kletik* (minyak goreng) untuk menggantikan solar. Cara tersebut ditempuh untuk mengirit biaya produksi yang harus ditanggung Daokeh dan bahkan Jragan. Kebiasaan nelayan Kranji, biaya operasional selama melaut ditanggung oleh Jragan. Jragan berfungsi sebagai manager, pimpinan ABK selama melaut. Meskipun Jragan sendiri meminjam pada Daokeh, atau kepada pihak lain, dan dikembalikan setelah memperoleh hasil tangkapan ikan.

Ketiga, persoalan tenaga (Belah). Karena banyaknya Belah yang harus dibawa ke tengah laut, tenaga yang tersedia di desa Kranji tidak *mumputi* (cukup), sehingga perlu mendatangkan dari daerah sekitar atau daerah/kecamatan lain yang cukup jauh. Ketika mengambil tenaga dari desa/kecamatan lain muncul persoalan tentang penambahan uang transport dan penyediaan akomodasi selama berada di desa ini. Kadang persoalan ini mengganggu terhadap kontinuitas *melaut*. Ikatan kontrak kerja antara Daokeh dan Belah dilakukan dengan cara hutang atau kredit..

Penyediaan Belah menjadi tanggung jawab Jragan. Ada kalanya Belah tetap, yaitu mereka yang bekerja secara tetap selama bertahun-tahun kepada Jragan, dan ada pula Belah musiman, yaitu Belah yang dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa adanya ikatan khusus dengan Daokeh atau Jragan. Belah musiman ada yang berasal dari Kranji dan ada pula yang berada dari desa/kecamatan lain. Mereka memiliki hubungan keluarga dengan Jragan atau Daokeh, atau mereka para pekerja serabutan yang setiap musim *along* berada di Kranji untuk mencari pekerjaan. Bagi Belah musiman yang sengaja didatangkan oleh Jragan, biaya akomodasi menjadi tanggung jawab Jragan, tetapi bagi mereka yang datang dan pergi tanpa adanya ikatan, semua biaya akomodasi menjadi tanggung jawab sendiri.

Cost untuk perawatan, pembelian solar dan akomodasi Belah membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk perawatan kapal/perahu, seorang Jragan sering meminjam terlebih dahulu pada Daokeh, yang sekaligus sebagai pemilik perahu. Sekali melaut, seorang Jragan membutuhkan biaya hingga jutaan rupiah-- utamanya ketika musim *along* tiba dan harus keluar dari area penangkapan rutin menuju laut lepas yang membutuhkan persiapan yang memadai. Persediaan solar, es dan logistik Belah harus memadai, karena khawatir terjadi persoalan ketika berada di laut lepas.

Dalam hal ini, tugas Jragan bukan sekedar memenuhi semua kebutuhan selama melaut, tetapi juga kebutuhan keluarga yang ditinggal. Bagi Belah yang berasal dari Kranji ada kalanya langsung datang ke Jragan untuk kredit awal dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah, sementara bagi Belah yang berasal dari desa/kecamatan lain harus pinjam ke sanak keluarga untuk menutupi kebutuhan selama ditinggal suami.

Permodalan merupakan masalah krusial yang mengganggu percepatan nelayan Kranji menutupi kebutuhan hidupnya. Sehingga muncul *pameo*, "gali lobang tutup lobang". Model kredit kepada Daokeh menyebabkan nelayan masuk lingkaran setan yang tak berkesudahan. Problem tersebut terkait dengan; *Pertama*, dengan meminjam (terlebih dahulu), muncul ketergantungan Jragan dan Belah kepada Daokeh, sehingga Daokeh dapat memperlakukan komponen di bawahnya dengan seenaknya, misalnya masalah penjualan ikan pasca melaut. *Kedua*, Jragan tidak bisa keluar dari keterjeratan Daokeh yang sekaligus sebagai pemodal dan pemberi kredit kepada Jragan. *Ketiga*, apabila tidak memperoleh ikan sama sekali atau hasil tangkapan ikan sedikit, dimana jumlahnya tidak mampu menutup biaya operasional, maka pada hari berikutnya Jragan akan meminjam lagi pada Daokeh, demikian pula paha hari-hari berikutnya, yang menyebabkan Jragan dan Belah sulit keluar dari masalah tersebut. Keterjeratan seperti ini adalah masalah umum dan sering ditemui pada nelayan Kranji dan sekitarnya.

C. Proses penangkapan ikan dan pembagian hasil.

Mencari ikan di laut bukan persoalan yang mudah apalagi dengan peralatan seadanya. Bagi nelayan besar dengan memanfaatkan teknologi penangkapan ikan moderen, menangkap

ikan dengan jumlah besar bukan persoalan yang sulit. Demikian pula ketika nelayan Kranji berusaha menangkap ikan dengan jumlah besar. Muncul beberapa masalah dalam proses pencarian/penjaringan ikan. *Pertama*, rusaknya ekosistem laut oleh banyaknya reklamasi untuk kepentingan pengembangan pelabuhan menyebabkan ikan tidak “kerasan” berada di dekat pantai. Bagi kapal/perahu dengan skala besar tidak ada masalah, karena mereka bisa melaut antar pulau, sementara bagi perahu kecil dengan 2-3 awak perahu, masalah ini menjadi problem besar. Munculnya industri di sekitar Kranji memicu penyeimbangan infrastruktur pendukung sebagaimana pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, dan kerusakan tersebut berakibat pada nelayan kecil.

Kedua, menangkap ikan tergantung kondisi alam/musim. Bila musim baratan tiba, hanya perahu kecil yang berani *melaut*, sementara kapal besar hanya menumpuk di pelabuhan. Demikian pula ketika memasuki bulan purnama, atau angin mulai bergerak dari barat, praktis apabila dipaksakan para nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan apa-apa.

Ketiga, pembagian hasil tangkapan. Bila musim *along* (banyak ikan), semua unsur dapat merasakan nikmatnya melaut meskipun harga pasar ikan tiba-tiba turun. Baik Daokeh, Jragan dan Belah dapat merasakan nikmatnya menjadi nelayan. Akan tetapi ketika *ngoreng* (tidak dapat ikan) atau musim baratan, hasil tangkapan hanya cukup untuk membeli solar dan biaya operasional, dan tidak jarang seorang Belah yang bekerja 2-3 hari di laut hanya memperoleh Rp. 10.000,-. Semua unsur yang terlibat dalam urusan penangkapan ikan merugi, demikian pula Daokeh, karena tidak memperoleh hasil sedikitpun, atau sebaliknya mengeluarkan biaya operasional yang tidak mampu tertutupi oleh hasil tangkapan. Tidak ada aturan yang pasti tentang pembagian hasil ini, tergantung pada hasil tangkapan. Aturan normatifnya sebenarnya ada, akan tetapi semua tergantung pada hasil di lapangan dan kebaikan hati Daokeh dan Jragan.

Pada saat *along*, jumlah hasil tangkapan ikan nelayan Kranji dengan menggunakan Kursin bisa mencapai 10 ton, sementara apabila menggunakan Puket Ireng bisa hanya sekitar 3-4 kwintal. Perbedaan keduanya memang sangat mencolok, karena daya jelajah Kursin yang dapat melintas Laut Jawa, Perairan Madura hingga kawasan perairan Makasar. Sementara Puket Ireng dengan kondisi perahu yang kecil dan peralatan terbatas, area penangkapan hanya seputar Laut Jawa atau sekitar perairan Lamongan, Tuban dan Gresik. Sangat jarang jenis perahu Puket yang menjelajah hingga radius 30 mil dari kawasan pelabuhan Kranji.

Sementara itu jenis ikan yang menjadi favorit tangkapan nelayan adalah adalah ikan Tongkol, Tengiri, Gembung, Beluh, Johor, Peh (ikan Pari), Cucut, Tonah, Layur, Teri, Dodok, Mlido, Juwi, Cumi-cumi, Udang, Rajungan, Kakap, Dorang, Ajahan, Manyung. Dari sekian jenis ikan yang sering menjadi langganan dan hasil tangkapan melimpah adalah jenis ikan Tongkol, Tengiri, Gembung, Johor dan Teri. Tetapi harus diakui bahwa ikan-ikan tersebut tidak diperoleh dari perairan Lamongan saja, melainkan ke berbagai area (*out area*) yang

selama ini sering dilakukan oleh nelayan Kranji. Pola menangkap lintas batas sudah menjadi tradisi nelayan Kranji sejak dulu, utamanya ketika saat baratan tiba. Sebab, jika hanya mengandalkan perairan Lamongan, yang sudah tercemari oleh berbagai polusi sangat mustahil memperoleh hasil tangkapan yang maksimal.

Pembagian hasil antara Daokeh, Jragan dan Belah dilakukan setelah mereka memperoleh uang. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan antar masing-masing komponen. Aturan tersebut tidak tertulis, tetapi masing-masing saling memahami berapa persen penghasilan mereka dari total jumlah yang diperoleh. Aturan tersebut dibuat oleh pendahulu (nenek moyang mereka), dan generasi sekarang tinggal menikmati dan meneruskan pembagian hasil tersebut.

Dalam tradisi nelayan terdapat pembagian hasil yang berbeda ketika saat *along* dan saat *ngoreng*. Penjelasannya sebagai berikut :

Saat Along. Pada saat kapal pulang dengan hasil tangkapan yang melimpah, maka akan dibagi sebagai berikut. Asumsi hasil tangkapan setelah dijual ditengkulak sebesar Rp. 10.000.000,-.

Pertama, Usang tersebut dipotong 20 % atau sekitar Rp. 2.000.000,- untuk keperluan pembelian solar. Uang yang tersisa Rp. 8.000.000,- (100 %). Uang tersebut dalam tradisi nelayan dianggap uang bersih yang tinggal dibagikan ke semua komponen yang terlibat dalam aktifitas penangkapan ikan.

Kedua, sisa uang 8 juta dibagi dua, yakni 17 %, dan 82,5 %. Yang 17 % dibagi tiga, masing-masing untuk: (1) upah *ngayom* (Belah), (2) untuk jaminan makan *ngayom*, dan, (3) untuk juragan/juru mudi.

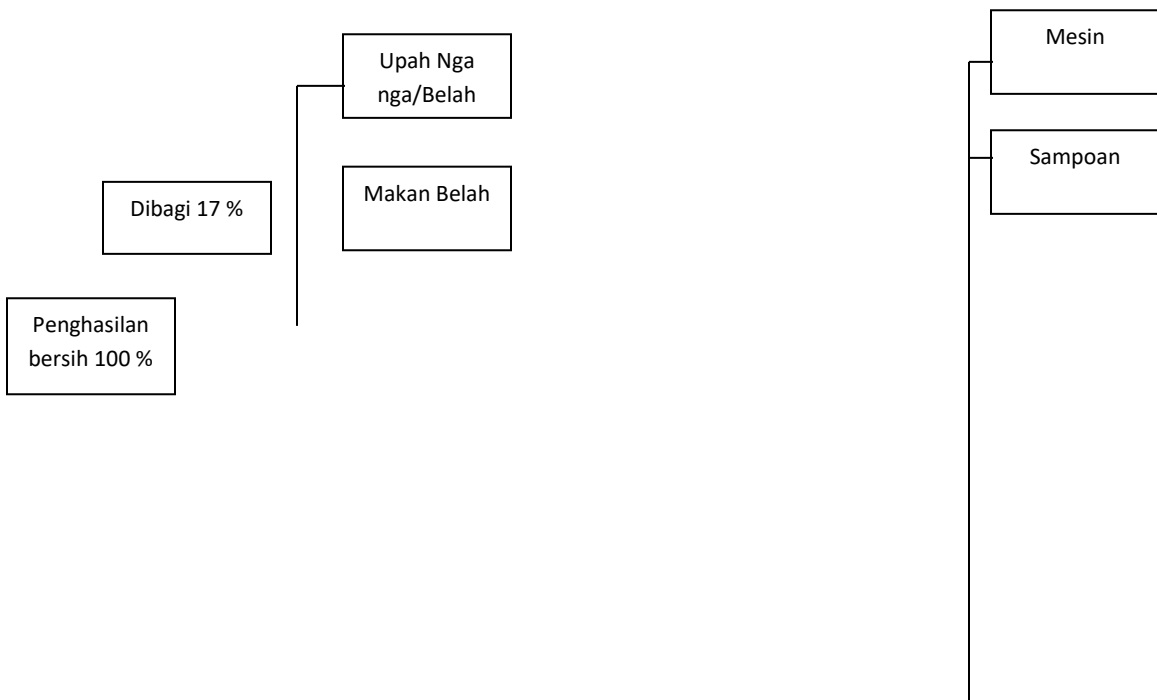
Sementara yang 82,5 % dibagi dua, yaitu; (1) 41, 25 % untuk Daokeh. Hasil tersebut oleh Daokeh masih diberikan pada Jragan sebesar 17 %. (2), 41, 25 % dibagi ke semua Belah, tapi bagian tersebut masih dipotong 2,5 % untuk Jragan, sehingga yang tersisa 38, 75 %.

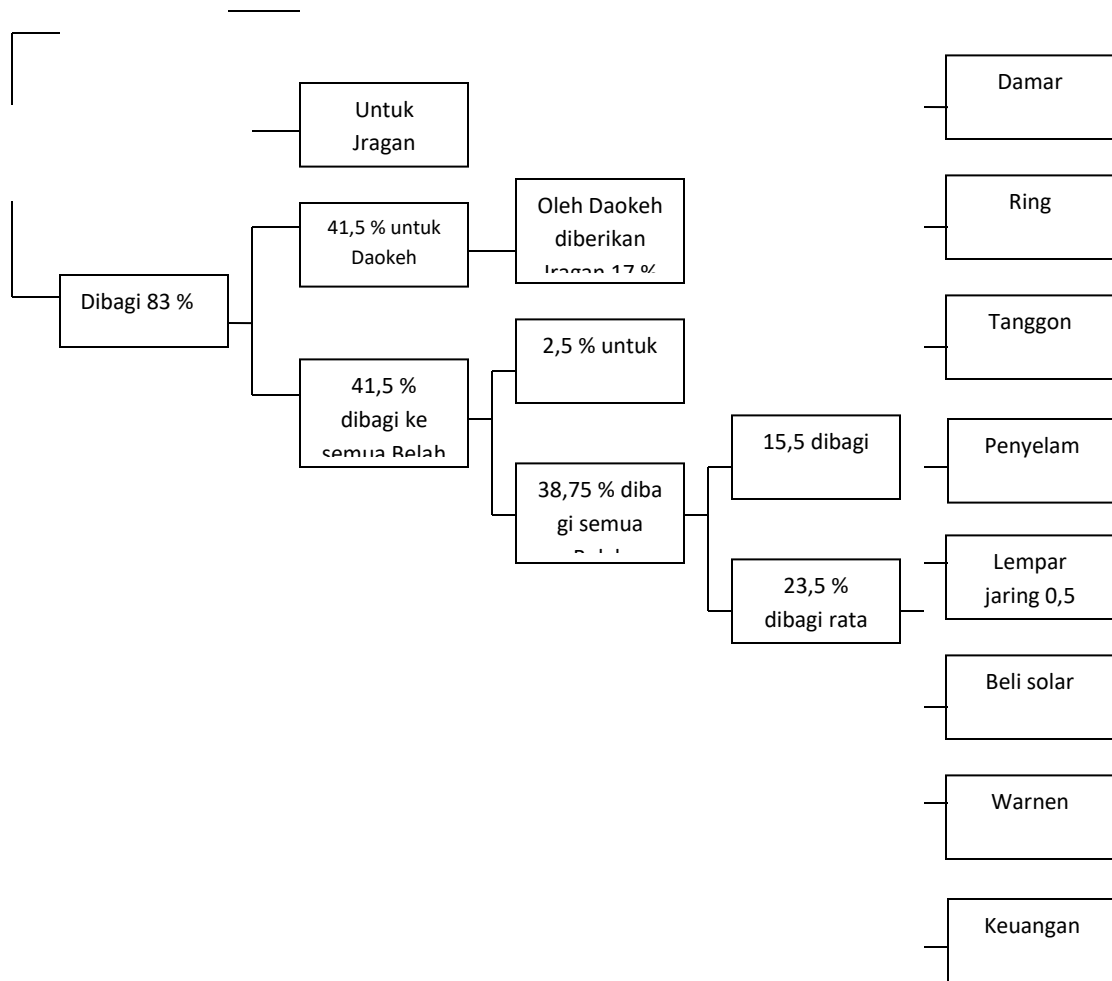
Ketiga, jumlah 38, 75 % dibagi ke dalam dua bagian, yaitu; (1) 15,5 % untuk semua Belah berdasarkan tugas dan wewenangnya. (2) sementara sisanya dibagi rata ke semua Belah. Perincian pembagian yang pertama (15,5 %) sebagai berikut : bagian mesim (2 bagian), sampoan (3 bagian), ndamar (2 bagian), ring (2 bagian), tanggon (1 bagian), juru arus/penyelam (1 bagian), lempar jaring (0,5 bagian), beli solar (0,5 bagian), keuangan (0,5 bagian), warnen (0,5 bagian). Sementara dari hasil ini Jragan masih memperoleh 2,5 bagian lagi.

Dari pembagian tersebut, jumlah diterima Jragan terbanyak dibandingkan dengan komponen lainnya, bahkan pendapatan Jragan melebihi jumlah yang diterima Daokeh, sang pemilik kapal. Hal ini bisa dimaklumi karena tanggung jawab Jragan sangat besar. Jragan bertanggung jawab atas rekrutmen ABK yang jumlahnya kadang mencapai 35 orang, dan tidak semua awak tersebut berasal dari dalam desa Kranji, sehingga semua kebutuhan (kadang) harus dipenuhi oleh Jragan. Pada sisi lain, Jragan memimpin 35 orang dengan segala latar belakang bukanlah hal yang mudah, apalagi tidak mendapatkan ikan yang diharapkan sementara mereka berada di laut sudah cukup lama. Segala resiko kadang ditempatkan pada Jragan, sementara (kadang) Daokeh tidak mau tahu, begitu pula

resiko yang ditanggung Belah nyaris tidak ada. Dari sinilah maka, pendapatan yang diperoleh Jragan disesuaikan dengan tanggung jawab yang diembannya.

Secara rinci pembagian hasil tangkapan sebagai berikut :





Secara keseluruhan, penghasilan Daokeh sebesar 24,5 %, Jragan 25,5 % dan sisanya 50 % dibagi ke semua belah. Jika dalam satu Kursin terdapat 25-30 Belah, masing-masing akan memperoleh antara 1,5 % - 2,5 %, tergantung kepada tugas dan tanggung jawab mereka. Jumlah yang diperoleh Jragan sangat besar dibandingkan dengan Belah yang lain, bahkan jumlah yang diperoleh Daokeh (pemilik perahu) masih selisih 1 % di bawah Jragan.

Dari gambaran perolehan penghasilan, dari penghasilan sebagai Belah akan sulit keluar dari jaring kemiskinan, sebagaimana yang banyak dialami oleh nelayan Kranji dan sekitarnya. Mereka terjebak pada pranata sosial yang mereka (terpaksa) untuk menyepakati, dan tidak tahu bagaimana harus keluar dari persoalan pembagian hasil yang tidak menguntungkan tersebut. Belah selalu terjebak pada kata akhir, "tidak ada pilihan lain", kecuali menerima keadaan yang sebenarnya menurut nurani mereka bertolak belakang.

Salah satu kebiasaan "buruk" nelayan Panturan adalah kecenderungan konsumtif. Apabila memperoleh hasil yang besar mereka suka membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya, tanpa memikirkan apakah esok hari dapat hasil yang sama seperti kemarin. Kasus seperti itu sering terjadi pada Belah yang secara ekonomi sangat lemah dan tingginya ketergantungan pada Jragan.

Saat Ngoreng. Sementara itu pembagian hasil ketika dalam keadaan ngoreng (hanya mendapatkan ikan sedikit), maka pembagiannya pun lain. Pertama langsung dipotong untuk uang solar sebesar 400 ribu. Dan selebihnya dibagi untuk Jragan dan Belah. Kadang, aturan yang sudah ada tidak berlaku. Misalnya, kalau along Jragan bisa mendapatkan 7 bagian, maka di saat ngoreng, dia mungkin hanya akan mendapatkan 2 sampai 3 bagian saja. Begitu pula yang lain.

Daokeh tidak akan mendapatkan apa-apa. “Bisa jadi, kalau setiap kali melaut dan dan tidak along, Daokeh bisa Bangkrut dan menanggung hutang yang banyak. Karena kapal selalu butuh dana agar tetap bisa melaut” terang Cenul.

Cenul adalah seorang Belah yang taraf kehidupannya tidak menentu akibat musim ikan yang pasang surut. Menurutnya, nasib tidak mujur bukan sekedar milik Belah tetapi juga Daokeh. Nasib Daokeh sekarang berbeda dengan tahun 90 an. Kalau dulu, orang berlomba-lomba untuk membuat perahu. Karena ikan masih sangat mudah didapatkan. Tidak ada ceritanya Daokeh bangkrut. Tapi sekarang, jangankan untuk membuat kapal baru, untuk mengoperasikan kapal yang sudah ada saja sudah susah. Hal ini karena ikannya sudah tidak ada.

D. Pemasaran;Terjebak Sistem Agen.

Keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berdiri di pintu masuk pelabuhan sangat membantu transaksi antara nelayan dan pedagang. Berapapun jumlah hasil tangkapan, bisa segera terserap dan terjual di tempat tersebut, sehingga tidak perlu banyak memikirkan masalah pemasaran. Para pembeli atau tengkulak pada umumnya berasal dari daerah Kranji dan tetangga desa sekitar. Setelah ikan berada di tangan tengkulak kemudian di jual lagi ke pedagang-pedagang besar yang sudah terbiasa mengantri di lokasi tersebut, atau diantarkan sendiri ke Kota Lamongan, Tuban, Gresik, Surabaya bahkan sampai ke Semarang.

Masalah harga ikan banyak ditentukan oleh para tengkulak, hingga bargaining antara nelayan (*Jragan*) dengan tengkulak tidak berjalan secara kompetitif. Seandainya dijual ke pedagang/tengkulak lain di lokasi atau di luar Kranji semisal TPI Brondong selisih harga antara Rp. 75 s/d Rp. 100 per/kg. Karena persoalan tersebut para nelayan tidak punya pilihan lain kecuali menjual kepada tengkulak yang telah siap membeli berapapun jumlah hasil tangkapan nelayan. Dengan model penjualan seperti ini dirasakan oleh pemilik kapal dan *Jragan* sangat rugi. *Pertama*, karena harga ikan berada di tangan tengkulak yang merupakan kaki tangan dan bermitra pemodal besar dimana hasil *kula'an* ikan masuk ke pabrik pengalengan ikan. *Kedua*, tidak ada dalam kamus model transaksi seperti ini merugikan tengkulak, karena sudah tahu harga yang dipatok oleh pabrik. Sementara kondisi nelayan sebaliknya, pabrik tidak tahu-menahu bagaimana kondisi proses penangkapan ikan yang sulit, yang penting ada ikan, di beli, dan harga ditentukan olehnya.

Permainan harga seperti ini, seolah ada kata sepakat antara petugas yang berada di balik TPI. TPI Kranji dibawah kontrol Pemkab Lamongan dan *leading sector*-nya adalah aparat yang berada di Kecamatan atau Desa. Ketidakkampuan nelayan bargaining soal harga (seolah) sengaja diciptakan oleh unsur-unsur yang berkompeten. Hubungan antara

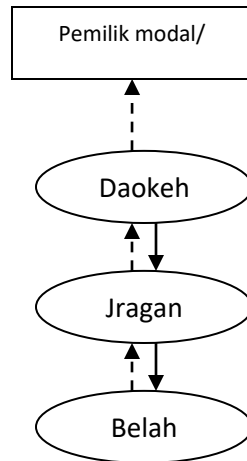
nelayan, tengkulak, dan aparat ibarat benang kusut yang sulit diurai, karena pada satu sisi nelayan membutuhkan TPI untuk mempermudah transaksi hasil tangkapan ikan, karena semakin lama ikan ditahan akan membusuk dan harganya bisa jatuh, sementara satu sisi tidak berdaya dengan permainan harga yang ditentukan oleh sekian gelintir bos-bos besar yang bermain di belakang tengkulak dan/atau aparat penentu kebijakan di daerah ini. Meskipun muncul apologi di kalangan tokoh nelayan, bahwa aparat pun tidak mampu mengatasi benang kusut sistem penjualan ikan melalui agen. Artinya, bahwa sudah ada usaha dari pemerintah daerah untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya melalui lelang, akan tetapi (juga) tidak mampu menghadapi sistem penjualan yang dikendalikan oleh agen.

Sederet pertanyaan muncul di kalangan nelayan; lantas apa fungsi TPI? Ikan tidak dilelang tetapi tetap memungut restribusi yang tidak pernah transparan penggunaannya?

Meskipun ada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), sebagaimana dikatakan oleh beberapa Jragan kapal, tidak banyak membantu. Bahkan hingga sekarang, lembaga ini papan nama saja, tidak memiliki peran yang jelas untuk memecahkan kesulitan nelayan Kranji.

Meskipun tidak semua nelayan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi bisa dikatakan bahwa pada umumnya nelayan Kranji termasuk kelompok masyarakat yang seperti itu. Ketidakberdayaan nelayan tidak saja dialami oleh para Belah (buruh), tetapi sebenarnya juga oleh pemilik alat tangkap, karena pada umumnya masih bergantung pada pemilik modal yang meminjam modal untuk pengadaan alat tangkapnya. Jadi, baik nelayan buruh, Jragan maupun pemilik (Daokeh), sama-sama tidak mandiri. Ketiganya, sama-sama memiliki ketergantungan. Para buruh tergantung pada kebaikan hati Jragan kapal, karena tidak sedikit para buruh yang meminjam uang untuk keperluan keluarganya sebelum pergi melaut, atau sebelum diketahui berhasil tidaknya dalam pencarian ikan. Hal itu dilakukan apabila sewaktu Belah membutuhkannya. Sementara Jragan juga tergantung pada Daokeh (karena sering kali meminjam uang untuk keperluan operasional), sementara Daokeh sendiri juga bergantung pada orang lain (Agen).

Hubungan ketergantungan antara Daokeh, Jragan dan Belah dapat digambarkan sebagai berikut :



Disamping munculnya ketergantungan satu sama lain, juga adanya sistem pembagian hasil tangkapan tidak berpihak pada keseimbangan satu sama lain. Peran Belah yang jumlahnya paling banyak sangat tergantung pada besar-kecilnya hasil tangkapan, jika hasil tangkapan banyak, maka berpengaruh pada hasil mereka, sementara jika hasil tangkapan kecil atau sama sekali tidak mendapat ikan, maka Belah juga tidak mendapat apa-apa. Posisi Belah yang memiliki tanggung jawab sangat berat, tidak seimbang jika prosentase yang didapatkan hanya 2,5 s/d 1,5 % dari jumlah hasil bersih yang diterima. Sementara posisi Jragan juga sangat sulit. Beban biaya operasional perahu dibawah tanggung jawab Jragan, jika hasil tangkapan nihil (ngoreng), maka semua beban biaya operasional menjadi tanggung jawab Jragan untuk menutupinya. Sementara posisi Daokeh juga tidak mudah, karena terkadang biaya operasional yang seharusnya dibawah tanggungan Jragan, sering kali Daokeh menutupi sendiri. Dengan seribu alasan, Jragan kadang tidak mau tahu atas resiko besar yang dihadapi karena pembiayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan. Karenanya, baik Belah, Jragan maupun Daokeh mengalami kesulitan yang sama.

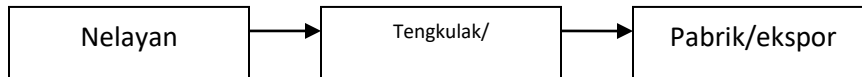
Ketidakberdayaan nelayan juga disebabkan oleh usaha mereka yang sangat bergantung pada alam, yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan tergantung pada kondisi alam yang tidak pasti, maka hasil tangkapannya juga tidak menentu. Sebagai contoh adalah nelayan perahu Kursin, yang jumlah ABK-nya bisa mencapai 25-30 orang. Dalam sekali melaut harus jutaan rupiah dikeluarkan untuk sekedar keperluan solar, minyak tanah untuk lampu, es batu dan akomodasi para Belah. Sementara tidak semua melaut dapat menghasilkan ikan, atau bahkan biaya operasional tidak mampu ditutupi oleh hasil tangkapan.

Sementara itu, munculnya Tempat Pelelangan Ikan sebesar Kranji tidak selamanya memberi jalan keluar terhadap penyelesaian penjualan ikan. Bahkan ada kesan, dengan munculnya TPI, nelayan terjerat oleh adanya keharusan untuk menjual ikan pada tengkulak di tempat tersebut, sehingga mempersempit transaksi dan negosiasi harga. Apalagi ada fenomena, sebelum ikan sampai di darat, para tengkulak melalui tangan kanannya sudah menebar jaring informasi agar ikan tangkapannya jatuh di tangannya. Walhasil, hanya sedikit para nelayan yang

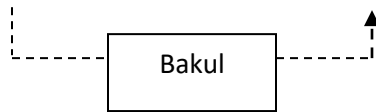
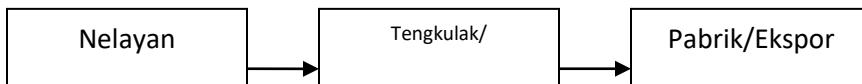
mampu menaikkan daya tawar penjualan ikan, sehingga kesan harga pasaran ikan berada di “kantong tengkulak” memang sulit dihindarkan. Munculnya bakul-bakul kecil di sekitar Kranji juga tidak mampu memberi alternatif penjualan ikan, dan hingga sekarang, bakul tersebut tidak lebih dari “tengkulak bayangan” yang berusaha berlindung di balik baju nelayan kecil.

Berikut model penjualan ikan di TPI Kranji :

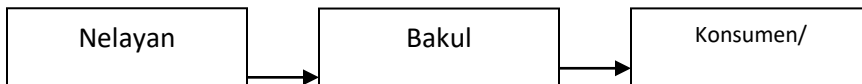
Model 1 :



Model 2 :



Model 3 :



Model 1, pola penjualannya; dari nelayan langsung menjual ikan ke tengkulak berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya, dan/atau berdasarkan transaksi terbuka di pasar. Sementara model 2, nelayan menjual ikan ke tengkulak melalui perantara bakul lokal yang sudah dikenal, kemudian oleh tengkulak dijual langsung ke pabrik. Model 3, adalah model penjualan untuk konsumsi masyarakat. Dari nelayan ke bakul, kemudian bakul mendistribusikan ke pedagang-pedagang kecil, baik yang ada di pasar Kranji maupun di luar Kranji.

Sementara yang diinginkan oleh nelayan adalah adanya lembaga independen yang secara mandiri bisa menghubungkan dengan pabrik, sehingga nelayan tidak merasa dipermainkan atau dirugikan. Kondisi model penjualan ikan nelayan pada sisi ironi sekali, karena di tengah tingginya harga solar dan beratnya beban biaya operasional, mereka masih dihadapkan oleh munculnya bakul/tengkulak yang main mata soal harga ikan di pasaran. Sementara, nelayan tidak banyak alternatif untuk mengatasi penjualan ikan mereka, karena terbentur hutang atau segera menutup biaya operasional yang sangat tinggi. Munculnya TPI sangat membantu penjualan dengan segera, tanpa harus membawa ikan kesana-kemari, tetapi munculnya TPI sekaligus muncul kelompok Agen yang mengambil untung di tengah keterpurukan mereka.

Jika terdapat kebijakan-kebijakan baru yang menuju kesejahteraan nelayan melalui independensi nego penjualan ikan, maka para bakul akan mengatur strategi secara "teratur" dan "kompak" untuk tidak membeli ikan yang penjualnya rewel atau tidak mematuhi aturan agen, sehingga ikan yang berkapasitas berton-ton tidak ada yang menawar dan akhirnya membusuk. Seandainya ikan tersebut dibawa ke TPI lain semisal Weru dan Brondong akan mengalami nasib yang sama, karena pihak TPI lain akan dikontak atau dihubungi terlebih dahulu.

Sementara itu, nelayan sekitar Kranji juga sulit keluar dari sistem penjualan yang berbasis pada jaringan keluarga. Harga ikan dan kemana ikan tersebut dijual ditentukan oleh pengoyor (tengkulak) yang tidak lain adalah keluarga Jragan atau Daokeh. Ketika kapal turun dari laut, pegoyor sudah menghampiri kapal tersebut untuk mengemasi ikan-ikan hasil tangkapan. Sementara, Jragan dan Belah tidak tahu dihargai berapa ikan hasil tangkapan mereka. Baru beberapa hari kemudian, Jragan memperoleh kuitansi dan sejumlah uang dari pengoyor, tanpa mereka tahu ikan tersebut dijual dengan harga berapa ke pihak ketiga atau pabrik. Tidak ada transaksi dan tawar menawar yang sehat antara Jragan dan pengoyor.

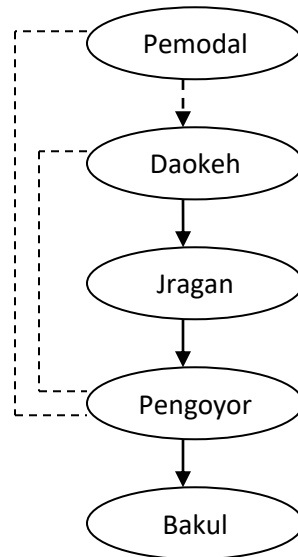
Sistem penjualan seperti ini sangat menguntungkan pengoyor. Dalam sistem penjualan seperti ini, pengoyor tidak mengenal "rugi". Dihargai berapa pun oleh pihak ketiga atau pabrik tidak berpengaruh terhadap penghasilan atau keuntungan transaksi. Karena Jragan tidak tahu menahu. Dalam sistem seperti ini Jragan tidak bisa berkutik dan menyerah dengan keadaan yang (memang) dipaksakan. Karena, Jragan pada umumnya sudah terbelit utang yang mereka pergunakan untuk biaya operasional sebelum melaut, atau sebelum melaut Jragan menutupi sebagian kebutuhan keluarga Belah, dimana uang tersebut diperoleh dari pengoyor.

Ada kalanya pengoyor sekaligus sebagai pemodal dan Daokeh. Misalnya yang terjadi pada nelayan Banjaranyar. Haji Misrun (nama samaran) mempunyai kapal penangkap ikan. Sebelum menyerahkan kapal kepada Saudi (nama samaran) yang bertugas sebagai Jragan kapal, Haji Misrun memenuhi semua kebutuhan melaut termasuk keluarga Belah, yang semestinya menjadi tanggungan Jragan. Setelah beberapa hari di laut dan kembali ke darat, hasil tangkapan langsung diserahkan kepada Pardi, seorang pengoyor yang tidak lain adalah adik kandung Haji Misrun. Tidak ada transaksi harga antara Pardi dan Saudi, sang Jragan kapal. Beberapa hari

berikutnya, Saudi menerima kuitansi dan uang dari Pardi, tanpa mempertanyakan dijual pada siapa ikan tersebut dan berapa harga yang ditransaksikan.

Kasus lain transaksi terjadi di luar hubungan keluarga. Haji Ponirin Kranji, yang berfungsi sebagai Daokeh, pemodal dan pengoyor sekaligus. Sebelum melaut, sang Jragan mengajukan kredit kepada pemodal yang tidak lain adalah Daokeh. Setelah pulang melaut, hasil tangkapan diterima oleh Haji Ponirin yang berfungsi sebagai pengoyor. Seperti kasus yang lain, tidak ada transaksi antara antara Jragan dan pengoyor. Beberapa hari kemudian, Jragan memperoleh kuitansi dan uang dari pengoyor dari hasil penjualan ikan.

Berikut ini gambaran model transaksi jaringan pengoyor.



Pertanyaannya kemudian, siapa yang paling berkuasa (memiliki otoritas penuh) dalam sistem hirarki kenelayan seperti itu, Daokeh, pemilik modal atau Jragan yang berada dalam posisi subordinat? Menurut Dahrendorf, seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok lain. Hal ini berasal tesis Dahrendorf, bahwa masyarakat tersusun tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut *asosiasi yang doordinasikan secara imperatif*.¹³ Dalam konteks ini, hierarki Daokeh sebagai pemilik dan

¹³ Ritzer, Goodman, *Teori Sosiologi Moderen*, 155.

pemegang otoritas penuh dalam sistem kenelayanan tidak selamanya berlaku, karena bisa jadi ia hanya sebagai subordinat dari pemodal besar, atau dirinya sekaligus sebagai pemodal itu.

Kasus hierarki kenelayanan dan mafia pemasaran ikan adalah salah satu wilayah yang sulit ditembus aturan-aturan baru, termasuk di Kranji. Misalnya yang dilakukan oleh HNSI Lamongan tahun 1995 yang pernah memfasilitasi penjualan ikan di TPI dengan sistem lelang, tetapi gagal. Pada tahun berikutnya dinas kelautan juga pernah memfasilitasi lelang dengan cara memberi pinjaman lunak kepada para bakul melalui manajemen TPI tetapi juga gagal, dikarenakan para bakul tidak mengembalikan pinjaman modal. Bahkan HNSI pernah memberi kesempatan pembeli dari luar, upaya inipun juga gagal karena pembeli dari luar membeli ikan dengan harga di atas harga lokal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh permainan pembeli lokal dengan cara menaikkan harga jauh di atas harga yang ditawarkan oleh pembeli luar. Masyarakat nelayan Kranji dapat dikategorikan masyarakat *quasi* semu (kelompok semu). Dalam analisis konflik, masyarakat *quasi* semu adalah masyarakat yang dipaksa oleh suatu keadaan, tetapi tiap-tiap anggota pasrah terhadap sistem yang memaksakan mereka tanpa melakukan perlawanan apa-apa.¹⁴ Masyarakat pasrah pada kewenangan individu yang ekstensif berusaha terus menekan dan mencari keuntungan.

E. Profil nelayan Kranji; H. Roji'un dan Cenuk.

H. Roji'un yang biasa dipanggil oleh orang-orang di sekelilingnya dengan sebutan Kaji Jiun, terlahir di Kranji dari keluarga nelayan. Orang tuanya adalah jragan Puket Ireng. Ia tumbuh di lingkungan nelayan Kranji. Sejak kecil hingga berkeluarga ia tinggal di Kranji. Namun, sejak lebih kurang dua tahun lalu, Kaji Jiun menempati rumahnya yang baru di dusun Genting, Tunggul. Rumah mewah itu terletak di Jalan Deandles, Genting, menghadap ke utara. Di depan rumahnya, berdiri sebuah toko bahan bangunan yang cukup lengkap. Ketika hendak mencari rumahnya, toko bangunan di sebelah selatan jalan raya itu kiranya bisa dijadikan petunjuk.

Kaji Jiun, mulai *miyang* sejak usia belia. Mula-mula hanya ikut sebagai belah biasa, sembari belajar mengemudikan kapal, juga keterampilan-keterampilan lainnya. Hal itu terjadi sampai dia menikah. Beberapa bulan setelah menikah, sang mertua meminjam uang dari bank, sebagai modal membeli perahu Kursin, lengkap dengan peralatannya. Dan sejak saat itulah Kaji Jiun nekad menjadi Jragan. Kaji Jiun tidak ingat betul sejak tahun berapa naik pangkat jadi Jragan. Tapi ia memberikan perkiraan sekitar tahun 1980. Pada saat itu, semuanya berjalan dengan sangat baik dan lancar, hampir tiap hari mendapatkan pemasukan. Hasil tangkapan begitu melimpah, dan tentu hal ini juga berakibat pada penghasilan yang begitu meruah. Kondisi ekonomi juga beranjak membaik.

Dan Kaji Jiun tidak lulus sekolah. "*Pokoe sekolah pondok, tapi gak nutuk*" katanya. Selebihnya, hanya ikut mengaji di pondok pesantren Kranji.

¹⁴ Zainudin Maliki, *Narasi Agung; Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2004), 208.

Dari pernikahannya, Kaji Jiun dikaruniai dua orang putri, dan dua putra. Yang pertama sudah berkeluarga dan mempunyai anak berusia lebih kurang 5 tahun. Putri pertama Kaji Jiun ini adalah lulusan UNITOMO Surabaya, dan sekarang berasama sang suami mengelola toko material yang ada di halaman rumah Kaji Jiun, di Genting. Sementara, anak keduanya juga putri, sementara ini, ialah yang menunggu kios di sebelah timur toko material itu. Di kios kecil itu, dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti rokok, bensin, minuman kemasan dan sebagainya. Anak yang ketiga dan keempat, keduanya laki-laki. Yang satu *Drop Out* saat masih duduk di kelas II SMA di Probolinggo. Dan kini, dialah yang membantu pekerjaan Kaji Jiun melaut. Putera yang terakhir, sekarang masih duduk di kelas II SMA. Sementara istrinya tidak bekerja, hanya di rumah saja. Tapi, kadang membantu anaknya menunggui kios.

Dulu, sejak mempunyai Kursin hingga sekitar dua sampai 3 tahunan yang lalu, cara kerja Kursin Kaji Jiun sama dengan perahu yang lain di Kranji. Semuanya sama dengan perahu kusin umumnya. Perahu dijalankan, ketemu ikan, langsung *tawor* dan pulang. Kadang *ndamar*, kadang juga menggunakan cara lainnya.

Namun, sejak sekitar dua hingga tiga tahun belakangan ini, setelah dirasa cara-cara yang lama tidak terlalu menjanjikan, cara kerja kaji Jiun terbilang berbeda dengan kebanyakan perahu Kursin yang lain. Kaji Jiun bekerja sama dengan orang Blimbing yang mempunyai *Rumpon-Rumpon* di tengah laut. *Rumpon* terbuat dari *blarak* (pelepah / daun kelapa) yang diikat dan dibentuk sedemikian rupa dan diletakkan di laut. Rumpon dibuat sebagai "rumah ikan", sehingga ikan akan kerasan berada di sekitar rumpon tersebut. Ketika ikan sudah banyak berkumpul di sekitar rumpon tersebut, selanjutnya adalah tugas Kursin Kaji Jiun untuk menangkap ikan tersebut. Cara kerjanya persis dengan *ndamar*. Menjelang maghrib, mula-mula beberapa set lampu diturunkan dan dipasang di sekitar rumpon tersebut dengan jarak tertentu. Lalu ditunggu sampai beberapa jam. Ketika sudah dirasa cukup banyak ikan yang berkumpul di sekitar lampu, segera *ditawur* satu persatu. Umumnya dimulai dari sekitar jam 10 malam dan baru selesai saat subuh.

Dan pembagian hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk kaji Jiun. Dan $\frac{1}{3}$ untuk orang Blimbing pemilik rumpon itu. Misalnya, dalam sekali jalan ternyata mendapatkan uang 30 juta, maka 10 juta untuk pemilik *rumpon*. Dan 20 juta untuk Kaji Jiun, untuk kemudian dibagi lagi dengan pembagian yang umum berlaku di Kranji. Mula-mula, uang 20 juta itu dipotong 20 % (4 juta), yang 15 % (3 juta) untuk jragan, dan yang 5 % (1 juta) untuk belah. Sisanya masih 16 juta. Uang 16 juta, dibagi lagi menjadi 2, masing-masing 8 jutaan. 8 juta yang pertama untuk *hak milik bekakas / Daokeh*, dan yang 8 juta lagi dibagi untuk semua orang yang ikut miyang, termasuk di dalamnya sang Jragan. Pembagian ini berdasarkan rumus : jumlah orang yang ikut miyang + 18. (ada juga yang + 20, tergantung peran-peran yang ada dalam perahu tersebut). Misalnya orang yang ikut *miyang* berjumlah 32 orang, maka $32 + 18 = 50$. Jadi uang 8 juta itu dibagi menjadi 50 bagian. 1 bagian adalah 160 ribu. Baru setelah itu uang dibagi kepada seluruh orang yang ikut miyang. Pembagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ada yang hanya dapat 1 bagian, ada yang dapat 2 bagian, dan seterusnya. Jragan, masih mendapatkan jatah 2 bagian dari sini, yakni 320 ribu. Jadi, di samping mendapatkan bagian 15 persen (3 juta) di atas,

(pemotongan awal dari 20 juta, sebelum dibagi), jragan masih dapat lagi 320 ribu. Belum lagi jika sang Jragan merangkap sebagai Daokeh. Tinggal menghitung saja berapa pendapatannya.

Cara pembagian seperti ini baru berlaku ketika *along*. Ketika *Ngoreng*, lain lagi. Malahan cenderung bersifat kekeluargaan.

Dalam sekali jalan, untuk *miyang* dengan cara bekerja sama dengan orang Blimbing yang memiliki Rumpon, Kaji Jiun harus mengeluarkan uang sekitar 2 juta. Uang itu hanya untuk biaya operasional seperti beli solar, minyak tanah, es batu, kaos, jenset, dst. Biasanya, Kursin Kaji Jiun berangkat pukul 10 pagi. Menempuh perjalanan dengan 2 mesin BS 120, sekitar 5 sampai 6 jam menuju rumpon. Dan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai penurunan *damar*, dan seterusnya. Sekitar maghrib, lampu sudah siap semuanya. Dan ABK bisa beristirahat. Baru sekita jam 10 malam, dimulailah penangkapan/tawur. Berakhir menjelang subuh. Kemudian menempuh perjalanan pulang, dan baru sampai di Kranji sekitar jam 11 siang. Hampir 25 jam berada di laut, ketika *miyang* dengan cara seperti ini. Umumnya, jenis ikan yang didapat dengan *miyang* seperti ini adalah ikan layang, kadang juga tongkol, juga ikan lain. Tapi yang banyak adalah ikan layang.

Dengan cara kerja seperti ini pun, tak jarang Kaji Jiun pulang dengan tangan hampa, tanpa hasil meskipun ikannya banyak. Biasanya karena banyak faktor, mulai arus, angin, hujan, atau bahkan nasib sedang tidak mujur. Padahal pengeluaran sudah pasti 2 juta setiap kali jalan. Kadang hanya mendapatkan hasil untuk beli solar saja. Kadang juga malah tekor. Hari-hari ini, sepuluh hari dapat 3 juta saja sudah untung-untungan. "*Damel perbekalan mawon mboten cukup*", katanya. Hanya untuk perbekalan saja sudah tidak cukup. Apalagi dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, hampir 2 bulan Kaji Jiun tidak bisa melaut.

Soal penghasilan lain selain dari nelayan, Kaji Jiun sebenarnya juga masih mempunyai usaha lain, yakni dari toko dan sarang burung walet. Hanya saja, tanggung jawab pengelolaannya bukan pada kaji Jiun sendiri. Toko material yang dikelola anak dan menantunya saat ini, omzet dalam sehari berkisar antara 4 hingga 5 juta.

Usaha perahu Kursin, menurutnya bukan tanpa tantangan, lebih-lebih kondisi saat ini. Kaji Jiun mengeluhkan harga Solar yang melambung tinggi. Saat ini, untuk pergi sekali *miyang* saja, Kaji Jiun membutuhkan uang sekitar Rp. 2 juta. Bila beberapa kali jalan, ternyata tidak mendapatkan penghasilan, yang terjadi adalah *tekor*. 2 juta sudah pasti habis, sedangkan penghasilan belum tentu. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi problem tersendiri bagi nelayan. Soal berkurangnya ikan, memang ada pengaruhnya juga. Tapi, bagi kaji Jiun pribadi, hal itu sudah tidak menjadi problem utama. Sebab, dengan kerja sama dengan pemilik Rumpon, kelangkaan ikan agak teratasi, meskipun harus mengeluarkan biaya tinggi.

Memang kelangkaan ikan akhir-akhir semakin parah. Bila dibandingkan dengan tahun 80 an, keadaannya sungguh sangat jauh berbeda. Dulu ikan melimpah ruah. Sekarang sudah tidak ada. Dulu, *ngamen* ke Jepara dalam waktu 15-17 hari saja, sudah mampu membawa pulang uang sebanyak 150 juta bersih. Sekarang, tidak lagi demikian. Itu semua disebabkan karena salah

manusianya sendiri. Orang *miyang* dengan cara yang salah, menggunkan *troll* yang mengakibatkan sarang ikan rusak.

Karena beberapa sebab tersebut, beberapa waktu lalu kaji Jiun menjual dua perahunya. Memang bukan perahu miliknya sendiri, karena *patungan* dengan orang lain. Keputusan penjualan perahu itu karena perahu tidak menyumbang dana pemasukan sama sekali, tapi justru malah memberatkan. Kini, Kaji Jiun masih memiliki 1 buah Kursin.

Terkait dengan model rumpon sebagai salah satu cara untuk memperoleh ikan, Kaji Jiun punya gagasan menarik. Sebenarnya sudah ada usaha yang ditempuh pemerintah daerah Lamongan tahun 2007 lalu. Pemda membiayai pembuatan Rumpon-Rumpon di laut Lamongan. Rumpon-Rumpon itu diletakkan tak jauh dari bibir pantai, kurang lebih hanya 1 mil dari pantai. Di wilayah Kranji dan sekitarnya saja, tahun lalu mendapatkan uang sekitar 180 juta. Namun, pada praktiknya kini Rumpon-Rumpon itu sudah banyak yang rusak diterjang ombak. Dan karena Rumpon sudah rusak, yang tersisa hanyalah tinggal batunya saja. Batu-batu itu kerap mengganggu para nelayan. Kadang, jaring tersangkut di batu tersebut, sehingga malah merugikan nelayan.

Selain jragan Kaji Ji'un, juga ada Cenul, seorang Belah yang hidupnya kembang kempis. Cenul mulai menerjuni pekerjaan *melaut* semenjak ibunya sembuh dari sakit sekitar bulan Agustus tahun 2004. Sejak saat itulah, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya lagi, dan terjun menggeluti profesi nelayan. Dia mula-mula hanya sebagai *Belah* biasa. Tapi kini, dia mendapatkan tugas tambahan sebagai pembuang dan penarik *Ring* (timah beban agar jaring bisa tenggelam dalam waktu singkat). Dan karena tugas tambahan ini, tentu dia mendapatkan imbalan penghasilan yang lebih besar.

Cenul (Husnul Arif) lahir di Desa Kranji kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada tanggal 06 Oktober 1983 dari ibu bernama Aslihah dan ayah bernama Mujud. Sejak kecil, dia tinggal di Kranji. Sesekali, ketika sekolah sedang libur, Cenul kecil diajak sang ayah pergi ke Jepara untuk berlibur. Ketepatan, di sana juga ada famili. Sang ayah pun sebenarnya memiliki istri kedua di Jepara. Cenul tumbuh sebagai anak yang cerdas dan pintar. Sejak duduk di kelas I Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Tsanawiyah, dia sering mendapatkan hadiah pada acara *Muwaddaah* (perpisahan pelepasan kelas akhir) di akhir tahun pelajaran karena dia mendapatkan ranking 1 di kelasnya.

Cenul juga aktif di berbagai kegiatan kesiswaan, kepemudaan, dan sosial. Selama sekolah di MTs maupun di MA dia selalu aktif dalam OSIS. Di rumah pun, dia juga aktif sebagai aktifis di mushollanya yang pada saat-saat tertentu mengadakan kegiatan keagamaan semisal peringatan maulid Nabi. Dia juga aktif di IPNU, terakhir dia menjabat sebagai ketua ranting IPNU desa Kranji untuk periode 2004-2005. Cenul bahkan aktif juga pada kegiatan Kepramukaan. Selama duduk di bangku Madrasah Aliyah, dia tercatat sebagai pembina Pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatut Tholabah Kranji.

Seperti anak yang lain, Cenul mulai bersekolah di Raudlotul Athfal (setingkat TK) yang dikelola oleh Muslimat NU Kranji. Setelah itu, berlanjut di MI, MTs, hingga MA Tarbiyatut Tholabah. Seluruh jenjang itu dilewatinya dengan sangat lancar, dan tidak pernah tinggal kelas. Masalah yang selalu muncul saat dia bersekolah hanyalah masalah pendanaan. Orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya, beruntung Cenul mendapatkan bantuan beasiswa dari lembaga penyantun / donatur yang diketuai oleh Bapak Ali Syamsuri. Cenul adalah satu-satunya (dalam keluarganya) yang pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah. Baik kakak maupun adiknya, maksimal hanya bersekolah sampai pada Madrasah Tsanawiyah. Malahan, kakak tertuanya tidak lulus MI, baru kelas empat sudah putus sekolah. Cenul bahkan sempat mengikuti kuliah di STAI Sunan Drajat Kranji Paciran Lamongan, namun karena kendala pendanaan, akhirnya dia berhenti pada semester II. Maklum, tidak ada donatur yang mau membiayai kuliahnya seperti dulu ketika masih duduk di bangku MI hingga MA.

Cenul adalah anak ke-4 dari 6 bersaudara, yang terdiri dari 1 putri dan 5 putra. Kakaknya yang kedua (putri) sudah menikah dan dikaruniai seorang anak berusia 6 tahun. Kakak yang pertama telah menikah bulan Ramadhan lalu. Kini istrinya sedang mengandung, dan diperkirakan akan melahirkan bulan depan. Tapi sayang, kakaknya yang pertama ini tidak lagi mau bekerja dengan alasan yang sulit untuk diterima akal. "Dulu, ketika kalian masih kecil-kecil, saya yang bekerja untuk menanggung biaya hidup serumah. Kini kalian sudah besar-besar, maka giliran kalian yang bekerja" begitu kata Cenul menirukan kata-kata kakaknya. "Saya gak ngerti jalan pikirannya, padahal dia kan udah mau punya anak" begitu keluh Cenul pada suatu kesempatan.

Kakaknya yang ketiga tidak demikian. Menurut Cenul, kakaknya yang satu ini bisa diajak ngomong. Bersama kakaknya ini, juga adiknya yang kelima, (bertiga dengan Cenul) mereka bahu-membahu bekerja untuk menanggung biaya hidup satu rumah yang terdiri dari 7 orang (Cenul, kakak dan adiknya yang bekerja, kakak yang pertama dan istrinya, ditambah ibu dan adik bungsu yang masih duduk di kelas VI MI). Ketiganya melaut (*Melaut*), dan tak jarang ketiganya pulang tanpa membawa uang. Padahal, sumber penghasilan satu-satunya hanyalah dari *melaut*. Cenul akan merasa susah apabila dalam 5 kali pergi melaut, dia tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. "*Iga onok maneh sing ditoleh (Ga ada lagi yang ditengok untuk mendapatkan rizki [pen.]*" begitu katanya.

Kalau ditanya tentang berapa nominal penghasilan seorang nelayan selama sebulan, rata-rata siapapun orangnya akan kesulitan menjawab. Begitu juga dengan Cenul, menurutnya jumlah nominal penghasilan nelayan sulit ditentukan. Hal ini karena pekerjaan melaut tergantung pada alam (cuaca, angin, hujan dll) yang menentukan melaut dan tidaknya sebuah perahu. Ada lagi sebab lain, yakni ketersediaannya modal untuk membeli solar. Selain dua penyebab itu, penyebab yang lain adalah ketidak-pastian penghasilan nelayan itu sendiri. Meskipun jadi berangkat melaut, tidak ada jaminan sama sekali akan pulang dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Ikan sudah susah sekali ditemui, walaupun bisa menemukan ikan, belum tentu juga bisa menangkapnya. Tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa. "Dari sepuluh kali pergi melaut, 6 kali dapat ikan sudah sangat bagus. Itupun sering kali *ngoreng*

dari pada *along*. Yang empat kali, ga dapat ikan sama sekali” begitu penjelasan yang diberikan Cenul saat dimintai keterangan. “Kalau ngoreng, ya paling-paling hanya berkisar antara 5 – 15 ribu per melaut” begitu imbuhnya.

Sama halnya dengan penghasilan yang tidak tentu, nelayan yang menggunakan perahu Kursin pun tidak bisa melaut setiap saat mereka mau. Keputusan *melaut* dan tidaknya sebuah perahu Kursin selain ditentukan oleh cuaca, juga ditentukan oleh adanya modal untuk membeli solar (BBM). Jika cuaca baik, dan solar tersedia, perahu Kursin yang diikuti Cenul bisa pergi melaut setiap hari. Tapi jika tidak, maka gak tentu lagi.

Mengenai lama waktu nelayan Kranji berada di laut kalau dirata-rata, nelayan Kranji berada di laut hanya sekitar 7-12 jam per sekali melaut, bisa kurang dan bisa pula lebih. Semua tergantung pada ketersediaan bahan bakar dan banyaknya ikan. Kalau baru pergi melaut sehabis shubuh, dan jam 6 sudah dapat ikan banyak, spontan mereka akan pulang. Kalau sudah lama melaut dan belum juga dapat ikan, sedangkan solar masih tersedia, maka bisa jadi akan terus berada di laut samapai habisnya persediaan solar. Lain halnya nelayan dari Brondong / Blimbing, mereka bisa sampai 10 hari bahkan 15 hari berada di laut tentu saja dengan persiapan yang lebih baik dari nelayan Kranji. Paling lama, nelayan Kranji berada di laut hanya semalam saja.

Nelayan perahu Kursin khususnya dan nelayan yang lain pada umumnya, menghadapi problem parah pada pengadaan BBM. Untuk pergi sekali *melaut*, mereka membutuhkan uang sekitar Rp. 400 ribu hingga 1 juta. Tergantung pada jarak tempuh dan lama waktu berada di laut. Semakin jauh dan semakin lama berada di laut, maka semakin banyak solar yang dibutuhkan. Dan untuk menyasati agar mereka bisa melaut terus, rata-rata mereka meminjam uang baik dari Daokeh maupun dari Agen. Namun, hal ini ternyata bukan solusi yang tepat. Sekarang, Agen sudah tidak berani berspekulasi lagi dengan memberikan pinjaman modal untuk mereka.

Tak heran jika telah banyak Kursin yang tidak lagi beroperasi karena mereka kehabisan modal, dan tidak ada pihak yang berani berspekulasi dengan memberi pinjaman modal kepada mereka. Cenul mengatakan : *“Rata-rata, perahu Kursin di sini sudah mempunyai hutang kurang lebih 20 juta, malahan ada yang sampai 60 juta. Semua itu hanya untuk membeli solar. Bayangkan, solar udah hutang, ketika melaut gak dapat. Kalau sekali, dua kali gak apa-apa, lha kalau terus-terusan, apane gak nunggak akeh”*.

Problem selanjutnya adalah sudah jarangny ikan yang ada di laut. Bila dibandingkan dengan keadaan pada awal-awal 90 an, keadaannya sungguh sangat berbeda. Dulu ikan bisa ditemui dan didapatkan dengan sangat mudah. Tapi kini, menemui ikan saja sudah sangat susah. *“Bagaimana bisa menangkap ikan. Lha wong ikannya gak ada, saya kira penyebabnya utama karena rusaknya ekosistem laut, disamping banyak nelayan lain menggunakan troll”* begitu katanya. Kelangkaan ikan ini menurutnya terjadi karena ada oknum nelayan yang *mengetroll* dalam menangkap ikan.

Keseharian Cenul dan keluarganya tinggal di rumah kecil menghadap ke barat berukuran ± 6 X 5 meter yang berdinding bambu (jawa : *gedhek*). Rumah tersebut disekat menjadi 3 ruang.

Ruang tamu, kamar tidur dan raung belakang. Praktis tidak ada barang mewah dalam rumah tersebut kecuali TV berwarna berukuran 14 inch yang gambarnya sudah tidak bisa dinikmati dengan nyaman karena layarnya selalu bergerak-gerak. Di depan rumah Cenul, ada rumah gedong yang cukup besar. Begitu juga di belakang rumahnya, berdiri sebuah rumah terbuat dari beton. Katanya punya orang yang suaminya bekerja di Malaysia. Di seBelah selatan rumah Cenul, berdiri rumah yang mirip dengan rumah Cenul, terbuat dari *gedhek* juga. Bedanya, rumah itu ukurannya lebih besar dari rumah Cenul.

Dari tujuh orang penghuni rumah tersebut, tiga di antaranya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Selebihnya menganggur. Dulu, ibu Cenul pernah berjualan jajanan anak kecil. Tapi semenjak sakit, hal itu tidak dilakukan lagi. Praktis, ibu Cenul dan menantunya hanya tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Sayangnya, dari ketiga orang yang bekerja, tidak semua penghasilan mereka diberikan pada keluarga. Kakak, adik dan Cenul sendiri masih menyisakan penghasilannya untuk biaya ngopi di warung dan untuk merokok. Namun, dengan penghasilan yang tidak tentu itu, Cenul masih bisa ikut arisan 20 ribu per 10 hari dengan susah payah. Tujuannya agar dia bisa menabung untuk melunasi hutang biaya pengobatan ibunya yang tahun 2004 lalu sakit dan dioperasi.

Selain biaya untuk keperluan sehari-hari, ngopi dan membayar arisan, tidak ada biaya lain yang ditanggungnya. Untuk biaya pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku MI pun, Cenul sudah tidak memikirkan lagi, karena selama ini SPP ditanggung oleh donatur. Hanya pas akan ujian saja, dan juga untuk biaya buku pembelian buku.

Cenul sebenarnya bukan orang yang tidak memiliki obsesi. Dia mengaku, Melaut hanyalah pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa. Sebenarnya dia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pergi ke Surabaya atau Jakarta bahkan Malaysia untuk mengadu nasib, namun karena pertimbangan orang tua yang sudah sering sakit-sakitan, akhirnya Cenul mengurungkan niatnya. *“Andai saja ada pekerjaan lain yang lebih baik dan tidak perlu pergi jauh meninggalkan orang tua, saya pasti akan menerimanya. Mungkin dengan dibukanya beberapa Proyek yang ada di Pantura ini, saya akan mencoba melamar pekerjaan. Tapi saya gak yakin”* begitu katanya.

BAB III

PEREMPUAN NELAYAN

A. Peran Perempuan Nelayan; Sektor Domestik dan Publik.

Kawasan Pantai Utara Lamongan dikenal sebagai kawasan muslim taat yang sebagian besar penduduknya adalah santri. Yang dimaksud santri dalam masyarakat Jawa adalah masyarakat yang secara konsisten dan teratur melaksanakan pokok-pokok peribadatan yang telah di atur dalam agama Islam, misalnya melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan romadlan atau puasa lain yang dianjurkan dalam Islam, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji serta melaksanakan perintah-perintah lain dalam Islam. Sebagai lawan dari komunitas santri, di Jawa mengenal kaum abangan, yaitu mereka yang memeluk Islam tetapi nuansa Kejawen atau sinkretiknya masih sangat kuat.¹⁵

Geliat kehidupan keagamaan semakin terlihat jelas dalam kehidupan perempuan. Simbol-simbol keagamaan begitu kental dalam kehidupan keseharian mereka, seperti pemakaian jilbab, pengajian rutin atau kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan. Nuansa seperti itu akan lebih terasa dalam kehidupan masyarakat pesisir Pantura. Seolah tiada hari tanpa kegiatan keagamaan.

Di balik kehidupan keagamaan yang kuat, mereka juga perempuan pekerja keras. Keseharian kehidupan perempuan pesisir (nelayan) dipenuhi oleh aktifitas. Hanya sedikit diantara mereka yang menganggur pada jam-jam di luar aktifitas rutin sebagai ibu rumah tangga. "Perempuan santri" yang diidentikkan dengan orang rumahan atau selalu menggantung kepada suami akan terlihat berbeda di kawasan komunitas pesisir. Seolah tidak mau kalah dengan suami atau laki-laki, mereka mencari kesibukan lain untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga atau sekedar mencari tambahan uang jajan putera-puterinya melalui aktifitas yang produktif.

Setiap hari, Pasar Kranji dipenuhi oleh kaum perempuan yang berjejal di setiap ruang untuk berjualan. Sementara di sebelahnya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak luput dari peran perempuan. Pada momen-momen *along* (musim ikan), perempuan separuh baya banyak berkeliaran di areal TPI yang berprofesi sebagai tukang angkut ikan dari perahu ke TPI atau menuju kendaraan yang akan mengangkut ikan. Sementara itu, diantara para penimbang atau *pengoyor* (tengkulak) terdapat beberapa perempuan yang bekerja. Di perkampungan desa, ditemui beberapa aktifitas yang berhubungan dengan urusan kenelayanan atau aktifitas lain produktif; mulai membuat kue kering, ikan panggang (iwak-iwakan) kue ikan, dan jualan mracang. Perempuan berperan di sektor publik tidak saja ditemui saat ini, dimana kondisi ekonomi makro terlihat lebih baik dari sebelumnya. Pada zaman kolonial, perempuan pesisir Kranji sudah dikenal perempuan mandiri dan selalu beraktifitas di luar jam-jam rutin sebagai ibu rumah tangga.

Sosok perempuan pekerja keras terlihat dari kaum muda hingga tua. Misalnya bu Asrifah. Tiap hari dia keliling kampung berjualan nasi bungkus. Selain membantu suami yang berprofesi sebagai nelayan, dia juga tidak mau kalah dengan tetangga yang lain yang

¹⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, ter. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 6-7.

memanfaatkan waktu senggangnya untuk bekerja. Selain nasi bungkus, Asrifah juga mempunyai usaha krupuk yang ia rintis beberapa tahun yang lalu. Sementara bu Saroh, selain bekerja di Pasar Kranji juga memiliki usaha pembuatan krupuk ikan yang dikerjakan secara patungan dengan adiknya. Hasil dari pekerjaan tersebut digunakan untuk membantu suami yang bekerja sebagai sopir.

Aktifitas perempuan nelayan ini sedikit menyita waktu bersama keluarganya. Misalnya bu Asrifah sudah terbiasa bangun jam 12.00 malam untuk menyiapkan masak untuk keperluan jualan nasi, dan sekaligus mempersiapkan untuk produksi krupuk. Aktifitas tersebut dia lalui hingga siang hari, jam 12.00. Yang membuat dia terbebani, ketika jualan nasi tidak laku, sehingga akan merugi.

Berikut ini gambaran kegiatan bu Asrifah :

Waktu	Aktifitas
24.00– 03.00	Bangun malam untuk keperluan memasak nasi yang akan dijual pagi hari serta mengaduk bahan baku krupuk. Kegiatan selanjutnya adalah pengopenan.
03.00 – 05.00	Menyiapkan keperluan suami dan anak-anaknya. Bila suaminya berangkat ke laut pagi hari, maka dia memasak lebih awal. Tetapi bila sore hari, dia hanya menyiapkan makan pagi seadanya.
05.00 – 06.30	Pekerjaan mengiris (memotong) krupuk. Biasanya dibantu oleh anggota keluarganya yang lain. Selanjutnya dijemur di halaman rumah (tetapi bila musim hujan, jarang dia lakukan).
06.30 – 09.00	Keliling kampung untuk menjajakan nasi. Selain itu, dia juga memiliki beberapa langganan yang jumlahnya cukup banyak.
09.00 – 11.30	Berangkat ke pasar untuk menyeter krupuk pada pelanggan tetap, serta berbelanja untuk keperluan hari berikutnya. Bahan baku ikan dia dapatkan dari TPI atau sisa ikan yang dibawa oleh suaminya dari laut.
	Istirahat
11.30 – 13.00	Beraktifitas ringan di rumah, sambil menjaga krupuk yang dijemur serta memasukkan krupuk (ngepak) yang kering ke dalam karung plastik.
13.00 – 17.00	Berada di rumah untuk membantu anaknya mengerjakan PR sambil mengupas bawang putih dan bahan baku untuk keperluan esok harinya.
17.00 – 20.30	Tidur malam hari.
20.30 – 24.00	

Krupuk ikan merupakan salah satu *home industry* di kawasan Kranji. Masyarakat yang memiliki usaha krupuk sangat terbatas. Selain bu Asrifah, masih ada 20 perempuan lain yang memiliki usaha tersebut. Produksi krupuk dilakukan pada waktu malam hingga siang hari. Proses pembuatan krupuk pada umumnya dimulai dari jam 11.00 malam. Proses *pertama* adalah mencampur bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan pengopenan yang memakan waktu 1 jam. Setelah subuh kemudian dilanjutkan kegiatan mengiris (memotong) dengan menggunakan alat yang sangat tradisional. Ketika matahari mulai keluar dari ufuk timur, kemudian dilanjutkan dengan penjemuran. Kegiatan dalam rumah berakhir sampai jam 09.00 pagi. Setelah itu dilanjutkan ke pasar yang jaraknya 0,5 km dari rumah mereka, untuk menjual krupuk hasil buatan mereka kepada tengkulak atau pedagang yang sudah siap untuk membelinya. Setelah penjualan kopuk selesai kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan bahan baku yang akan diproduksi sore harinya, yang terdiri dari ikan, tepung, bumbu dan penyedap rasa. Mereka baru pulang dari pasar sekitar jam 10.30 siang, setelah krupuk yang mereka jual sudah diterima oleh para pembelinya.

Jam kerja perempuan Kranji tergantung kepada jumlah dan jenis pekerjaannya. Bu Tasmiyatun misalnya, dia mulai start bekerja jam 23.00 malam hingga siang hari, ketika orang pada umumnya sedang tidur, justru dia bersama anggota keluarga bekerja membuat krupuk. Karena jumlah produksinya cukup besar, maka dimulai jam 23.00 malam. Berikut ini aktifitas rutin Bu Tasmiyatun :

Waktu	Aktifitas
23.00 – 02.00	Bangun malam untuk mengerjakan pengirisan krupuk. Biasanya dibantu oleh suaminya.
02.00 – 03.00	Istirahat.
03.00 – 04.00	Menjemur krupuk pada malam hari. Kegiatan ini dilakukan hingga subuh.
04.00 – 06.00	Memasak untuk keperluan makan pagi, bersih-bersih rumah, dan mengurus putera-puterinya untuk berangkat sekolah.
06.00 – 08.00	Mengemas krupuk yang akan dibawa ke pasar. Karena menggunakan tangan, proses pengemasan memakan waktu yang cukup lama.
9.00 – 11.00	Pergi ke pasar Kranji yang jaraknya 0,5 km untuk menjual hasil krupuk pada pelanggan rutin. Mereka umumnya para pedagang (tengkulak) yang mempunyai toko di pasar Kranji. Pada saat menjula hasil krupuk, mereka sekaligus berbelanja untuk keperluan esok harinya di tempat yang sama.
	Istirahat siang.
11.00 – 13.00	Beraktifitas ringan sambil menjaga krupuk yang jemur (dikeringkan)
13.00 – 17.00	Setelah maghrib biasanya mengikuti kegiatan kampung atau pertemuan

	dengan kelompok krupuk.
17.00 – 19.00	Menyiapkan bahan untuk diaduk, mengiris bawang putih dan menyiapkan segala sesuatu untuk pekerjaan produksi krupuk.
19.00 – 20.30	Tidur
20.30 – 23.00	

Berbeda dengan Tasmiyatun yang dibantu oleh keluarga (suami), mBah Karmi (80 tahun) yang hidup menjanda selama beberapa tahun mobilitas hidupnya tidak lagi sekuat teman-temannya yang lain. Usaha krupuk yang dilakukan mBah Karmi sudah sejak tahun 1953 yang hingga kini masih eksis. Karena tidak ada aktifitas lain yang dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari, lebih-lebih setelah dirinya menjanda. Meskipun usahanya kecil dengan penghasilan Rp. 10.000,00/hari, kegiatan tersebut terus dilakukan hingga usia senja seperti sekarang. Selain mBah Karmi, masih terdapat 7 janda lain yang mengantungkan hidupnya dari usaha krupuk dengan usia rata-rata di atas 65 tahun.

Beikut ini adalah aktifitas rutin mBah Karmi :

Waktu	Aktifitas
02.00 – 04.30	Bangun bagi untuk mempersiapkan pengolahan (mengaduk) dan dilanjutkan dengan pengopenan yang berlangsung satu setengah jam.
04.30 – 06.00	Shalat subuh dan memasak untuk keperluan sarapan pagi (mBah Karmi sering dibantu oleh cucu-cucunya). Kegiatan pengirisan (memotong) krupuk dilakukan pada jam-jam ini dengan menggunakan peralatan tradisional.
06.00 – 08.30	Kegiatan penjemuran. Karena terbatasnya lahan dan terganggu apabila musim hujan tiba, kegiatan pengeringan sering kali terhambat yang dapat mengganggu siklus produksi.
08.30 – 11.00	Ke pasar untuk menjual hasil krupuk yang sudah dimasukkan ke dalam karung plastik dengan bobot 0,5 kg hingga 1 kg. Untuk penjualan mBah Karmi dibantu oleh putrinya sendiri dibantu oleh cucu-cucunya. Pembelian bahan baku dilakukan pada saat mereka berada di pasar, khususnya tepung dan bahan baku ikan segar.
11.00 – 16.00	Istirahat sambil beraktifitas kecil-kecilan seperti mengupas bawang putih, menjaga pengeringan krupuk dan ngepaki krupuk yang sudah kering.

Dari 20 usaha krupuk ikan yang menjadi dampingan BP2M, sebagian besar dilakukan oleh kalangan keluarga sendiri. Apabila suami mereka menganggur, juga terlibat dalam produksi krupuk, demikian pula anak-anak mereka juga terlibat dalam produksi. Sementara produksi yang kapasitasnya di atas 50 kg/hari, mempekerjakan tenaga harian yang berasal dari tetangga-tetangga mereka, dengan upah 7500 hingga 12.500 per hari, tergantung jam kerja dan jumlah yang diproduksi.

Sebagian besar hasil produksi krupuk mereka dijual di pasar Kranji, tapi juga ada yang sampai di Payaman dan Tuban sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Saroh dan Bu Tasmiyatun. Sementara sistem penjualannya adalah sistem titip. Para pedagang akan membayar setelah barang (krupuk) yang dititipkan laku terjual. Model seperti ini dianggap sebagai pilihan terakhir, sebab sangat sulit menjual dengan bayar *cash*, karena sirkulasi keuangan dari *buyer* juga seperti itu. Hal ini tentu saja menjadi keluhan, karena banyak produksi mereka macet karena tidak ada modal untuk membeli bahan baku baru.

Sebelum muncul Tasmiyatun dan Asrifah Cs, usaha krupuk Kranji sudah berjalan cukup lama, bahkan mBah Karmi salah satu dampingan sudah memproduksi sejak tahun 1950 yang hingga kini masih terus eksis. Dari 20 keluarga yang membuka usaha krupuk ikan, semuanya dikelola oleh istri atau ibu-ibu yang sebagian besar istri para nelayan.

Terdapat 20 keluarga yang membuka usaha krupuk ikan. Dari 20 keluarga tersebut dibagi ke dalam empat kategori; *pertama* usaha yang sudah mati (gulung tikar) karena ketiadaan biaya, kelompok *kedua*, yang masih coba-coba yang memproduksi maksimal 2-5 kg/hari, atau bahkan dilakukan secara *sa'ena'e*. Kelompok *ketiga*, adalah kelompok eksis yang jumlah produksinya sudah mencapai antara 10-17 kg/hari. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling banyak. Sementara kelompok *keempat* adalah kelompok yang kapasitas produksinya antara 50-75 kg/hari.

Keterlibatan perempuan dalam urusan ekonomi pada awalnya karena keterpaksaan. Suami mereka yang sebagian menjadi nelayan tidak bisa diandalkan lagi. Bila dalam satu bulan pergi melaut sepuluh kali dan memperoleh hasil, sebenarnya sudah cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Tetapi dalam sepuluh kali melaut hanya lima kali yang memperoleh hasil, sisanya belum pasti. Sisi lain, pergi melaut ditentukan oleh faktor musim. Jika musim ngoreng tiba, maka tidak ada pilihan lain bagi nelayan kecuali menganggur atau bekerja apa adanya, seperti buruh tani, ikut proyek atau jualan keliling untuk menutupi kebutuhan keluarga. Banyaknya nelayan yang beralih profesi disebabkan oleh makin beratnya beban kebutuhan keluarga jika hanya mengandalkan dari profesi nelayan. Apalagi sebagian besar nelayan Kranji sebagai Belah (buruh) di kapal/perahu, bukan sebagai pemilik.

Selain mempunyai usaha produktif, perempuan Kranji juga sibuk berorganisasi di tingkat kampung. Pada malam hari, mereka masih disibukkan mengurus jami'yyah Muslimat NU atau 'Aisiyah, dua organ yang berinduk pada NU dan Muhammadiyah.

Masyarakat Kranji terbelah menjadi dua aliran keagamaan, keduanya memiliki jamaah sama-sama besar. Tapi meskipun demikian mereka hidup berdampingan secara damai. Selain kegiatan keagamaan, kaum perempuan juga beraktifitas di organisasi desa semisal Posyandu dan PKK.

B. Sektor Informal Yang Stagnan; Kasus Krupuk.

Usaha krupuk Kranji merupakan usaha alternatif yang dilakukan oleh ibu-ibu istri para nelayan di tengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga. Hingga kini, ada 20 keluarga yang secara turun-temurun menekuni bidang ini, yang secara ekonomis menguntungkan. Meskipun usaha *home industry* dilakukan secara tradisional, tetapi cukup membantu denyut nadi ekonomi mereka, khususnya para janda yang sudah ditinggal suaminya.

Rintisan krupuk pertama kali dilakukan oleh bu Karmi tahun 1950-an, sebagai alternatif atas usaha suaminya yang kembang-kempis sebagai buruh nelayan. Lambat laun usaha ini diikuti oleh para ibu-ibu yang secara kebetulan mengalami nasib sama, yakni para suami mereka tidak mampu menutupi kebutuhan ekonomi keluarga karena hasil *miyang* tidak bisa diandalkan. Belakangan usaha ini banyak yang ditiru, bahkan mampu eksis di tengah keterpurukan nasib nelayan karena semakin menipisnya cadangan ikan di laut.

Pembuatan krupuk ikan relatif mudah, karena bahan baku ikan mudah didapat. Sebagian ibu-ibu memanfaatkan pembagian hasil ikan tangkapan suami mereka sebagai bahan dasar krupuk. Sementara apabila tidak *miyang*, ibu-ibu dengan mudah membeli bahan baku di TPI yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara tepung kanji mereka dapatkan di pasar dengan cara model *barter* dengan krupuk hasil buatan ibu-ibu. Cara barter seperti ini mempermudah sirkulasi bahan baku, dan sekaligus memperlancar penjualan.

Home industry krupuk merupakan usaha alternatif bagi ibu-ibu nelayan untuk mencari membantu ekonomi keluarga yang kembang kempis. Meskipun antara tenaga, biaya dan hasil tidak seimbang, tapi bagi mereka usaha krupuk sudah cukup membantu denyut ekonomi keluarga. Ibu Habibah (60 tahun) misalnya. Setelah menjanda, praktis tanggung jawab ekonomi keluarga berada di tangannya, padahal ia harus menyekolahkan anak-anaknya yang masih kecil. Bu Habibah mulai membuat krupuk ikan sejak tahun 1984. Awalnya coba-coba, tapi karena tuntutan ekonomi, usaha tersebut harus dijalani dengan segala keterbatasan. Penghasilannya tiap hari tidak lebih dari Rp. 10.000 dari 10 kg yang ia produksi. Aktifitasnya dimulai sejak jam 02.00 malam, ketika sebagian besar orang masih terlelap tidur. Dia mulai dengan mengupas ikan, membuat racikan, dan kemudian mencampur dan mengaduk sesuai dengan resepnya. Setelah itu kemudian di masukkan ke dalam oven yang terbuat dari panci aluminium. Setelah subuh dilanjutkan dengan mengiris krupuk dengan menggunakan alat iris tradisional yang ia beli, dan kemudian dimodifikasi bersama teman-temannya. Aktifitas itu berlanjut hingga jam 07.00 pagi saat mulai menjemur krupuk hasil buatannya. Pada jam 08.00 hingga jam 10.00, dipergunakan untuk membawa hasil krupuk yang sudah jadi untuk dijual di pasar Kranji. Bu

Habibah baru pulang dari pasar jam 10.30 dengan membawa sebagian uang hasil jerih payahnya, sekaligus membelanjakan uang tersebut untuk menyediakan bahan baku krupuk yang akan diproduksi pada hari berikutnya.

Kegiatan rutin Bu Habibah juga dijalani serupa oleh beberapa ibu yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ketika di rumah, pekerjaan tersebut digarap secara gotong royong oleh anggota keluarga, yang terdiri dari anak, cucu, mantu, dan suami (jika ada).

Profil Perempuan Nelayan Kranji (Usaha krupuk dan bidang lain)

No	Nama	Umur/ Status	Pekerjaan .suami	Anak/ Tanggung	Mulai usaha	Produksi kg/hari	Penghasil an bersih
1	Karmi	80/janda	-	3/1	1950	12,5	10.000
2	Kaslihah	70/janda	-	3/2	1971	20	20.000
3	Sunami	69/janda	-	-	-	10	5.000
4	Romlah	66/janda	-	7/2	1980	10	10.000
5	Habibah	57/janda	-	3/2	1984	10	7.000
6	Kunati	47	Nelayan	5/6	2000	16-20	20.000
7	Munikar	46	Perangkat	3/4	-	-	-
8	Aminah	45	Nelayan	3/4	1990	10	10.000
9	Siti Saroh	42	Sopir	2/4	2002	50-75	25.000
10	Tasmiyatun	40	Nelayan	3/5	1985	50-75	30.000
11	Asrifah	41	Nelayan	5/8	1982	15	15.000
12	Itawala	36	TKI	4/7	1993	10	10.000
13	Nikmah	34/janda	-	-	1995	15	15.000
14	Khusnun Nihayah	30	Guru	2/4	2003	10	10.000
15	Masriah	30	Guru	2/4	2000	10	12.000
16	Minsuswati	34		1/2	2003	10	12.000
17	Arifah	38	Nelayan	2/4	2000	5-10	15.000
18	Qomaroh	42	Nelayan	5/2	2000	10	10.000
19	Nurul Hasanah	28	Usaha krupuk	0/1	2005	10	10.000
20	Sulastri/janda	40	3/		2007	10	12.000
21	Musi'ah	55/janda	-	5/2	Nasi		
22	Nafi'ah	55	Guru		Jajan		
23	Badi'ah	45	Guru	5/4	Nasi		
24	Yuli Rohanah	34	Dagang	0/3	Dagang kain		
25	Musri	40	Nelayan	5/4	Ikan panggang		
26	Maisaroh/janda	42	-	5/3	Kue basah		

Sebagaimana lazimnya usaha kecil menengah, banyak problem yang terus dihadapi mereka, misalnya soal kualitas yang kalah bersaing dengan krupuk buatan pabrik. Selain harganya lebih murah, krupuk pabrik juga menang dari sisi rasa, kemasan, mereka, ijin hingga keterangan dari Depkes yang menjadi daya tarik tersendiri. Dalam 1 tahun belakangan ini, produksi ibu-ibu Kranji mengalami penyusutan, bahkan ada sebagian yang gulung tikar karena ketidakmampuan bersaing dengan krupuk buatan pabrik. Apalagi, para agen krupuk buatan pabrik berani menjual dengan sistem titip. Hal inilah yang kemudian melahirkan pola penerapan yang sama oleh beberapa toko terhadap krupuk ikan Kranji, sehingga berakibat pada macetnya modal di tangan retail. Model seperti ini, sudah banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu, tapi para retail tidak pernah memperdulikan, yang penting mereka memperoleh untung.

Selain itu, usaha krupuk dihadapkan oleh datangnya musim penghujan. Bila musim hujan datang, praktis usaha mereka terhenti karena tidak memiliki oven dan lahan pengeringan yang memadai. Tetapi juga ada yang nekat memproduksi dengan segala resiko, misalnya ketika krupuk mereka tidak sampai kering, berakibat pada menurunnya rasa dan mutu, dan sekaligus harga jualnya pun mengalami penurunan. Usaha untuk mengembangkan pola pengovenan moderen terus mereka lakukan, akan tetapi terbentur oleh ketersediaan dana yang pas-pasan. Apalagi pemerintah daerah belum pernah ada upaya untuk memberikan alternatif bagaimana mengatasi persoalan permodalan, sehingga praktis ketika banyak masalah muncul, belum ada jalan keluarnya.

Setidaknya terdapat tiga masalah utama yang melilit usaha krupuk. **Pertama**, permodalan. Dari 20 pelaku usaha krupuk, hanya dua orang yang dapat dikatakan bisa mengatasi terbatasnya permodalan, karena setiap hari sudah memproduksi di atas 50 kg. Sementara yang lain berkisar antara 10-15 kg/hari. Permodalan menjadi salah satu penyebab ketersendatan roda produksi krupuk. Modal sulit berkembang karena terlalu kecil, dan kadang habis untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Misalnya bu Ni'mah. Karena dia hidup sendiri (janda), tidak ada penyangga perekonomian keluarganya selain usaha di bidang krupuk. Ketika musim hujan, praktis hanya hari-hari tertentu berproduksi, karena tidak memiliki mesin pengering. Selama berhenti berproduksi, modal yang dimiliki habis untuk memenuhi keperluan sehari-hari, sementara dia tidak mempunyai penghasilan lain selain usaha krupuk. Kasus seperti ini juga terjadi pada pelaku lain. Untuk memulai usaha baru ketika musim ikan dan kemarau tiba, di antara perempuan Kranji banyak yang kredit kepada toko-toko yang menjadi langganan atau yang mengepul hasil produksi mereka. Namun harus diakui, bhan baku yang dibeli jauh lebih mahal dibandingkan toko lain yang membayar *cash*.

Hingga kini belum ada perhatian yang serius dari pemerintah atau Perbankan menyelesaikan masalah tersebut. Pernah suatu waktu, pemerintah desa memberikan bantuan uang *cash* yang jumlahnya sangat terbatas. Karena jumlah yang diterima terbatas dan tidak ada pembinaan cara mengelola modal yang sedikit, akhirnya modal tersebut habis untuk keperluan lain.

Masalah **kedua** adalah di bidang produksi. Dari sisi rasa, krupuk Kranji tidak berbeda dengan krupuk buatan pabrik atau yang bermerek terkenal sekali pun. Meskipun demikian, masalah juga timbul karena kalah bersaing di pasaran karena diproduksi "asal jadi". Misalnya, hingga kini belum ada merek yang menjadi lambang identitas yang sekaligus ijin produksi dan nomer register yang melekat pada kemasan krupuk, kecuali milik bu Saroh dengan merek "Leres". Hal yang sama juga kemasan krupuk yang menggunakan plastik yang sederhana, karena dibungkus dengan menggunakan tangan, bukan mesin produksi dengan peralatan yang memadai. Meskipun dari sisi rasa cukup bersaing, krupuk Kranji tetap saja tidak dilirik oleh konsumen, kecuali pelanggan tertentu yang jumlahnya sangat terbatas yang sudah lama mengenalnya.

Masalah ketiga adalah **pemasaran**. Krupuk Kranji pada umumnya dipasarkan sendiri oleh pembuatnya. Selain bu Saroh dan tasmiyatun yang sudah menembus desa/kecamatan lain, semua produk terbatas di pasar Kranji. Belakangan, sulit bersaing dengan krupuk pabrikan yang menembus pasar Kranji dengan harga yang lebih murah serta kemasan yang cukup menarik. Sebagian pelanggan sudah banyak yang menstop menjual krupuk Kranji karena masuknya produk pabrikan. Sementara upaya untuk menembus pasar WBL tidak mudah, karena WBL identik dengan produk bermerek. Salah satu kasus yang terjadi pada bu Ita, dimana produknya dijual dimana-mana termasuk di WBL. Tapi bukan dia yang menjual, melainkan salah satu agen di Tuban. Agen tersebut membeli dengan jumlah besar kepada bu Ita dalam kondisi tidak bermerek. Setelah itu, oleh agen tersebut krupuk dikemas dan dibuatkan merek sendiri, dan kemudian dijual ke berbagai tempat atas nama merek yang dimilikinya. Bu Ita sangat senang krupuknya dapat terjual banyak, meskipun dirinya terasa sakit karena ketika di luar krupuknya dijual kembali oleh agen dengan harga lebih mahal dan dikemas seolah hasil produksinya. Itulah satu kisah bagaimana kondisi usaha krupuk Kranji yang sulit keluar dari persoalan yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipecahkan.

C. Profil Perempuan Nelayan.

1. Siti Saroh, Sukses Usaha Krupuk di Tengah Tangisan Nelayan.

Siti Saroh adalah satu dari sekian pengusaha yang sukses di tengah lesunya perekonomian nelayan Kranji. Dia mampu memanfaatkan celah bisnis ketika banyak orang mengalami kesulitan menghadapi situasi sulit saat krisis.

Kebutuhan keluarga hampir sekitar 5 tahun terakhir ini ditutupi oleh bu Saroh dengan membuat usaha krupuk merek dagang **LERES**, dengan dibantu oleh suami serta ibunya, dulu suaminya bekerja sebagai sopir, namun karena usaha krupuk Saroh yang semakin berkembang maka suaminya pun berhenti menyupir dan ikut membantu dalam usaha krupuk tersebut.

Sejak tahun 2002 ia merintis usahanya mulai dari nol, pemasarannya baru sebatas di toko-toko yang ada di pasar Kranji saja, namun dengan segala kerja kerasnya kemudian usaha

krupuknya menjadi besar, dan sekarang pemasarannya sudah meluas ke kota-kota besar seperti Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, bahkan sampai ke Solo. Pendistribusian ke kota-kota tersebut awalnya dilakukan dengan langsung mendatangi toko-toko dan menawarkan krupuknya meski sama sekali belum kenal pemilik tokoh tersebut. Tidak sedikit juga toko yang menolak krupuknya namun dengan kerja keras dan kualitas krupuk bu saroh yang bagus akhirnya banyak juga toko yang mau menjual, sampai sekarang menjadi pelanggan tetap meskipun pada awalnya harus meninggalkan krupuk untuk di jadikan sebagai setoran awal tanpa mendapat bayaran dari toko tersebut, untuk mendapatkan pelanggan resiko itupun diterimanya.

Siti Saroh nama lengkapnya, lahir di Pantenan Panceng Gresik pada tanggal 4 april 1964, di desa itu bu Saroh mulai mengenyam pendidikan sampai kelas 5 MI, kelas 6-nya pindah ke MI Tarbiyatuth Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan mondok di sana sampai lulus MTS. Belum sempat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bu Saroh kemudian menikah dengan Mudzakir (jejaka Kranji) dan tinggal di Kranji sampai sekarang .

Saat ini bu Saroh dikaruniai putra satu, yang sudah duduk di bangku kuliah semester 6 ITATS Surabaya, semasa kecilnya seringkali putranya minta adik karena ingin seperti teman – temanya yang lain, namun beberapa tahun kemudian bu saroh pun belum juga memiliki anak yang ke dua, karena desakan dari putranya tersebut maka bu saroh akhirnya mencari adik angkat untuk putranya, hingga saat ini sudah di kelas III di SMA Paciran.

Saat ini usaha krupuk bu saroh sudah berkembang, hingga mampu memproduksi 3 kwintal sekali buat, namun proses produksi krupuk itu hanya di bantu oleh suami, ibu, dan dua orang pekerja, karena untuk mencampur bahan-bahan menjadi adonan serta pengirisan krupuk sudah menggunakan mesin, namun meski demikian Saroh pun sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga baru untuk membantu memproduksi krupuk. Problem berikutnya adalah belum memiliki alat pengering buatan sebagai pengganti matahari, karena saat hujan produksi krupuk berhenti total, walaupun memproduksi ia harus menanggung kerugian karena harga jual krupuknya menjadi rendah disebabkan warna krupuk tersebut menjadi kekuning-kuningan dan ketika di goreng pun tidak bisa mekar, disebabkan tidak terkena panas matahari.

Dari hasil usaha krupuk tersebut Saroh mampu menghidupi keluarganya, suami dan dua orang anak yang masing-masing sudah duduk di bangku kuliah dan bangku SMA, dengan pengeluaran sebesar Rp: 50.000 per hari ia masih bisa mencukupinya bahkan lebih. Kondisi rumahnya cukup megah berlantai keramik yang mewah dengan pintu dari kayu jati yang terkesan elegan, dilengkapi kursi dari kayu jati yang terkesan mewah, dan dari ruang tamunya nampak di ruang tengah satu set meja makan yang besar, serta nampak satu buah lemari es dan perabotan mewah yang lain .Hingga saat ini dengan hasil usaha krupuk bu Saroh mampu membeli 3 stand toko di pasar Kranji yang dibuka empat bulan yang lalu.

Harapan besar yang diinginkan Saroh dengan banyaknya industri di pantura Lamongan, terutama adanya industri pariwisata WBL, masyarakat bukan hanya sekedar menjadi penonton, dalam hal ini mestinya pemerintah memberi kesempatan kepada

masyarakat dengan cara membantu pemasaran produk krupuknya agar bisa dipasarkan ditempat wisata. Selain pemasaran, Saroh juga berharap kepada pemerintah agar memberikan pendidikan keterampilan pengelolaan SDA yang ada, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi penonton dan konsumen, tetapi juga sebagai pemanfaat adanya jasa pariwisata dengan memasarkan produk unggulan lokal. Seperti barang-barang souvenir, kerajinan, makanan, pakaian dan segala jenis oleh-oleh wisatawan semuanya berasal dari luar daerah Lamongan. Bahkan Saroh mengeluhkan kondisi masyarakat pantura khususnya masyarakat Kranji, dengan banyaknya industri di Pantura Lamongan belum bisa mendatangkan kemanfaatan, bahkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, malah sebaliknya, masyarakat hanya bisa menikmati dampak industrialisasi dalam bentuk perubahan budaya, perilaku, dan sosial keagamaannya.

Kondisi ini diperparah oleh manajemen perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja, bukan memanfaatkan tenaga kerja lokal, tetapi banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah dengan alasan, tenaga kerja lokal tidak mempunyai kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan. Saroh berharap, mestinya dalam kondisi seperti ini pemerintah tanggap dan punya kepedulian terhadap masyarakat sekitar obyek industri dengan cara memfasilitasi masyarakat dalam bentuk memberikan pelatihan ketenagakerjaan atau yang lebih baik lagi fasilitasi dalam bentuk pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat pantura nantinya bukan hanya menjadi obyek tetapi punya kemampuan berperan sebagai subyek.

2. Tasmiyatun, membangun usaha krupuk dengan modal 75 ribu

Sutrisno Utomo salah satu nelayan buruh yang berpenghasilan pas-pasan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Sutrisno berkeinginan mengadu nasib ke negeri jiran malaysia. Dalam pikiran Sutrisno, terbersit angan-angan, kalau dirinya hanya mengandalkan kerja sebagai nelayan tidak akan ada perubahan peningkatan kesejahteraan, sementara kebutuhan hidup kian meningkat seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga. Kini Sutrisno suami Tasmiyatun salah satu anggota KUK Kranji di karuniahi 3 orang anak.

Tepat tahun 1985 Sutrisno memantapkan niatnya pergi ke Malaysia dengan segudang harapan besar, bahwa dengan kerja ke Malaysia nasib akan berubah, kesejahteraan akan meningkat, dan tentunya kebutuhan hidup keluarga juga akan terpenuhi. Saat pergi ke Malaysia, Sutrisno memberi tinggalan uang kepada istrinya Tasmiyatun sebanyak 75 ribu rupiah untuk uang belanja tiap harinya. Pertanyaan muncul dalam benak Tasmiyatun, apakah cukup belanja hanya dengan uang 75 ribu untuk menghidupi keluarga? Dengan uang 75 ribu inilah Tasmiyatun memulai membangun usaha krupuk, kebetulan sebagian keluarganya ada yang sudah berpengalaman usaha krupuk, juga didukung dengan lingkungan tetangganya banyak juga yang memproduksi krupuk. Niatan Tasmiyatun semakin kuat, seiring kuatnya desakan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, pada tahun 1985 Tasmiyatun memulai usaha krupuk dengan modal 75 ribu pemberian suaminya untuk uang belanja.

Modal tersebut dibelikan tepung sebanyak 10 Kg, kemudian tepung tersebut di buat krupuk ikan dan dipasarkan sendiri. Dalam hal pemasaran, awalnya Tasmiyatun memasarkan ke pasar Kranji mengikuti jejak teman-temannya sekampung yang kebanyakan memasarkan krupuk hanya di pasar Kranji. Karena produksi krupuk di Kranji cukup banyak dan semua hanya dipasarkan di Kranji, maka usaha krupuk tidak akan bisa berkembang, maka Tasmiyatun mencoba menawarkan produk krupuknya ke luar desa sekitar Kranji. Awalnya dengan menawarkan krupuknya ke toko-toko dengan cara menitipkan krupuk di toko tersebut.

Kerja keras Tasmiyatun membuahkan hasil yang luar biasa, pemasaran krupuk di luar desa Kranji semakin banyak, sementara ia tidak mampu kerja sendirian untuk memenuhi banyaknya permintaan pasar, maka Tasmiyatun berusaha menambah karyawan untuk memproduksi krupuk dan sekarang karyawannya sebanyak 5 orang,

Karena usaha krupuk istrinya di rasa cukup prospektif, Sutrisno tidak lagi kerja ke Malaysia, ia pulang membantu mengembangkan usaha krupuk yang dirintis istrinya, kini Sutrisno bersama Tasmiyatun mengembangkan usaha krupuknya dan memasarkan sampai ke luar kabupaten . Produksi krupuknya tiap hari minimal 3 kwintal dengan merk dagang **ANUGRAH**, dan untuk meringankan dan mempercepat produksinya di samping mempekerjakan 5 orang karyawan, alat produksinya juga sudah menggunakan alat mesin sederhana yang diciptakannya sendiri, mulai mesin pengaduk bahan, pemotong, pengering, dan pengepakan.

Upaya mengembangkan usaha krupuk yang dirintis Tasmiyatun membuahkan hasil. Hingga kini Tasmiyatun mampu menyekolahkan 3 anaknya dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan selain mempekerjakan 5 karyawan tetap, juga mempekerjakan para tetangganya untuk memotong dan menjemur krupuk. Lumayan ... kata Tasmiyatun bangga dengan rintisan usaha krupuknya. Dia berharap kepada anggota kelompoknya (KUK) disetiap pertemuan anggota, bahwa dengan kerja keras, usaha krupuk kita akan berhasil.

Harapan lain yang diinginkan Tasmiyatun, terkait dengan banyaknya industri yang sedang ramai masuk ke wilayah pantura Lamongan mestinya banyak memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar obyek industri, baik industri pariwisata atau yang lainnya, yang terjadi sekarang, masyarakat bukannya menikmati keuntungan dari adanya industri tersebut, tetapi malah hanya sebagai penonton belaka. Karena problem utamanya masyarakat tidak mampu memanfaatkan keberadaan industri tersebut, ini disebabkan karena minimnya kemampuan dan keterampilan SDM yang ada, hususnya SDM Kranji yang hanya mengandalkan usaha nelayan yang semakin hari, semakin tidak menentu penghasilannya, bahkan cenderung semakin menurun drastis jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Dalam kondisi seperti inilah mestinya pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat, hususnya masyarakat nelayan, agar tidak semakin terpuruk. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dibidang pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, nah jika hal ini berhasil dilakukan oleh pemerintah, masyarakat Pantura hususnya Kranji, tidak

lagi hanya menjadi penonton, tetapi berperan dalam memanfaatkan kesempatan, termasuk pemasaran produk unggulan masyarakat.

3. Itawala, menyekolahkan anak dengan usaha krupuk

Awal tahun 1993, Itawala memulai merintis usaha krupuk dengan membeli krupuk mentah dari para tetangganya yang sudah lebih dahulu memproduksi krupuk ikan, krupuk tersebut ia goreng sendiri dan dijual ke pasar Kranji. Usaha krupuk gorengan ini berkembang cukup pesat, dalam satu hari ia mampu menggoreng krupuk sampai 1 kwintal, untuk ukuran di desanya produksi gorengan krupuk samapai 1 kwintal termasuk ukuran paling besar dibandingkan dengan pengusaha krupuk lain di kampungnya. Sayangnya rintisan usaha ini hanya berjalan hingga tahun 1997.

Sepeninggal suaminya, sebagai perempuan janda, ia harus memenuhi kebutuhan hidup 3 orang anaknya dan seorang bapak yang tinggal satu rumah dengannya juga menjadi tanggungan Itawala. Karena tuntutan kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anaknya, Itawala di samping jualan krupuk, juga membuka usaha jahit dan bordir mulai tahun 1997 sampai sekarang.

Januari 2006 Itawala memulai kembali usaha krupuk yang dulu pernah dirintis dan berkembang dengan baik, krupuk yang diproduksi sekarang tidak lagi krupuk gorengan melainkan ia memproduksi krupuk ikan mentah (belum digoreng). Produksi krupuknya kini tiap hari rata-rata 10 kg dan dipasarkan di pasar Kranji, selain dipasarkan dipasarkan di pasar Kranji Itawala juga sudah punya 3 pelanggan tetap yang tiap harinya membeli produk krupuknya. Adanya pelanggan ini cukup membantu, karena ia tidak lagi harus susah-susah menawarkan ke luar daerah.

Meskipun sudah punya pelanggan tetap, Itawala masih punya harapan besar agar usaha krupuknya bisa berkembang lebih besar, tetapi karena keterbatasan modal, sehingga jumlah produksi krupuknya tidak bisa berkembang dengan cepat dan banyak. Meskipun banyak pemilik modal yang sudah menawarkan pinjaman modal kepada Itawala, namun ia tidak mau karena takut tidak bisa mengembalikan pinjaman modal, karena usaha krupuknya ini berjalan bergantung musim/cuaca dan hasil tangkapan ikan laut. Kalau nelayan lagi musim dapat ikan banyak, biasanya jualan krupuknya juga ikut laris, tetapi kalau nelayan lagi sepi, jualan krupuk juga ikut sepi.

Dalam kondisi terbatasnya modal usaha ini, itawala berharap agar pemerintah memikirkan kami (pengusaha krupuk) dalam bentuk memeberikan bantuan modal usaha dan membantu pemasaran krupuk ikan. Lebih-lebih saat ini di kawasan pantura Lamongan sudah banyak berdiri industri, termasuk industri pariwisata WBL. Mestinya pemerintah tahu, bahwa di sekitar kawasan wisata banyak masyarakat yang punya produksi unggulan lokal. Tetapi selama ini pemerintah belum banyak berbuat untuk memfasilitasi para pengusaha krupuk dalam penjualan hasil usahanya, terutama di obyek wisata setempat (WBL).

Itawala juga menyesalkan, mengapa masyarakat disekitar industri pariwisata hanya bisa melihat, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa yang bisa menghasilkan sesuatu untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dalam mengelola potensi lokal yang cukup kaya akan hasil lautnya. Maka jika masyarakat tidak mau dibilang hanya sebagai penonton dalam pemanfaatan industri di

wilayah pantura, pemerintah harus bisa memberikan pendidikan keterampilan kepada warga masyarakat Kranji dan sekitarnya.

BAB IV

MENSINERGINKAN POTENSI EKONOMI

DAN BUDAYA NELAYAN.

A. Membangun Kesadaran Dampak Industrialisasi Terhadap Ekonomi dan Ekosistem Laut.

Pada umumnya masyarakat nelayan di desa-desa pantai utara Pulau Jawa menghadapi problem yang sama dengan daerah¹⁶ lainnya. Nelayan yang bisa bertahan atau meningkat kesejahteraannya adalah nelayan dengan modal besar, yang jangkauan penjelajahannya hingga ke lepas pantai (*off shore*). Jumlah mereka relatif kecil. Sebaliknya, untuk nelayan kecil atau nelayan tradisional dengan kepemilikan kemampuan peralatan tangkap dan modal usaha terbatas, harus puas dengan kenyataan kepahitan hidup dan persaingan keras dalam memperoleh hasil tangkapan.

Secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan kecil atau nelayan tradisional tidak banyak berubah. Artinya kesejahteraan mereka semakin merosot jika dibandingkan dengan sebelum tahun 1990-an. Hal yang sama (atau bahkan lebih parah) juga dialami oleh nelayan buruh yang bekerja pada unit-unit penangkapan nelayan tradisional atau dengan peralatan tangkap yang lebih moderen. Karena tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup yang rendah, dalam struktur masyarakat nelayan, maka nelayan buruh (*Belah*) merupakan lapisan sosial yang paling bawah.

Baik nelayan tradisional atau nelayan buruh merupakan lapisan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat Indonesia. Demikian pula yang terjadi di masyarakat nelayan Kranji. Terdapat 200 perahu yang beroperasi di dermaga Kranji baik yang kursin, puket ireng dan jaringan dengan jumlah buruh nelayan (*Belah*) 2500 orang. Jumlah tersebut merupakan 64 % dari jumlah usia produktif (15-55 tahun) penduduk desa Kranji yang berjumlah 6.239 jiwa. Meskipun tidak semua *Belah* berasal dari desa Kranji, tapi bisa digambarkan bahwa betapa besarnya jumlah *Belah* yang menggantungkan hidupnya dari hidup sebagai buruh nelayan. Sementara pada satu sisi, pendapatan mereka tidak seimbang dengan kerja keras dan tanggung jawabnya ketika berada di tengah lautan. *Cenul*, salah seorang *Belah* yang tiap harinya melaut, menyatakan, dari 10 kali melaut, maksimal 6 kali memperoleh ikan, sisanya tidak mendapat apa-apa (*ngoreng*). Dari tiap melaut, *Cenul*

¹⁶ Kusnadi sudah melakukan survey terhadap beberapa nelayan mulai Indramayu hingga Banyuwangi, bahwa akar persoalan nelayan lebih karena pranata sosial yang mereka yakini. Lihat Kusnadi, *Akar Kemiskinan Perempuan*, 17.

hanya mendapatkan 15 ribu bersih, padahal dia bekerja 7-12 jam/hari. Sementara Pak Romli salah satu jragan (manajer perahu kursin), menyatakan bahwa meskipun dia sebagai jragan, tidak selalu memperoleh hasil yang melimpah, ada saat tertentu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Apalagi belakangan, setelah tahun 1997-an, praktis hasil tangkapan nelayan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Apalagi belakangan ini, menurutnya sudah sulit mencari ikan di sekitar pantai, karena rusaknya ekosistem laut dengan banyaknya reklamasi untuk kepentingan industri.

Melihat kondisi yang demikian itu, usaha yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran akan dampak reklamasi terhadap ekosistem laut serta dampak pembuangan limbah industri yang dapat mengancam konservasi lingkungan pantai. Melalui diskusi dan pertemuan bersama beberapa nelayan, BP2M terus mengembangkan isu ini menjadi isu bersama dan kemudian dijadikan sebagai bahan renungan bagi berbagai pihak, bahwa industri pada sisi lain membawa dampak negatif, juga berakibat pada merosotnya hasil tangkapan akibat ekosistem laut telah rusak.

Pada sisi lain, juga perlu dilakukan model pembagian hasil yang mempertimbangkan keadilan dan tanggung jawab masing-masing komponen, baik daokeh, jragan maupun Belah. Sebab dalam praktiknya, pembagian hasil tangkapan lebih didasarkan pada konvensi dari pendahulunya, yang secara tradisional menggunakan cara pembagian hasil tidak berimbang. Pembagian hasil, lebih banyak menguntungkan daokeh dan jragan, dari pada Belah. Sebab, Belah maksimal hanya mendapat 1 antara 2,5 s/d 1, 5 % dari hasil laba bersih (biasanya dalam satu perahu kursin terdapat 20 Belah), sementara sisanya dibagi untuk jragan dan daokeh. Pembagian seperti merugikan Belah, dan bahkan seandainya Belah memperoleh 5 % persen pun, ekonomi mereka tidak akan pernah beranjak dari keterpurukan.

Menurut pengakuan Cenul, dari 15.000 penghasilannya dari kerja 7-12 jam/hari, sangat sulit keluar dari keterpurukan ekonomi yang melilit mereka. Karenanya, sistem pembagian hasil perlu ditinjau ulang, disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab mereka.

B. Menata kembali pranata sosial nelayan.

Menghadapi kenyataan kondisi kehidupan nelayan yang seperti, maka ada dua pilihan, yaitu menyesuaikan diri dengan kenyataan lingkungan, atau melakukan perlawanan. Untuk kondisi kedua tidak mungkin dilakukan, karena secara kultural nelayan Kranji lebih dekat aroma kekeluargaan. Sementara di tempat lain, kondisi ini sebaliknya. Tidak sedikit para nelayan yang melakukan perlawanan terhadap semua penindasan yang mendera mereka, baik antar sesama nelayan, dengan pemerintah, atau lembaga-lembaga ekonomi desa yang juga memperkuat keterpurukan mereka.

Agar nelayan bisa kembali berjaya, perlu dilakukan perubahan dalam bentuk penataan kembali pranata sosial sosial melalui berbagai cara yang disesuaikan dengan karakteristik dan budaya mereka. Membangun kembali pranata itu dapat dimulai dengan :

- a. Membentuk dan membangun kesadaran organisasi. Munculnya HNSI, KUD sama sekali tidak memberi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang mendera nelayan. HNSI dan KUD hanya sebuah “papan nama” , yang keberadaannya tidak memberi efek apa-apa pada nelayan. Membentuk dan membangun kesadaran organisasi merupakan perwujudan ekspresi kebebasan untuk melepaskan diri dari ketersumbatan saluran-saluran aspirasi nelayan. Dari organisasi ini pranata sosial ekonomi nelayan dibicarakan dan dipecahkan berdasarkan kesepakatan semua pihak.
- b. Pengembangan jalur tangkap. Ada kesadaran dari nelayan untuk mengembangkan jalur wilayah tangkapan yang lebih jauh (*off-shore fishing*). Hal ini didorong oleh semakin sulitnya ikan di kawasan pantai Lamongan, dan Pantura pada umumnya, sehingga nelayan Kranji bisa keluar dari daerahnya. Namun pengembangan jalur tangkap ini memiliki resiko dengan munculnya protes bahkan aksi kekerasan dari nelayan lain yang merasa wilayah kekuasaannya diserobot oleh nelayan lain. Pengembangan jalur tangkap ini memerlukan kerja sama antar sesama organisasi nelayan agar terhindar klaim dan aksi kekerasan.
- c. Pengembangan alat tangkap. Pengembangan alat tangkap sering menjadi masalah karena adanya larangan dari pemerintah untuk menggunakan alat tangkap tertentu yang dapat merusak ekosistem laut. Misalnya, aturan dalam Keppress No. 39/1980 dan SK Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/1980 yang secara tegas melarang penggunaan jaring arad dan jaring *trawl* (troll). Jenis jaring ini merupakan idaman para nelayan yang berbentuk kantong dan bersayap yang ditarik dengan sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang. Jenis *trawl* yang dilarang adalah pukot harimau, pukot tarik, jaring tarik, pukot apollo, dan jaring arad (kantong). Karena itu, nelayan hanya mampu berimprovisasi dengan jaring nilon, salah satu jaring yang dianggap lebih memadai dibandingkan dengan jaring lainnya.
- d. Mempertimbangkan kembali keadaan jenis perahu kursin, puket ireng dan perahu jaringan yang sudah tidak bisa bersaing lagi dengan perubahan alat tangkap moderen. Muncul keinginan komunitas nelayan Kranji, agar kapal-kapal asing hasil tangkapan TNI AL atau DKP diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat dan tidak membiarkan kapal-kapal tersebut menganggur atau hanya menjadi *bancaan* segelintir elite yang seolah bernaung di balik keterpurukan nelayan.
- e. Mengatasi permodalan. Biaya sebelum melaut sangat besar sekali. Untuk ukuran perahu kursin, biaya solar bisa mencapai 2.000.000 untuk sekali melaut, belum lah es batu, minyak tanah, dan keperluan lainnya. Demikian pula biaya perawatan dan pembelian jaring baru yang memerlukan biaya tidak sedikit. Untuk menghindari adanya ketergantungan yang berlebih kepada pihak ketiga (pemodal), perlu memperkuat lembaga ekonomi nelayan, semacam koperasi desa, dengan model simpan pinjam. Model ini diharapkan memberi keleluasaan

bagi nelayan dalam mengembangkan usaha tangkapannya, dengan tidak membayar bunga yang terlalu tinggi.

- f. Memberikan jalan baru model pemasaran yang sesuai dengan budaya nelayan setempat. "Jalan baru" pemasaran dalam rangka memberikan nilai bergainig harga pada nelayan agar tidak terjebak dengan sistem borong oleh tengkulak lokal. Keterlibatan HNSI dan Organ di bawahnya seperti Rukun Nelayan (RN) perlu dikawal secara sistemik oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan. Karena keterlibatan organisasi nelayan sudah terbukti sulit menembus mafia pemasaran yang dikuasai pemodal besar yang umumnya menghegemoni Daokeh dan Jragan melalui sistem kredit (pinjaman) awal.

Pada tingkat regulasi, usaha pencarian alternatif dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal masyarakat Pantura sudah dilakukan, namun pada tingkat implementasi masih jauh dari harapan. Munculnya Keputusan Kepala Desa Kranji Nomor 01 tahun 1991 tentang Peraturan Tata Kerja Kenelayanan merupakan salah satu produk yang cukup positif untuk membangun kerukunan nelayan. Tetapi hal tersebut belum terkait dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan olen nelayan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Meskipun bukan pekerjaan pemerintah tingkat desa, tetapi setidaknya hal tersebut perlu dilakukan sebagai *pressing* terhadap pemerintah daerah, pemegang pembuat dan pelaksana regulasi yang sesungguhnya, agar bisa bekerja keras untuk memikirkan nasib nelayan ke depan.

C. Peran publik perempuan nelayan Kranji;penyanggah perekonomian keluarga.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kusnadi,¹⁷ mobilitas nelayan dapat terjadi berkat istri mereka yang memiliki kecakapan berdagang. Keterlibatan istri dalam kegiatan berdagang sangat terbuka, karena sistem pembagian kerja secara seksual memungkinkannya dan sesuai dengan sistuasi geososial masyarakat nelayan. Dalam sistem pembagian kerja ini, nelayan bertanggung jawab atas penangkapan ikan (kawasan laut), sementara kaum perempuan bertanggung jawab atas urusan domestik dan publik (wilayah darat). Sistem pembagian kerja ini memberikan tempat terhormat bagi istri/perempuan nelayan dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para pedagang ikan yang sukses biasanya para istri pemilik-pemilik perahu. Namun keluarga nelayan yang benar-benar sukses hanya sebagian kecil dari masyarakatnya.

Sistem pembagian kerja di atas, telah memberi tempat bagi perempuan untuk mengatasi masalah di wilayah darat, merupakan "katup pengaman" untuk mengantisipasi pranata-pranata sosial sosial ekonomi yang "dianggap pihak lain" merugikan nelayan. Kaum perempuan terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, pengajian, atau kegiatan yang memiliki dimensi ekonomi yang bisa memanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan hidup keluarga.

¹⁷ Ibid., 6.

Kaum perempuan di desa-desa nelayan tidak sekedar membantu suami mencari nafkah, tetapi mereka sangat menentukan kelangsungan ekonomi keluarga. Dari sisi tanggung jawab ekonomi keluarga, perempuan dan laki-laki memiliki posisi sejajar (saling melengkapi). Kaum perempuan dan pranata-pranata sosial budaya yang ada merupakan potensi pembangunan masyarakat nelayan yang bisa dieksplorasi untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi lainnya.

Dari masalah itu kemudian mengilhami adanya pendampingan pengembangan usaha krupuk ikan khas Kranji. Ketika sang suami melaut, praktis semua kegiatan rumah tangga berada di tangan istri, apalagi keberangkatan melaut memakan waktu yang cukup lama. Pengalaman Ibu Asrifah dan Tasmiyatun yang suaminya menjadi Belah (buruh nelayan) dengan membuka usaha krupuk adalah salah satu cerita kecil, bagaimana mereka berjuang di tengah sulitnya membangun ekonomi keluarga. Suami Arsifah, Sumanan, bila saat along (musim ikan) tiga hingga empat kali dalam satu minggu pergi *miyang* (melaut), sementara bila musim baratan (peceklik), hanya satu kali dalam satu minggu melaut. Dalam tiap kali melaut, mereka mendapatkan upah/bagi hasil antara 35-50 ribu sebelum dipotong biaya makan dan rokok. Praktis uang bersih yang dibawa pulang tidak lebih dari 25 ribu tiap kali melaut. Apabila musim baratan tiba, terkadang hanya membawa 10 ribu, dan/atau hanya membawa ikan hasil pembagian antar Belah, karena ikan yang terjual hanya cukup untuk menutupi biaya solar. Uang yang diterima Asrifah dari hasil kerja suaminya tidak cukup untuk menutupi biaya kebutuhan keluarga, apabila dua anaknya masih duduk di bangku sekolah. Cerita Tasmiyatun juga kurang lebih sama. Andai dia tidak membuka usaha lain, dengan hanya mengandalkan upah buruh nelayan, dia tidak yakin mampu keluar dari tekanan kebutuhan ekonomi keluarga yang sangat berat.

Dari problem suami yang berat itulah, maka kemudian muncul pemikiran untuk memanfaatkan ikan tangkapan yang dibawa dari suaminya dari tengah laut untuk dijadikan krupuk ikan, apalagi selain mereka juga ada usaha rintisan dari tetangga-tetangganya yang juga membuat krupuk ikan.

Dari sinilah dampingan pengembangan usaha krupuk itu dimulai. Usaha ini dianggap memiliki potensi yang sangat besar mengingat bahan baku yang tersedia cukup memadai, apalagi sebagian besar ibu-ibu yang akan/sedang/telah mengembangkan usaha krupuk didukung oleh suaminya sebagai buruh nelayan. Apabila para suami mereka membawa ikan dari laut, mereka langsung mengolah menjadi bahan utama krupuk, sementara apabila suami mereka tidak melaut, bahan baku dengan mudah di dapat di TPI yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Usaha yang dilakukan oleh BP2M adalah dengan mengajak berfikir ulang tentang sistem produksi, permodalan dan pemasaran yang mereka lakukan, disamping mengajak kelompok pertama (yang sudah gulung tikar) dan kedua (yang masih asal-asalan) untuk bangkit menjadi pelopor penggerak. Ada dua *local leader* yang menjadi proyek percontohan, yakni Bu Saroh dan Bu Tasmiyatun. Kedua pengusaha krupuk ini diminta

sebagai penggerak dan patner dalam memberi jalan keluar usaha-usaha mereka agar tidak stagnan.

Usaha pendampingan dimulai dari mengenali satu persatu permasalahan mereka, kemudian merengking persoalan, menggali potensi-potensi lokal dan potensi diri yang bisa membantu produksi, permodalan hingga pemasaran, kemudian membangun kegiatan bersama guna memberi manfaat bagi semua kelompok krupuk. Disamping itu juga memperkenalkan tentang munculnya pesaing-pesaing krupuk baru hasil buatan pabrik yang laku keras di pasaran, sehingga dikhawatirkan membawa akibat pada terdiskreditkannya pangsa pasar krupuk ikan khas Kranji.

Usaha lain yang dilakukan oleh kelompok ini adalah melakukan pelatihan bersama tentang pengembangan usaha produktif guna mengetahui model produksi yang efisien, teknik pengelolaan modal dan pemasaran. Kemudian secara terus-menerus dilanjutkan dengan praktik membuat krupuk baru yang lebih bermutu, sesuai dengan kekhasan Kranji. Untuk menambah wawasan, mereka diajak belajar teknik pembuatan krupuk ke tempat lain yakni ke sentra *home industry* krupuk ikan di kawasan Giri Gresik.

Sejak pendampingan, sudah dirintis pola membangun usaha bersama melalui kelompok. Kelompok ini diberi nama Kelompok Usaha Krupuk (KUK) Kranji yang diketuai oleh Ibu Italawa. Di tingkat internal mereka, kelompok ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan pemasaran dan produksi, sebab kedua masalah tersebut dianggap paling urgen dipecahkan. Sementara ke depan, kelompok ini bisa mengembangkan sayap permodalan dengan membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan di tingkat kecamatan maupu kabupaten. Usaha rintisan melalui kelompok ini mulai menuai hasil, sebab mulai tumbuh kesadaran dari ibu-ibu untuk mengembangkan usahanya tanpa harus (selalu) didampingi oleh BP2M. Demikian juga, sudah ada beberapa ibu lain yang ikut berperan sebagai mediator pemasaran dan pencarian modal sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh kelompoknya.

Usaha krupuk dan pekerjaan-pekerjaan lain sekaligus menunjukkan peran publik perempuan nelayan. Pada hari-hari *ngoreng* (peceklik), aktifitas publik perempuan pesisir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki atau suami mereka. Sementara musim baratan (musim ikan) dala setahun lebih sedikit dibandingkan dengan musim along. Kenyataan ini disadari oleh para nelayan yang kebetulan menjadi suami mereka. "Nek gak direwangi raiso mangan" (kalau tidak dibantu dengan pekerjaan ini, tidak bisa maka), begitulah kata-kata yang selalu muncul dari perempuan nelayan.

Usaha krupuk yang dilakukan perempuan sekaligus meningkatkan gengsi di hadapan suami. Dengan memiliki penghasilan tetap meskipun jumlahnya tidak terlalu besar dapat mengurangi ketergantungan perempuan pada suami mereka. Gengsi sosial di hadapan suami merupakan kebanggan bagi para istri, karena dengan cara seperti itu akan

mengurangi dominasi suami yang berlebihan. "Nek gak ngono, gak iso ngini", merupakan percikan komunikasi sosial isteri nelayan atas sikap keras suami yang datang sewaktu-waktu apabila memperoleh penghasilan agak besar dari usaha melaut mereka.

Gengsi pribadi (atau jaim:jaga imej) di hadapan suami juga terjadi di tempat lain. Sebagaimana penelitian Kusnadi terhadap perempuan nelayan di Prenduan Madura, bahwa usaha istri nelayan dalam membantu perekonomian keluarga bukan sekekar menutup katup ekonomi yang kembang kempis tetapi sekaligus menaikkan gengsi di hadapan suami. Dengan penghasilan yang mereka peroleh dapat menjadi daya tawar atas ketidakseimbangan peran dan sikap diskriminatif yang tiba-tiba muncul ketika suami memperoleh penghasilan yang cukup besar.¹⁸

Fokus program sejak awal pendampingan adalah pemberdayaan yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Program pemberdayaan tahun pertama difokuskan dalam pesantren guna menumbuhkan kesadaran kolektif semua komponen pesantren terhadap arti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan hingga kepada munculnya rumusan kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender.

Sementara pada tahun kedua pendampingan sudah mulai keluar dari pesantren, dengan membidik masyarakat sekitar melalui pemberdayaan ekonomi. Pada tahap ini masalah kesadaran gender tetap menjadi prioritas, sehingga semua program pemberdayaan masyarakat tetap mempertimbangkan keterlibatan perempuan.

Dilihat dari pekerjaan fisik, perempuan Kranji adalah sama dengan laki-laki. Sebagian besar pasar dan pelabuhan Kranji dipenuhi oleh perempuan, mulai bagian angkat ikan, penimbang, pekerja kasar, tukang bersih-bersih, bahkan kalangan bakul dan tengkulak. Peran perempuan di sektor ini sangat menonjol. Bahkan dalam pekerjaan rumah tangga, perempuan juga sangat menonjol. Tidak sedikit perempuan yang ikut membantu suami mereka dalam aktifitas kenelayan seperti menjemur jaring, menjahit jaring yang rusak, hingga mengantar jaring ke pinggir pantai. Sementara dalam usaha krupuk, hampir semua pekerjaan di bawah komando perempuan, mulai belanja bahan baku, meracik bumbu, memotong krupuk, penjemuran hingga penjualan ke pasar. Sesekali suami dan anak mereka yang laki-laki membantu, ketika aktifitas mereka mulai padat, seperti dalam mengaduk maupun memotong krupuk. Dari sinilah tergambar bahwa secara pekerjaan fisik antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda. Bahkan menurut ibu Ita, pekerjaan fisik ibu-ibu sama padatnya dengan pekerjaan laki-laki, selain dirinya menjadi ibu rumah tangga yang merawat dan menjaga ketiga anaknya yang masih kecil, yang itu dilakukan mulai subuh hingga jam 09.00 malam secara rutin.

Tetapi di luar pekerjaan itu, mereka tetap menjadi istri yang selalu tunduk pada aturan suami. Sebab suami sebagai kepala rumah tangga. Mereka tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari konvensi kultural masyarakat desa, bahwa laki-laki sebagai kepala

¹⁸ Kusnadi, dkk. *Perempuan Pesisir* (Yogyakarta:LKiS, 2006), 47.

rumah tangga yang memiliki hak otoritatif dalam mengatur, melarang, dan menyuruh atas nama kepala keluarga.

D. Koperasi KUK;memutus mata rantai akar kemiskinan dan membangun kemandirian perempuan nelayan.

Munculnya Kelompok Usaha Krupuk (KUK) didasari oleh keinginan membangun kesepahaman antara pelaku usaha krupuk dalam menghadapi problem usaha mereka. Maklum, selama puluhan tahun berusaha di bidang ini, tidak pernah beranjak dari *core problem* sebagaimana yang terjadi pada bidang lain sejenis *home industry* atau usaha kecil-menengah, yakni ketidakmampuan menghimpun potensi, sumber daya dan peluang usaha untuk sekedar menjaga survivalitas. Kecuali yang memiliki keinginan kuat, akses informasi pribadi yang luas dan sokongan pandangan yang mencukupi yang mampu berkembang. Jumlah yang masuk klasifikasi terakhir ini lebih sedikit, atau hanya satu dua orang saja dari sekian pelaku usaha krupuk. Justru yang terjadi keadaan sebaliknya. Karena keterdesakan arus pasar global dengan masuknya produk-produk yang lebih kompetitif, justru produk lokal makin terancam. Jumlah 20 pelaku usaha yang masih tersisa di Kranji terbilang masih kuat bertahan., padahal jumlah yang sebenarnya melebihi dari itu. Karena ketidakmampuan untuk bersaing atau terdesak oleh keperluan yang lebih utama, siklus perputaran modal habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;makan, kebutuhan sosial dan biaya menyekolahkan anak.

KUK dibentuk pada pertengahan tahun 2006. Jumlah anggota bukan saja palaku krupuk, tetapi juga penjual nasi eceran, penjual kue kering, usaha mracang dan para ibu-ibu yang masih mau merintis baru karena usahanya kolap disebabkan oleh berbagai alasan. Nama KUK sendiri mengemuka karena pelaku usaha di bidang ini berkeinginan kuat untuk menjadikan krupuk sebagai "*brand*" dan ciri khas, dengan tetap mempertimbangkan pelaku usaha yang lain.

Italawa, ketua KUK sangat gigih memperjuangkan organisasi ini. Ita yang suaminya pergi ke Malaysia berjuang keras agar KUK bisa menciptakan peluang yang memberikan kemakmuran pada anggota. Sebab Italawa menyadari, bahwa salah satu cara untuk bisa bersaing dengan cara membesarkan organisasi dan memiliki akses di bidang pemasaran sehingga produk-produk krupuk bisa diakses oleh semua kalangan.

Selama setahun berjalan, KUK dijadikan sebagai forum curah pendapat dan diskusi untuk menyelesaikan problem masing-masing anggota. Forum malam mingguan, yaitu pertemuan seminggu atau dua minggu sekali yang secara bergantian dilaksanakan di rumah anggota dan sesekali di Pesantren Tabah cukup berarti bagi upaya untuk membangun komitmen antar anggota sekaligus merancang berbagai rencana untuk

membesarkan kelompok. BP2M sebagai pendamping komunitas, terus membangun komunikasi konstruktif dengan mereka.

Sepanjang 2007, ada beberapa hal yang sudah dilakukan, diantara:

1. Melaksanakan diskusi rutin (*Focus Group Discussion*) yang berlangsung seminggu sekali, atau sekali dalam dua minggu dengan melibatkan anggota, masyarakat sekitar dan suami mereka sebagai pendamping. Kegiatan seperti dilakukan dari rumah ke rumah, seperti pengajian, atau sesekali dilaksanakan di pesantren. Kegiatan semacam ini juga melibatkan pimpinan pesantren dan tokoh masyarakat.
2. Memperkenalkan KUK dengan DPKP (Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan) Lamongan dan DPK (Dinas Perdagangan dan Koperasi) dalam upaya memberikan gambaran tentang model pemberdayaan perempuan nelayan.
3. Melaksanakan seminar tentang pemberdayaan komunitas perempuan nelayan dengan peserta semua anggota KUK bekerja sama dengan DPKP Lamongan. Setelah seminar kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan makanan khas dengan bahan baku ikan.
4. Mengikutsertakan anggota KUK dalam diskusi dan seminar yang melibatkan tokoh-tokoh nelayan, tokoh masyarakat dan aparat desa untuk ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi komunitas perempuan nelayan.
5. Menyediakan alat pemotong tradisional yang didatangkan dari Sidoarjo untuk masing-masing anggota KUK dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pemotongan krupuk yang selama ini hanya menggunakan pisau dapur. Alat potong tradisional disamping mempercepat pekerjaan juga dapat mengurangi tenaga yang dikeluarkan, khususnya bagi perempuan lansia yang jumlahnya cukup banyak.
6. Menyediakan bahan baku selama tiga hari produksi, sehingga anggota tidak harus kredit dulu dengan toko langganan yang selama ini memasok bahan baku dan membeli krupuk dari ibu-ibu nelayan.

Terkait dengan penyediaan bahan baku krupuk, diskusi tentang bagaimana pola distribusinya ke masing-masing anggota berlangsung selama tiga bulan, antara bulan September hingga Nopember 2007. Masalahnya sederhana. Jumlah dana yang tersedia hanya Rp. 2.000.000,- sementara pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan bahan baku (tepung terigu) yang sangat signifikan. Kesulitan pendistribusian *capital* yang hanya dua juta juga disebabkan oleh sulitnya membangun kebersamaan dalam bentuk usaha bersama masing-masing anggota. Hal ini dapat dimaklumi, karena di antara mereka terdapat beberapa pelaku usaha yang produksinya cukup besar, sementara muncul kekhawatiran adanya persaingan yang tidak sehat, atau takut wilayah pemasarannya diganggu oleh yang lain. Demikian pula soal rencana produksi dan pemasaran bersama, yang sulit mencari kata "sepakat". Sekali lagi, karena adanya ketakutan dari pemodal dan usaha yang besar terganggu oleh model seperti itu. Di awal pendampingan, mempersatukan keinginan mereka sangat sulit sekali. Sementara ketika ada tawaran untuk pengembangan usaha, model yang diinginkan adalah *cash and carry*. Mereka dapat pinjaman, dibawa pulang dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan, tanpa

harus bekerja sama dalam ruang yang sama. Dalam hukum bisnis konvensional hal tersebut dapat dimaklumi.

Selama diskusi sangat terlihat semangat anggota yang menyala-nyala. Masalahnya hanya satu; memotong ketergantungan pada pemberi kredit dalam bentuk bahan baku tepung di pasar. Karena mereka menyadari, dengan mengurangi ketergantungan, maka daya tawar (*bargaining position*) pelaku usaha krupuk akan semakin meningkat. Mereka dapat menjual krupuk pada toko-toko atau distributor lain, baik di pasar Kranji maupun di luar.

Dalam pertemuan yang berlangsung di rumah bu Saroh, muncul gagasan dari kedua *local leader*, Bu Saroh dan Tasmiyatun agar dana yang tersedia tersebut digulirkan dalam bentuk pinjaman bergilir dalam bentuk uang, bukan bahan baku sebagaimana rencana semula. Bu Saroh sangat hati-hati dalam menyampaikan rencana tersebut, karena khawatir terjebak dalam kata "Koperasi", suatu istilah yang dianggap "tabu" oleh sebagian masyarakat. Dulu ketika memunculkan istilah koperasi banyak ditolak, karena sejarah koperasi cukup tidak mengenakkan di telinga masyarakat. Karena itu, kata Koperasi sengaja tidak muncul, kecuali istilah dana bergilir. Ternyata, gagasan Bu Saroh cukup memuaskan audien yang lain. Secara bergantian, mereka menyatakan pendapatnya terkait dengan gagasan tersebut. Bu Saroh yang dibantu Bu Italawa kemudian mengambil kertas undangan untuk mencatat keinginan anggota. Selama dua jam mereka berdiskusi dan bertransaksi fikiran untuk memikirkan keinginan mereka. Akhir pertemuan, Bu Saroh kemudian membacakan hasil pemikiran anggota, dan mereka menyetujui atas gagasan tersebut, namun belum bisa diputuskan sebelum semua anggota hadir dan dapat menyaksikan hasil kesepakatan tersebut.

Pada pertemuan minggu berikutnya yang juga berlangsung di rumah bu Saroh, semua anggota hadir, tak terkecuali para tetangga yang belum pernah ikut pertemuan. Bu Saroh kemudian mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan terkait dengan pemikiran dana bergilir pada minggu sebelumnya. Setelah berdiskusi selama dua jam lebih, anggota menyakati hasil-hasil pertemuan sebelumnya setelah memberikan masukan, perbaikan dan perubahan pada item-item yang mereka sebut dengan istilah Koperasi KUK. Istilah Koperasi muncul setelah berdebat cukup lama. Karena menurut mereka, Koperasi KUK berbeda dengan Koperasi yang lain, yang dikelola oleh mereka sendiri.

Di samping menyetujui dibentuknya Koperasi KUK, juga membentuk badan pengurus yang terdiri dari dua pengawas dan dua pengurus Koperasi. Dua pengawas terdiri dari BP2M dan tokoh masyarakat Kranji yang dianggap mampu dan memiliki kredibilitas dalam mengelola Koperasi. Sementara 2 pengurus terdiri dari salah seorang ketua dan bagian keuangan. Dua pengurus akan memperoleh insentif yang berasal dari 0,5 % dari jasa pinjaman yang berjumlah 1 % dari dana yang dikredit.

Berikut ini adalah gambaran lengkap Peraturan Koperasi KUK :

PERATURAN KOPERASI KELOMPOK USAHA KRUPUK

DESA KRANJI PACIRAN LAMONGAN

Dampingan BP2M STAIDRA

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koperasi KUK didirikan berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan prinsip, "Dari, oleh dan untuk anggota".

Pasal 2

Koperasi KUK berkedudukan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB II : KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Koperasi KUK terdiri dari *anggota primer* dan *anggota sekunder*. Anggota primer adalah anggota perintis yang berjumlah 16orang. Anggota sekunder adalah anggota di luar perintis yang mendaftarkan diri menjadi anggota dan menyatakan sanggup mentaati peraturan Koperasi KUK.

Pasal 4

Setiap anggota diharuskan membayar :

- a. Iuran pokok sebesar Rp. 10.000,-yang dibayar pada waktu pendaftaran sebagai anggota.

- b. Iuran wajib minimal Rp. 10.000,-setiap bulan. Iuran wajib adalah tabungan anggota yang bisa diambil sekali dalam setahun pada bulan Sya'ban.

BAB III : KREDIT

Pasal 5

Setiap anggota dapat mengajukan kredit kepada Koperasi selama masih ada kas yang tersisa. Bagi *anggota primer* jumlah kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp. 300.000,- , . Sementara anggota sekunder dapat mengajukan kredit maksimal Rp. 150.000,-

Pasal 6

Setiap pengambilan kredit akan dipotong 1 % untuk keperluan administrasi Koperasi.

Pasal 7

Pencicilan uang kredit dilakukan seminggu sekali dengan jumlah yang tidak ditentukan. Batas akhir pelunasan kredit selama 3 bulan yang dihitung sejak pertama kali mengambil kredit.

BAB IV : KEPENGURUSAN

Pasal 8

Pengurus Koperasi terdiri dari :

- a. Dewan pengawas yang berjumlah dua orang.
- b. Pengurus harian yang terdiri dari Ketua dan Bagian Keuangan.

Pasal 9

- a. Dewan pengawas adalah seseorang yang berasal dari BP2M STADRA dan seorang tokoh masyarakat setempat yang memiliki kemampuan di bidangnya. Pengurus adalah seseorang yang bertugas menjalankan koordinasi dan administrasi koperasi.
- b. Pengurus harian memperoleh insentif bulanan yang berasal dari jasa 0,5 % biaya administrasi kredit.

Pasal 10

- a. Dewan pangawas dan pengurus mengadakan rapat tiga bulan sekali untuk mengevaluasi perjalanan koperasi.
- b. Rapat Tahunan Anggota dilaksanakan setiap bulan sya'ban untuk mengevaluasi pengurus lama dan memilih kepengurusan baru.

Ditetapkan di Kranji, 16 Nopember 2007

Pengurus Koperasi KUK periode 2007/2008:

Pengawas KUK : Abdul Kholiq, M.Ag (BP2M STAIDRA) dan H. Rahmad (Tokoh masyarakat)

Ketua Kop KUK : Italawa *Bagian Keuangan* : Tasmiyatun

Dengan kehadiran koperasi, rasa percaya diri komunitas semakin tinggi serta muncul harapan yang lebih nyata terhadap masa depan perekonomian keluarganya. Misalnya yang dirasakan oleh Bu Italawa. "Ketergantungan terhadap pemberi utang makin berkurang, selama ini kami selalu terjerat oleh mereka. Dengan koperasi, muncul harapan baru terhadap masa depan krupuk", jelasnya. Bu Ita bukan tidaklah sendirian. Karena masih banyak Ita lain yang merasakan manfaat koperasi. Pada awal *launching* koperasi, hanya terdapat 16 anggota aktif yang selalu terlibat dalam pertemuan rutin. Tetapi setelah itu, muncul keinginan dari masyarakat di luar anggota untuk bergabung, dan hingga kini terdapat 26 anggota aktif baik yang berasal dari usaha krupuk, iwak-iwak'an, penjual nasi atau segala jenis usaha yang masih berkaitan dengan urusan kenelayanan.

BAB V

PENUTUP

Quo Vadis Nelayan? Pertanyaan dan pernyataan tersebut selalu muncul dalam ruang diskusi bersama pelaku dan tokoh-tokoh nelayan Pantura di saat kehidupan nelayan tidak (lagi) menjadi pilihan primadona generasi muda sekarang. Pertanyaan seperti layak muncul berulang-

ulang, karena akibat inflasi yang tinggi tidak diimbangi oleh kenaikan harga ikan di pasaran. Di saat harga solar dan minyak tanah membumbung tinggi justru tidak diimbangi dengan naiknya harga ikan, yang terjadi malah sebaliknya, harga ikan ada kecenderungan menurun. Pada saat kebutuhan ekonomi nelayan kian mendesak, ikan hasil tangkapan masih jauh dari harapan, dan ikan terus menjauh karena kerusakan ekosistem laut dan tidak ada keteraturan tentang sistem penangkapan ikan. Sisi lain, setelah ikan berada di tangan, ikan tersebut seolah tidak bernilai lagi, karena keterjebakan pada sistem agen. Mereka menjual ikan pada agen yang secara ekonomis kurang menguntungkan terhadap pemilik ikan, karena tanpa melalui proses transaksi terbuka.

Dalam kondisi yang demikian, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, pemerintah atau mereka sendiri berjuang dengan segala keterbatasan dan ketidakberdayaan ekonomi? Ibarat pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga”, kondisi kehidupan nelayan ibarat masuk dalam kubangan lumpur, dimana mereka sulit keluar dari situasi tersebut. Kubangan tersebut adalah pranata-pranata yang mereka bangun dan diyakini kebenarannya, namun pada akhirnya mereka terjatuh oleh keyakinan tersebut, dan bahkan sulit keluar.

Salah satu akar kemiskinan nelayan adalah keterjeatan hidup mereka dalam pranata sosial yang dibangun atas dasar kesepakatan alamiah, yakni bagaimana nelayan mempelajari dan mendefinisikan kehidupan sosialnya berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keyakinan dirinya. Pengetahuan dan keyakinan tersebut merupakan kebudayaan yang berisi konsep, nilai, sistem, kategorisasi, metode bahkan teori-teori yang digunakan secara kolektif oleh mereka. Perwujudan kebudayaan tersebut diperantarai atau dapat dilihat dari pranata-pranata sosial yang ada. Dua pranata yang dianggap penting untuk memahami kehidupan nelayan adalah penangkapan dan pemasaran ikan.

Namun pranata sosial tersebut dapat tertutupi oleh kehadiran perempuan nelayan yang berfungsi sebagai “katup pengaman” atas keterjeratan nelayan dari sistem yang mereka yakini. Perempuan nelayan bukan sekedar menjadi penyanggah ekonomi, tetapi sekaligus sebagai partner penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan nelayan. Usaha-usaha lain yang dilakukan perempuan masih berhubungan dengan dunia kenelayanan, misalnya usaha krupuk ikan dan iwak-iwa’an. Dalam konteks ini, maka yang menjadi perhatian oleh pemegang kebijakan (pemerintah) bukan sekedar nelayan, tetapi kaum perempuan nelayan. Justru potensi besar terdapat di sektor ini, dengan memanfaatkan segala kemampuan dan peluang ekonomis.

Kehadiran perempuan di sektor publik pada satu sisi dapat mengurangi dominasi (untuk tidak mengatakan “mengggeser”) terhadap peran patriarki laki-laki yang selama ini terbentuk oleh sistem budaya dan sosial masyarakat. Tetapi hal tersebut bukan sesuatu yang negatif, karena dapat dilihat dalam konteks pemberdayaan. Kehadiran perempuan yang bergerak di bidang usaha dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan orientasi masyarakat dari pemarginalan menuju pemberdayaan dengan tetap memperhatikan *local wisdom*, yakni budaya perempuan santri yang selalu menjunjung tinggi kehormatan suami.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Wahyono, et.al., *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta:Media Pressindo, 2001.

A. Halim, Paradigma “Dakwah Pengembangan Masyarakat” Moh. Ali Aziz (ed.), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005.

Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, ter. Jakarta:Pustaka Jaya, 1981

Djatikusumo, E. Wisnuwidayat, *Biologi Ikan Ekonomi Penting*. Jakarta:Akademi Perikanan, 1977.

Frits W. Went, *Ikan*. Jakarta:Tira Pustaka, 1979.

Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta:LkiS, 2003.

Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta:LkiS, 2007.

_____, dkk. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta:LKiS, 2006.

_____, *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta:LKiS, 2007.

Nur Syam, *Islam Pesisir*. Yogyakarta:LKiS, 2005.

Profil Pesantren Jawa Timur. Malang:LPAM, 1997.

Sadhori S., Naryo, *Teknik Penangkapan Ikan*. Bandung:Angkasa, 1985.

Tim Pemda, *Lamongan Mamayu Raharjaning Praja*. Lamongan:PEMDA, 2004

Dokumen :

Keputusan Kepala Desa Kranji tentang Peraturan Tata Kerja Kenelayanan No. 01 Tahun 1991 Kranji:Pemerintah Desa, 1991.

Sejarah Desa Kranji dan Pemerintahannya. Kranji:Pemerintah Desa, 2006.

Pendataan Profil Desa 2005. Kanji:Pemerintah Desa, 2005.

Daftar Istilah

Miyang :

Pergi ke laut untuk menangkap ikan, baik menggunakan perahu besar atau kecil.

Kursin :

Adalah jenis perahu dengan ukuran 5 x 15 m, dengan ABK mencapai 30 orang.

Puket ireng :

Jenis perahu penangkap ikan dengan ukuran 2 x 7,5 m, dengan ABK 3-6 orang.

Mracang :

Pedagang dalam skala kecil untuk keperluan rumah tangga.

Bakul :

Pedagang kecil yang menjajakan dagangannya secara langsung ke rumah-rumah.

Daokeh :

adalah sebutan untuk pemilik perahu.

Jragan :

adalah sebutan untuk orang yang bertanggung jawab terhadap operasional perahu. Keputusan untuk miyang (melaut) dan tidak, sepenuhnya berada di tangan Jragan.

Belah :

adalah sebutan untuk orang-orang yang ikut terlibat dalam pengoperasian kapal secara keseluruhan.

Belah Simbatan :

ialah orang yang ikut miyang pada perahu lain selain perahu yang biasa ia ikuti.

Belah (biasa) :

Adalah orang yang hanya ikut miyang tanpa mempunyai peran tambahan apapun. Dia hanya ikut dan melaksanakan tugas-tugas umum seperti menarik jaring, ikut membongkar ikan dll.

Champoan/Nyampo : :

adalah orang yang bertugas untuk membersihkan, merawat, dan mempersiapkan perahu agar siap berlayar (ngombang).

Tanggong, :

orang yang bertugas menjadi penunjuk arah kemanapun perahu akan pergi berlayar. Kemana saja perahu diarahkan, semua tergantung pada tanggong.

Serep :

adalah orang yang memegang kemudi perahu.

Mesim :

adalah orang yang bertanggung jawab pada urusan mesin kapal.

Warnen :

Adalah petugas untuk menghubungi seluruh anggota (belah) di saat ada keputusan miyang dari jragan.

Ring :

adalah orang yang bertugas untuk melempar timah puket sekaligus juga menariknya kembali.

Damar

adalah orang yang bertugas sepenuhnya terhadap urusan lampu perahu.

Umbal

adalah orang yang bertugas untuk melemparkan umbal di saat ada ikan atas aba-aba dari tanggong. Umbal adalah timah besar berbentuk seperti bola, berukuran sebesar bola volley yang fungsinya sebagai pemberat, agar jaring /puket segera cepat turun ke dasar laut.

Juru arus

adalah orang yang bertugas sebagai penghalau ikan agar tidak keluar dari lingkaran jaring. Dia akan melompat ke laut di saat proses penangkapan ikan, persis setelah umbal dilemparkan.

Along

adalah istilah dipakai ketika hasil tangkapan melimpah.

Ngoreng

adalah suatu musim dimana hasil tangkapan ikan hanya memperoleh sedikit.

Jolo Eder :

Adalah semacam jala biasa dengan bentuk yang diperbesar karena akan digunakan di tengah laut.

Jaten :

Adalah jenis perahu yang tebjuta dari pon kayu jati utuh (tidak disambung) dengan usuran 3,5 s/d 4,5 M dengan tinggi 1 M.

Linggi :

Yaitu sebatang kayu yang terletak di bagian haluan dan buritan.

Tawúr :

Yaitu proses berlangsungnya penangkapan ikan yang ditandai dengan pembuangan ujung jaring yang diberi tanda umbal ke permukaan air sampai panaikan jaring kembali.

Daftar Singkatan

BP2M : Balai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

TPI : Tempat Pelelangan Ikan, yaitu suatu tempat trasaksi antara nelayan dengan bakul atau tengkulak.

ABK : Anak Buah Kapal, yaitu personil yang terlibat dalam aktifitas penangkapan ikan di laut.

HNSI : Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

- RN : Rukun Nelayan
- RTN : Rukun Tetangga Nelayan.
- KUK : Kelompok Usaha Krupuk, suatu organisasi yang menaungi aktifitas pekerja/usaha krupuk Kranji.
- WBL : Wisata Bahari Lamongan, adalah kasawan wisata moderen di pantai utara Lamongan.
- LIS : Lamongan Integrated Shorbase.
- DPKP : Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan.
- KUD : Koperasi Unit Desa
- FGD : Focus Group Discussion.
- BPD : Badan Perwakilan Desa
- LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- ASDP : Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

